



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dan seluruh sumber daya yang dikuasainya sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam melakukan reformasi sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak sekedar pelimpahan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Perundang-Undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur / Bupati / Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Pengelolaan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai entitas pelaporan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta standar akuntansi yang berlaku.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas; dan
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;



- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya; dan
- h. memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
- p. Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin Berbasis Akrua;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022;
- r. Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam enam bab yaitu:

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Neraca
 - 5.3.1 Aset Lancar
 - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.3 Aset Tetap
 - 5.3.4 Dana Cadangan
 - 5.3.5 Aset Lainnya
 - 5.3.6 Kewajiban
 - 5.3.7 Ekuitas
- 5.4 Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi
 - 5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.5 Pos Luar Biasa
 - 5.4.6 Surplus/Defisit
- 5.5 Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
 - 5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas
 - 5.5.6 Saldo Awal Kas
 - 5.5.7 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus/Defisit-LO
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir

BAB VI Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi regional merupakan serangkaian aktivitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan distribusi pendapatan, serta meningkatkan hubungan ekonomi regional antar daerah.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi regional yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baiknya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Asumsi makro yang ditetapkan pada APBN 2022 diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi 5,2%; inflasi 3,0%; nilai tukar Rp14.350 per US Dollar; tingkat suku bunga SUN 10 tahun sebesar 6,8%; harga minyak 63 dolar per barel; lifting minyak 703 ribu barel per hari; dan lifting gas sebesar 1.036 ribu barel setara minyak per hari. Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 adalah tingkat pengangguran pada kisaran 5,5%-6,3%; kemiskinan 8,5%-9%; gini ratio 0,376- 0,378; indeks pembangunan manusia 73,41-73,46; nilai tukar petani 103-105; dan nilai tukar nelayan 105-106. Perubahan yang terjadi dalam asumsi dasar ekonomi makro, yaitu harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Pemerintah mengajukan perubahan ICP dari US\$ 63 per barel menjadi kisaran US\$ 95 per barel-US\$ 105 per barel. Karena pangkal perubahan adalah harga minyak dunia dan dasar perubahan pertama pada APBN 2022 adalah perubahan asumsi ICP, maka konsekuensinya harus mengadaptasi perubahan ICP ke belanja subsidi dan kompensasi energi yang otomatis juga meningkat.

Secara keseluruhan 2022, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini didukung oleh perbaikan ekonomi global dan domestik secara gradual, seiring program vaksinasi COVID-19 yang terus berlanjut. Investasi diperkirakan meningkat baik investasi bangunan maupun nonbangunan didorong oleh realisasi beberapa proyek investasi existing dan proyek konstruksi baru. Ekspor diperkirakan meningkat, didorong oleh peningkatan permintaan komoditas utama, terutama batubara dan crude palm oil (CPO), sejalan dengan pemulihan ekonomi negara mitra dagang utama. Perbaikan perekonomian global dan domestik serta peningkatan kinerja ekspor tersebut diperkirakan akan meningkatkan kinerja sejumlah lapangan usaha (LU) utama pada 2022, yaitu LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Pertanian.



Sejalan dengan prospek perbaikan perekonomian tersebut, inflasi Kalimantan Selatan pada 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021, dan di atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar $3\pm 1\%$ (yoy). Peningkatan inflasi sejalan dengan pemulihan ekonomi yang didorong oleh vaksinasi yang diperkirakan semakin meningkat dan kasus COVID-19 yang diperkirakan semakin melandai sehingga berdampak pada peningkatan konsumsi dan perbaikan iklim usaha.

Secara tahunan, inflasi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2022 tetap terjaga sebesar 5,95% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi triwulan I 2022 yang sebesar 3,65% (yoy). Inflasi tersebut relatif moderat dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan, dan lebih tinggi dari inflasi nasional, namun masih berada dalam sasaran inflasi nasional tahun 2022 yang sebesar $3\% \pm 1\%$. Inflasi tahunan terutama bersumber dari inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok transportasi, kelompok pakaian dan alas kaki, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Inflasi triwulan III 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2022 seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi di tengah peningkatan harga energi. Peningkatan mobilitas masyarakat diprediksi menjadi sumber tekanan utama didukung oleh perbaikan kondisi pandemi COVID-19.

Berdasarkan data ekonomi makro selama lima tahun terakhir serta memperhatikan kondisi lingkungan internal, eksternal maka proyeksi ekonomi makro Kabupaten Tapin pada tahun 2022 ditargetkan mengalami pertumbuhan ekonomi 3,9 % dari 3,41 % di tahun 2021.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota pada periode tertentu.

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada periode September tahun 2022 mencapai 201,95 ribu orang, bertambah 6,25 ribu orang dibanding Maret 2022, dan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

bertambah 6,19 ribu orang dibanding September 2021. Sejumlah peristiwa yang terjadi medio Maret-September 2022, yang menjadi pendorong terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM.

Pada awal September 2022, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM, yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar, terutama Pertalite hingga di atas 20 persen. Kenaikan harga ini, tentunya sangat berpengaruh pada pengeluaran masyarakat untuk transportasi. Selain itu, kenaikan ini juga berpengaruh pada transportasi barang dan jasa. Kenaikan harga ini tentunya berdampak pula pada naiknya garis kemiskinan di Kalsel. Yakni dari semula Rp 553.073/kapita/bulan pada Maret 2022, naik 5,09 persen sehingga jika dirata-ratakan, maka pada September 2022, rumah tangga miskin di Kalimantan Selatan dengan 4,93 orang anggota rumah tangga, garis kemiskinannya adalah Rp 2.865.459/rumah tangga/bulan.

Secara umum, persentase penduduk miskin seluruh provinsi di Pulau Kalimantan pada September 2022, masih berada di bawah rata-rata nasional. Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Pulau Kalimantan, sementara persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Kalimantan Utara.

Berikut perkembangan garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Tapin dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022 :

| Tahun | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin | |
|-------|------------------|-----------------|------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2014 | 314.696 | 6.520 | 3,63 |
| 2015 | 330.033 | 7.010 | 3,88 |
| 2016 | 369.153 | 6.810 | 3,70 |
| 2017 | 390.488 | 7.010 | 3,77 |
| 2018 | 405.591 | 6.980 | 3,70 |
| 2019 | 406.367 | 6.507 | 3,41 |
| 2020 | 446.577 | 5.899 | 3,06 |
| 2021 | 459.160 | 6.925 | 3,60 |
| 2022 | 484.113 | 6.982 | 3,60 |

Sumber : BPS Kabupaten Tapin

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 sebesar 3,60% dan pada Tahun 2022 kembali sebesar 3,60% atau tidak mengalami kenaikan secara persentase. Sedangkan Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Tapin mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar 0,28 ke Tahun 2022 menjadi sebesar 0,33 atau mengalami kenaikan sebesar 0,03. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Tahun | Tingkat Kedalaman Kemiskinan | Indeks Keparahan Kemiskinan |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 2012 | 0,48 | 0,08 |
| 2013 | 0,34 | 0,05 |
| 2014 | 0,37 | 0,06 |
| 2015 | 0,46 | 0,08 |
| 2016 | 0,25 | 0,03 |
| 2017 | 0,40 | 0,08 |
| 2018 | 0,35 | 0,06 |
| 2019 | 0,46 | 0,09 |
| 2020 | 0,45 | 0,12 |
| 2021 | 0,28 | 0,04 |
| 2022 | 0,33 | 0,07 |

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS Pusat

Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Tapin mengalami kenaikan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 0,03. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin meningkat.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari:

- mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha; dan
- mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah sebesar 4,15%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tapin Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,96%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,15% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021.

2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan



- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin untuk Tahun 2022 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tapin yang diukur oleh Gini Ratio adalah di angka 0,29 atau sama dengan posisi di Tahun 2021.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebesar 70,31 dengan kategori tinggi dan Tahun 2022 adalah sebesar 71.02 dengan kategori yang masih tinggi.

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah sebesar 71.02, yang jika dibandingkan dengan pencapaian IPM Tahun 2021 adalah sebesar 70,31 mengalami kenaikan sebesar 0,71. Berikut realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tapin Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022.

| Tahun | IPM |
|-------|-------|
| 2010 | 64,89 |
| 2011 | 65,41 |
| 2012 | 65,92 |
| 2013 | 66,48 |
| 2014 | 66,99 |
| 2015 | 67,67 |
| 2016 | 68.05 |
| 2017 | 68,70 |
| 2018 | 69,53 |
| 2019 | 70,13 |
| 2020 | 70,11 |
| 2021 | 70,31 |
| 2022 | 71,02 |

Sumber: BPS Kabupaten Tapin



2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, diperlukan beberapa tahapan mulai dari kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat. Dalam tahapan perencanaan pembangunan ekonomi, diperlukan data statistik sebagai dasar penentuan strategi kebijakan. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif berguna untuk memberikan gambaran keadaan masa lalu dan masa sekarang, serta sasaran yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Salah satu indikator statistik yang banyak digunakan untuk keperluan tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga pada periode penghitungan, bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dengan tujuan mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perbandingan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin tersebut mengalami penurunan drastis bahkan hingga menyentuh angka minus. Hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas perekonomian. Capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin pada tahun 2019 lebih tinggi dari pada Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya Kabupaten Tapin tertinggal beberapa angka dari rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan.



Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Tahun 2022 ada di angka 5,11 persen. Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut Lapangan Usaha terdiri atas Perdagangan dan Reparasi sebesar 7,15 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,60 persen. Selanjutnya Konstruksi sebesar 4,33 persen, Industri Pengolahan sebesar 3,31 persen dan Pertanian sebesar 1,45 persen, serta Lain-lain sebesar 3,28 persen. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya daya beli masyarakat seiring dengan bertambahnya pendapatan.

Sedangkan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran terdiri dari ekspor dan impor masing-masing tumbuh sebesar 13,32 persen dan 14,60 persen. Selanjutnya dari segi konsumsi rumah tangga sebesar 5,37 persen, PMTB sebesar 5,16 persen, konsumsi LNPRP sebesar 5,02 persen, dan sebesar minus 0,56 persen. (Sumber : BPS Provinsi Kalsel ; Berita Resmi Statistik No. 11/02/63/Th.XXVII/, 6 Februari 2023)

Sepanjang tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 perekonomian Kabupaten Tapin rata-rata mengalami percepatan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan sektor utama Kabupaten Tapin yaitu sektor pertambangan. Pada periode Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin sebesar 4,24%, Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin turun menjadi sebesar minus 1,49% serta pada Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin naik menjadi sebesar 3,41%. Sedangkan di Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin diproyeksikan sebesar 3,9 % berbanding dengan proyeksi Provinsi Kalimantan Selatan yang berkisar 4,0 – 4,5 %.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tapin dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- a. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- c. Inflasi Berat (*High Inflation*). Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Pada Juni 2022, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,78 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,04. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran secara signifikan. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,41 persen dengan memberikan andil cukup besar pada inflasi Juni 2022 sebesar 0,42 persen yang disebabkan cabai merah keriting, tomat, cabai rawit, kol putih dan bawang merah yang mengalami kenaikan harga yang disebabkan tingginya permintaan. Kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 2,20 persen yang disebabkan peningkatan harga angkutan sungai dan penyeberangan serta angkutan udara disebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak dan avtur. Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,77 persen yang naik cukup tinggi. Ketiga kelompok pengeluaran tersebut secara signifikan mengakibatkan terjadinya inflasi pada bulan Juni 2022.

Bulan Juni 2022, di Kota Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 0,71 persen. Laju inflasi kalender tahun 2021 (Juni 2022 terhadap Desember 2021) yaitu sebesar 4,01 persen dan laju inflasi “year on year” adalah 5,92 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain angkutan udara, rokok kretek filter, telur ayam ras, bawang merah dan cabai rawit. Sedangkan komoditas yang menahan inflasi dengan andil tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain ikan gabus, bahan bakar rumah tangga, ikan asin telang, minyak goreng dan cumi-cumi.

Inflasi bulan Juni 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang pada sembilan dari sebelas kelompok pengeluaran yang ditunjukkan oleh naiknya Indeks Harga Konsumen pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau sebesar 1,2 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,9 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,34 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,12 persen; kelompok Transportasi sebesar 2,48 persen; kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,05 persen; kelompok Rekreasi, Komunikasi dan Budaya sebesar 1,58 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,07 persen dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,97 persen. Inflasi di Kota Banjarmasin pada bulan Juni 2022 terjadi karena kenaikan indeks harga pada pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau sebesar 1,2 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,9 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,34 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,12 persen; kelompok Transportasi sebesar 2,48 persen; kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,05 persen; kelompok Rekreasi, Komunikasi dan Budaya sebesar 1,58 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,07 persen dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,97 persen. Sedangkan terjadi penurunan indeks harga pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,39 persen. Kelompok Pendidikan tidak mengalami perubahan indeks harga. (sumber BPS Banjarmasin Juli 2022)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik (Nasional), tingkat inflasi Kabupaten Tapin Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak tersedia (*not available*).

Kabupaten Tapin memakai data inflasi Kota Banjarmasin dengan asumsi Kota Rantau memiliki struktur perubahan harga yang relatif sama dengan Kota Banjarmasin. Tingkat inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif berada pada tahun 2017 sebesar 3,82%, tahun 2018 sebesar 2,63%, tahun 2019 sebesar 4,15%, tahun 2020 sebesar 1,67% dan tahun 2021 sebesar 2,52%. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, rata-rata pertumbuhan inflasi kota Banjarmasin sebesar 2,96%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Tapin

Struktur perekonomian di Tapin Tahun 2022 sebagaimana tahun 2021 masih didominasi oleh beberapa sektor besar yaitu Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini tercermin dari sumbangan ketiga sektor ini terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku yang cukup besar.

Struktur perekonomian Kabupaten Tapin dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(dalam jutaan rupiah)

| No | Lapangan Usaha/Industry | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021** |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i> | 1.625.550 | 1.642.880 | 1.777.050 | 1.715.850 | 1.712.990 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i> | 2.066.270 | 2.289.030 | 2.293.860 | 2.236.350 | 2.574.050 |
| 3 | Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i> | 522.240 | 545.990 | 573.730 | 561.280 | 617.210 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i> | 6.840 | 7.870 | 8.440 | 9.060 | 9.700 |
| 5 | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i> | 23.410 | 25.810 | 27.260 | 27.280 | 28.410 |
| 6 | Konstruksi/ <i>Construction</i> | 420.320 | 456.460 | 491.500 | 491.170 | 529.370 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i> | 732.860 | 813.700 | 892.400 | 906.920 | 961.510 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i> | 237.330 | 260.080 | 278.940 | 278.410 | 294.750 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i> | 171.360 | 188.920 | 201.220 | 204.950 | 222.950 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i> | 263.650 | 290.080 | 312.180 | 333.830 | 360.470 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Lapangan Usaha/Industry | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021** |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i> | 85.130 | 94.390 | 103.730 | 109.510 | 114.610 |
| 12 | Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i> | 104.310 | 112.720 | 120.230 | 126.640 | 134.470 |
| 13 | Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i> | 8.630 | 9.300 | 10.140 | 10.150 | 10.990 |
| 14 | Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i> | 572.360 | 617.210 | 661.340 | 678.640 | 709.610 |
| 15 | Jasa Pendidikan/ <i>Education</i> | 383.560 | 419.090 | 445.700 | 456.540 | 490.030 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i> | 136.520 | 148.080 | 158.680 | 166.330 | 190.390 |
| 17 | Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i> | 70.460 | 77.550 | 80.880 | 82.800 | 85.800 |
| | Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product | 7.430.810 | 7.999.160 | 8.437.290 | 8.395.700 | 9.047.330 |

Sumber : BPS Kabupaten Tapin, BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Pusat

2.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tapin diperlukan sebagai acuan dalam penggalan potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Tapin dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Untuk pembiayaan daerah diarahkan ke pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SILPA dan penarikan pinjaman daerah.

Kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan jumlah Penerimaan Daerah yang diterima. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Di bawah ini data perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 :

| Tahun | Pendapatan Daerah (Rp) | Belanja Daerah (Rp) |
|-------|------------------------|----------------------|
| 2018 | 1.229.677.951.405,00 | 1.228.077.951.405,00 |
| 2019 | 1.082.883.454.188,00 | 1.081.725.054.188,00 |
| 2020 | 1.379.911.900.738,00 | 1.376.661.900.738,00 |
| 2021 | 1.302.922.624.512,00 | 1.777.416.499.244,27 |
| 2022 | 1.727.486.281.039,00 | 1.885.015.350.950,00 |

Sumber : KUA dan PPAS series 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin mengalami perubahan yang cukup fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pendapatan Daerah tahun 2022 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah tahun 2022 dialokasikan untuk menunjang Prioritas Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah, kebijakan Pemerintahan Provinsi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat pada tahun 2020 sampai dengan 2021, dan walaupun melandai di tahun 2022 berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Kinerja ekonomi di tahun 2022 akan ditopang oleh keberhasilan program penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan juga perdagangan internasional. Tingkat kepercayaan konsumen yang meningkat akan mendorong konsumsi dan membangkitkan sisi produksi serta mengakselerasi perekonomian. Pengendalian inflasi dilakukan agar harga kebutuhan pokok dapat dijangkau oleh masyarakat. Penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan guna mewujudkan pemerataan pembangunan.

Langkah utama yang sudah dilakukan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara.

Pendapatan negara pada tahun 2022 diproyeksikan tetap dapat melanjutkan kinerja positif seiring prospek pemulihan ekonomi di tahun 2022. Namun demikian, secara nominal pendapatan negara di tahun 2022 belum dapat kembali pada posisi sebelum pandemi Covid-19. Beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut antara lain karena sektor ekonomi yang diperkirakan belum pulih sepenuhnya, insentif fiskal yang sifatnya permanen, serta basis penerimaan pajak tahun 2020 yang turun mendekati realisasi tahun 2015 karena dampak pandemi Covid-19. Komitmen Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada dunia usaha pada tahun 2020 dan 2021 melalui insentif perpajakan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan selanjutnya memberikan efek positif pada pendapatan negara. Dengan demikian, prospek pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2022 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional baik dari sisi demand maupun supply. Pemerintah tetap akan mewaspadaikan dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian yang berasal dari dinamika pandemi Covid-19 di tahun 2022,

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari masa relaksasi pelebaran defisit, sehingga harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pemerintah akan menjadikan momentum pandemi sebagai titik awal untuk melakukan reformasi. Reformasi struktural melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi serta reformasi penganggaran akan menjadi fondasi utama dalam pemulihan ekonomi.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf C poin 1 bahwa



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah;

Target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai akhir tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.80.399.542.235,00 apabila dibandingkan dengan target awal Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Tahun 2022 sebesar Rp.76.958.155.200,00 yang berarti terjadi kenaikan sebesar Rp.3.441.387.035,00 atau mengalami kenaikan sebesar 4 %.

b. Pendapatan Transfer;

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Jumlah pendapatan transfer yang dialokasikan untuk Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 264.074.813.225,00 yang semula sebesar Rp. 988.012.669.000,00 menjadi Rp. 1.252.087.482.225,00 atau naik sebesar 27 %.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapin Tahun 2022 sampai dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.358.964.968.519,00 yang semula sebesar Rp.36.034.288.060,00 menjadi Rp.394.999.256.579,00.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 diupayakan dengan perencanaan yang secermat mungkin sehingga mampu untuk mencukupi rencana belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022. Penerimaan dalam rencana pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan terhadap obyek-obyek PAD yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek PAD yang bersangkutan dan diupayakan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

untuk tidak menjadikan beban bagi masyarakat, serta penerimaan pendapatan daerah tersebut didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif.

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin telah disusun berdasarkan perkiraan yang terukur dan rasional serta dengan melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya. Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 sampai akhir tahun diprediksi mengalami kenaikan sebesar Rp.626.481.168.779,00 yang semula ditargetkan sebesar Rp.1.101.005.112.260,00 menjadi Rp.1.727.486.281.039,00 atau mengalami kenaikan sebesar 57 %.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD.

Perbandingan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

| NO. | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH (BERKURANG) |
|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4 | PENDAPATAN | 1.101.005.112.260,00 | 1.727.486.281.039,00 | 626.481.168.779,00 |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 76.958.155.200,00 | 80.399.542.235,00 | 3.441.387.035,00 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 988.012.669.000,00 | 1.252.087.482.225,00 | 264.074.813.225,00 |
| 4.3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 36.034.288.060,00 | 394.999.256.579,00 | 358.964.968.519,00 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin 2022

Peranan Pajak Daerah dalam memberikan sumbangan ke PAD semakin penting. Untuk itu, diperlukan upaya untuk melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus-menerus dalam melakukan perbaikan internal dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Disamping itu juga upaya untuk terus meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak daerah.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah Kabupaten Tapin mengalami kenaikan sebesar Rp.201.464.342.846,00 yang semula sebesar Rp.1.683.551.008.104,00 menjadi sebesar Rp.1.885.015.350.950,00 atau naik sebesar 12 %.

Perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terjadi pada Belanja Operasi. Dimana Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Rp.119.719.911.721,00 yang semula Rp.954.227.830.063,00 menjadi Rp.1.073.947.741.784,00 atau naik sebesar 13 %.

Belanja Modal dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 80.931.213.445,00 dari semula Rp.539.670.179.941,00 menjadi Rp.620.601.393.386,00 atau naik sebesar 15 %. Belanja Tidak Terduga dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.173.562.732,00 dari semula Rp.25.000.000.000,00 menjadi Rp.24.826.437.268,00 atau turun sebesar 1 % serta untuk Belanja Transfer dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.986.780.412,00 dari semula Rp.164.652.998.100,00 menjadi sebesar Rp.165.639.778.512,00 atau bertambah 1 %.

Perubahan Prioritas Belanja Daerah dapat di lihat pada tabel berikut :

| NO. | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH (BERKURANG) |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 5 | BELANJA | 1.683.551.008.104,00 | 1.885.015.350.950,00 | 201.464.342.846,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 954.227.830.063,00 | 1.073.947.741.784,00 | 119.719.911.721,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 506.900.663.842,00 | 508.219.525.845,00 | 1.318.862.003,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 393.117.455.035,00 | 497.786.646.398,00 | 104.669.191.363,00 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 7.782.683.508,00 | 7.782.683.508,00 | - |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 41.598.820.050,00 | 55.324.748.305,00 | 13.725.928.255,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 4.828.207.628,00 | 4.834.137.728,00 | 5.930.100,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 539.670.179.941,00 | 620.601.393.386,00 | 80.931.213.445,00 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 79.436.274.843,00 | 25.057.697.000 | (54.378.577.843,00) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 67.994.462.291,00 | 86.238.708.977,00 | 18.244.246.686,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 142.510.140.080,00 | 187.320.522.104,00 | 44.810.382.024,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 244.561.292.427,00 | 316.854.829.305,00 | 72.293.536.878,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.918.010.300,00 | 4.879.636.000,00 | (38.374.300,00) |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | - |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 25.000.000.000,00 | 24.826.437.268,00 | 173.562.732,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 25.000.000.000,00 | 24.826.437.268,00 | 173.562.732,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 164.652.998.100,00 | 165.639.778.512,00 | (986.780.412,00) |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 2.402.046.500,00 | 2.728.197.612,00 | (326.151.112,00) |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 162.250.951.600,00 | 162.911.580.900,00 | (660.629.300,00) |

(Sumber : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Tapin TA. 2022)

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Ketentuan 27 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud dengan Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Penerimaan Pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp.489.016.825.933,00 yang semula sebesar Rp.661.045.895.844,00 menjadi sebesar Rp.172.029.069.911,00 atau turun sebesar 74 %.

Perubahan kebijakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp.504.095.813.683,00 yang semula sebesar Rp.636.888.330.844,00 menjadi sebesar Rp.132.792.517.161,00 atau turun sebesar 79% yang terdiri dari Pelampauan Penerimaan PAD tidak terjadi perubahan dari pagu semula sebesar Rp.861.000.000,00. Untuk Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp.145.000.000,00 dari pada Rp.149.428.777.691,00 menjadi Rp.4.428.777.691,00 atau turun sebesar 97%. Pada penghematan belanja terjadi penurunan sebesar Rp.359.095.813.683,00 dari pagu semula sebesar Rp.475.275.932.218,00 menjadi sebesar Rp.116.180.118.535,00 atau 76 %. Sisa Belanja lainnya tidak terjadi perubahan dari pagu semula sebesar Rp.11.322.620.935,00. Penerimaan pinjaman daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.15.078.987.750,00 dari pagu semula sebesar Rp.23.657.565.000,00 menjadi sebesar Rp.38.736.552.750,00 atau 64%. Sedangkan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tidak ada perubahan dari pagu semula sebesar Rp.500.000.000,00.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.64.000.000.000,00 dari pagu semula sebesar Rp.78.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp.14.500.000.000,00 atau 82%. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dilakukan meliputi adanya penambahan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebesar Rp.6.000.000.000,00. Sedangkan pada pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo mengalami penurunan sebesar Rp.70.000.000.000,00 dari pagu semula sebesar Rp.78.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.8.000.000.000,00 atau 90 %. Untuk pemberian pinjaman daerah tidak ada perubahan dalam anggaran yaitu sebesar Rp.500.000.000,00.

Perbandingan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| NO. | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH (BERKURANG) |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 6 | Pembiayaan Netto | 582.545.895.844,00 | 157.529.069.911,00 | (425.016.825.933,00) |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 661.045.895.844,00 | 172.029.069.911,00 | (489.016.825.933,00) |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 636.888.330.844,00 | 132.792.517.161,00 | (504.095.813.683,00) |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 23.657.565.000,00 | 38.736.552.750,00 | 15.078.987.750,00 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | - |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 78.500.000.000,00 | 14.500.000.000,00 | (64.000.000.000,00) |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 78.000.000.000 | 8.000.000.000 | (70.000.000.000,00) |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | - |

(Sumber : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Tapin TA. 2022)

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapin tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah :

1. Penguatan infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian;
2. Pemerataan pelayanan dasar serta meningkatkan kualitas SDM;
3. Pengembangan wilayah potensial dan pemerataan pembangunan;
4. Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan publik;
5. Pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi.

Mengacu pada prioritas pembangunan Kabupaten Tapin maka disusun program pembangunan berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah dan SKPD pelaksana pada Tahun 2022.

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan ini adalah mengacu pada target-target keuangan yang dicanangkan pada masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dalam Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022.

Penjabaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tapin di atas dituangkan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 serta pada tiap-tiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program pada Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung, Fungsi Penunjang, Fungsi Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten pada Tahun Anggaran 2022. Secara ringkas capaian kinerja keuangan pada masing-masing urusan dapat dirinci sebagai berikut:

| No. | JENIS URUSAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | (%) |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | 1.160.425.101.662,00 | 934.515.577.964,00 | 80,53 |
| 1 | Pendidikan | 276.777.984.888,00 | 245.454.016.743,00 | 88,68 |
| 2 | Kesehatan | 261.616.279.967,00 | 217.337.818.533,00 | 83,08 |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 548.799.919.355,00 | 410.569.466.113,00 | 74,81 |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 35.902.305.877,00 | 30.435.496.369,00 | 84,77 |
| 5 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 17.650.026.088,00 | 15.274.569.448,00 | 86,54 |
| 6 | Sosial | 19.678.585.487,00 | 15.444.210.758,00 | 78,48 |
| | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | 233.481.240.395,00 | 214.745.482.401,00 | 91,98 |
| 1 | Tenaga Kerja | 7.684.999.005,00 | 7.308.940.916,00 | 95,11 |
| 2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 9.217.682.107,00 | 7.763.646.287,00 | 84,23 |
| 3 | Pangan | 8.425.208.411,00 | 7.819.392.188,00 | 92,81 |
| 4 | Lingkungan Hidup | 26.404.477.432,00 | 22.356.996.896,00 | 84,67 |
| 5 | Administrasi Kependudukan dan Capil | 8.232.354.023,00 | 7.877.954.470,00 | 95,7 |
| 6 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 88.284.943.409,00 | 87.411.053.096,00 | 99,01 |
| 7 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 10.761.417.088,00 | 9.384.924.098,00 | 87,21 |
| 8 | Perhubungan | 9.614.946.588,00 | 7.662.569.232,00 | 79,69 |
| 9 | Komunikasi dan Informatika | 7.852.291.836,00 | 7.459.914.003,00 | 95,00 |
| 10 | Penanaman Modal | 7.289.233.975,00 | 6.062.056.513,00 | 83,16 |
| 11 | Kepemudaan dan Olah Raga | 30.408.076.019,00 | 29.272.502.360,00 | 96,27 |
| 12 | Kebudayaan | 11.892.415.353,00 | 7.728.947.780,00 | 64,99 |
| 13 | Perpustakaan | 7.413.195.149,00 | 6.636.584.562,00 | 89,52 |
| | URUSAN PILIHAN | 96.565.450.240,00 | 87.315.048.685,00 | 90,42 |
| 1 | Kelautan dan Perikanan | 8.231.368.493,00 | 7.665.343.148,00 | 93,12 |
| 2 | Pertanian | 69.175.775.342,00 | 62.791.661.771,00 | 90,77 |
| 3 | Perdagangan | 12.953.140.061,00 | 12.242.965.186,00 | 94,52 |
| 4 | Perindustrian | 6.205.166.344,00 | 4.615.078.580,00 | 74,37 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENDUKUNG | 157.410.339.695,00 | 120.449.733.919,00 | 76,52 |
| 1 | Sekretariat Daerah | 101.043.323.697,00 | 83.700.910.419,00 | 82,84 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 56.367.015.998,00 | 36.748.823.500,00 | 65,2 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG | 241.217.588.513,00 | 227.238.461.120,50 | 94,20 |
| 1 | Perencanaan | 12.833.194.045,00 | 9.762.449.258,00 | 76,07 |
| 2 | Keuangan | 218.427.121.446,00 | 209.212.087.433,50 | 95,78 |
| 3 | Kepegawaian | 9.957.273.022,00 | 8.263.924.429,00 | 82,99 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENGAWASAN | 16.162.792.332,00 | 13.106.406.411,00 | 81,09 |
| 1 | Inspektorat | 16.162.792.332,00 | 13.106.406.411,00 | 81,09 |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | 49.103.904.440,00 | 45.334.923.144,00 | 92,32 |
| 1 | Kecamatan | 49.103.904.440,00 | 45.334.923.144,00 | 92,32 |
| | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 8.547.550.378,00 | 7.865.708.849,00 | 92,02 |
| 1 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 8.547.550.378,00 | 7.865.708.849,00 | 92,02 |



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.



4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

a. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pengukuran aset lancar sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 4) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
- 5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu dengan cara mengurangi nilai nominal (bruto) piutang dengan penyisihan piutang tak tertagih. Karena Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih, oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai piutang dapat disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material yang mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a) Penilaian Kualitas Piutang; dan
- b) Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penggolongan kualitas piutang dibagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar;
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c) Kualitas Piutang Diragukan;
- d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a) Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b) Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang diatas 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang diatas 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
- Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Untuk taksiran piutang tak tertagih Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

| No | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|----|------------------|-------------------------------|
| 1 | Lancar | 0,5 % |
| 2 | Kurang Lancar | 10 % |
| 3 | Diragukan | 50 % |
| 4 | Macet | 100 % |

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (limapuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan lebih sampai dengan 12 bulan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu diatas tiga bulan sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu tiga bulan atau kurang dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- 1) Deposito berjangka waktu diatas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
- 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu permanen dan non permanen.

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.



2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengukuran investasi jangka pendek

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga
 - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
- b) Investasi jangka panjang non permanen
 - (1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

- (2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- (3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga;
- c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi;
- e) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut;
- f) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

| No | Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi | Persentase Penyisihan |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun | 10% |
| 2 | Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun | 25% |
| 3 | Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun | 50% |
| 4 | Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun | 100% |

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.



Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya;
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan/tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 6) Tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat/pihak lain; dan
- 7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) biaya perencanaan;
- 2) biaya lelang;
- 3) biaya pengawasan;
- 4) biaya persiapan tempat;
- 5) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 6) biaya pemasangan (*instalation cost*);
- 7) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- 8) biaya konstruksi.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah sama dengan atau lebih dari Rp1,00;
- 2) Peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00;
- 3) Bangunan sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00;
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan sama dengan atau lebih dari Rp1,00;
- 5) Aset tetap lainnya:
 - a) Barang bercorak budaya/kesenian dan aset tetap lainnya sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00;
 - b) Hewan/ternak dan tanaman dikapitalisasi tanpa melihat nilai satuan minimum atas perolehan aset tetap tersebut;
 - (1) Untuk hewan/ternak yang digolongkan dalam aset tetap lainnya adalah jenis ternak besar dan ternak kecil;
 - (2) Tanaman pertanian yang digolongkan dalam aset tetap lainnya yaitu jenis tanaman hortikultura;
 - (3) Sedangkan untuk tanaman perkebunan yaitu jenis tanaman keras (tahunan).
 - c) Buku perpustakaan sama dengan atau lebih dari Rp100.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan aset tetap dihitung secara bulanan sejak tanggal pembukuan dari aset tetap dimaksud. Oleh karena aset milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

| Kodifikasi | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|----|--|----------------------|
| 1 | 3 | | | ASET TETAP | |
| 1 | 3 | 2 | | Peralatan dan Mesin | |
| 1 | 3 | 2 | 01 | Alat-Alat Besar Darat | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 02 | Alat-Alat Besar Apung | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 03 | Alat-Alat Bantu | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 04 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 6 |
| 1 | 3 | 2 | 05 | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 06 | Alat Angkut Apung Bermotor | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 07 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 08 | Alat Angkut Bermotor Udara | 30 |
| 1 | 3 | 2 | 09 | Alat Bengkel Bermesin | 6 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | Alat Ukur | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | Alat Pengolahan Pertanian | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | Alat Kantor | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | Alat Rumah Tangga | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | Peralatan Komputer | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | Alat Studio | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | Alat Komunikasi | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 20 | Peralatan Pemancar | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 21 | Alat Kedokteran | 7 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Kodifikasi | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|----|--|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 22 | Alat Kesehatan | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 23 | Unit-Unit Laboratorium | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 27 | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 28 | <i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i> | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 31 | Senjata Api | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Api | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 33 | Alat Keamanan dan Perlindungan | 3 |
| 1 | 3 | 3 | | Gedung dan Bangunan | |
| 1 | 3 | 3 | 01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 20 |
| 1 | 3 | 3 | 02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 10 |
| 1 | 3 | 3 | 03 | Bangunan Menara | 20 |
| 1 | 3 | 3 | 04 | Bangunan Bersejarah | 20 |
| 1 | 3 | 3 | 05 | Tugu Peringatan | 25 |
| 1 | 3 | 3 | 06 | Candi | 25 |
| 1 | 3 | 3 | 07 | Monumen/Bangunan Bersejarah | 25 |
| 1 | 3 | 3 | 08 | Tugu Peringatan Lain | 25 |
| 1 | 3 | 3 | 09 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 10 |
| 1 | 3 | 3 | 10 | Rambu-Rambu | 10 |
| 1 | 3 | 3 | 11 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 10 |
| 1 | 3 | 4 | | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | |
| 1 | 3 | 4 | 01 | Jalan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 02 | Jembatan | 15 |
| 1 | 3 | 4 | 03 | Bangunan Air Irigasi | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 04 | Bangunan Air Pasang Surut | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 05 | Bangunan Air Rawa | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 06 | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 07 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 08 | Bangunan Air Bersih/Baku | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 09 | Bangunan Air Kotor | 10 |

Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman tidak disusutkan.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan agar ditinjau secara periodik, dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang agar dilakukan penyesuaian.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Biaya pemeliharaan atau rehabilitasi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan sepanjang tidak menambah kualitas, kapasitas, dan manfaat, tetapi hanya memperbaiki kondisi dan menjadi normal kembali, maka tidak dikapitalisasi.

Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus, jika setelah Perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap misalnya biaya perbaikan seperti renovasi (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), restorasi (kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya) dan *overhaul* (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan



maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), maka akan menambah masa manfaat.

Renovasi Aset Tetap

Suatu satuan kerja (pada K/L atau SKPD) dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Namun demikian pada prakteknya banyak satuan kerja yang melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang bukan miliknya, jika hal ini terjadi renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya (Aset Tetap Renovasi).

Renovasi aset tetap berdasarkan obyeknya dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan satuan kerja pada K/L atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi seperti ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap. Namun jika renovasi tersebut belum selesai pengerjaannya sampai dengan tanggal pelaporan maka akan dicatat sebagai KDP.
- 2) Renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkungan entitas pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Renovasi seperti ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap tetapi dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi. Pada akhir tahun anggaran aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik mengikuti peraturan yang berlaku.
Renovasi aset tetap bukan milik di luar entitas pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. (Misalnya SKPD meminjam/menyewa gedung milik K/L). Renovasi seperti ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap tetapi dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi. Pada akhir masa perjanjian pinjam/sewa, aset renovasi seyogyanya diserahkan kepada pemilik mengikuti peraturan yang berlaku.
- 3) Renovasi aset tetap bukan milik di luar entitas pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. (Misalnya SKPD meminjam/menyewa gedung milik K/L) Renovasi seperti ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap tetapi dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi. Pada akhir masa perjanjian pinjam/sewa, aset renovasi seyogyanya diserahkan kepada pemilik mengikuti peraturan yang berlaku.



d. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 4) Aset Tidak Berwujud;
- 5) Aset Lain-lain.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset Lainnya

- 1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
- 2) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah;
- 3) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
- 4) Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
- 5) Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan;
- 6) Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
 - a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.



Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Penyajian Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 20 tahun untuk Lisensi, Hak Cipta dan Hak Paten sedangkan untuk Aset Tidak Berwujud seperti *software*, *website*, *database*, hasil kajian/penelitian dengan masa manfaat selama 5 tahun.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.



Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Utang Beban, diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
- b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
- c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), kecuali pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah daerah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LRA dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan-LRA juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Pendapatan-LRA.

Pengungkapan Pendapatan-LRA

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan – LRA adalah:

- 1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



- 2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

g. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten, dinas pemerintah tingkat kabupaten, dan lembaga teknis daerah kabupaten.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) atau SP2D Nihil.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.



Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Belanja

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja Operasi;
- 2) Belanja Modal;
- 3) Belanja Tak Terduga

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran

Pengungkapan Belanja

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) rincian belanja per SKPD;
- 2) penjelasan atas unsur–unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- 3) penjelasan sebab–sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

h. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:



- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pembiayaan

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pembiayaan Netto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Pembiayaan Dana Bergulir

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.



Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Penyajian Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- 2) Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeluaran pembiayaan berbeda; dan
- 3) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

i. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LO terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LO;



- 2) Pendapatan Transfer-LO;
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
- 4) Pendapatan Non Operasional-LO; dan
- 5) Pos Luar Biasa-LO.

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak pemerintah daerah atas suatu pendapatan (*earned*); atau
- 2) Telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/ imbalan; dan
- 2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
- 2) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- 3) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan-LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

- 1) Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak-LO. PPK-SKPD mencatat “Piutang Pajak Daerah” di debit dan “Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit;
- 2) Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)”; dan
- 3) Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitor atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan Pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

- 1) Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama (maksimal 30 hari) dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

- 2) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).



Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.

Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
- 2) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah-LO dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
- 3) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota



Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO, Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian-LO (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Transfer-LO

Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD.

Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Transfer-LO.



Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO terdiri dari :

- a. Pendapatan Hibah-LO;
- b. Dana Darurat-LO; dan
- c. Pendapatan Lainnya-LO.

Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Pendapatan yang Sah-LO

Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD.

Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat di terima di RKUD.

Dana Darurat-LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah (basis kas).

Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional-LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.

Pendapatan Non Operasional-LO terdiri dari:

- 1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO;
- 2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO; dan
- 3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Non Operasional-LO

Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.



Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Non Operasional-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.

Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

Pendapatan Luar Biasa-LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

j. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.



Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.



Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan



biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yaitu:

- 1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
- 2) Beban Transfer;
- 3) Beban Non Operasional;
- 4) Beban Luar Biasa.

Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.



Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Pengakuan Beban Operasi

- 1) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
- 2) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

- 3) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 4) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/ jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- 5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 6) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- 7) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- 8) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- 9) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 10) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 11) Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan dan Pengukuran Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban Non Operasional

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Pengakuan dan Pengukuran Beban Non Operasional

Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pengakuan dan Pengukuran Beban Luar Biasa

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. Pendapatan

| Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1.804.862.240.651,00 | 1.717.931.600.070,93 | 1.202.139.964.277,83 |

Struktur Pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan secara keseluruhan periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dianggarkan sebesar Rp1.804.862.240.651,00 dan terealisasi sebesar Rp1.717.931.600.070,93 atau mencapai 95,18%. Realisasi Pendapatan Tahun 2022 meningkat sebesar Rp515.791.635.793,10 atau mencapai 42,91% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan tahun lalu sebesar Rp1.202.139.964.277,83 yang terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2022 | | Tahun 2021 |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 81.043.031.115,00 | 92.886.377.406,93 | 121.443.140.789,83 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.252.087.482.225,00 | 1.590.277.432.228,00 | 1.050.230.494.367,00 |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 471.731.727.311,00 | 34.767.790.436,00 | 30.466.329.121,00 |
| | Jumlah | 1.804.862.240.651,00 | 1.717.931.600.070,93 | 1.202.139.964.277,83 |

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

| Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 81.043.031.115,00 | 92.886.377.406,93 | 121.443.140.789,83 |

Realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp92.886.377.406,93, atau mencapai 114,61% dari anggaran PAD Tahun 2022 sebesar Rp81.043.031.115,00. Realisasi PAD tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 23,51% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp121.443.140.789,83. Adapun rincian terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2022 | | Tahun 2021 |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 23.355.000.000,00 | 27.427.262.028,47 | 29.439.686.762,34 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 4.570.465.000,00 | 4.003.044.421,23 | 2.337.412.375,00 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 5.179.875.915,00 | 5.179.875.915,00 | 4.701.395.003,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Tahun 2022 | | Tahun 2021 |
|----|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 4 | Lain-lain PAD yang Sah | 47.937.690.200,00 | 56.276.195.042,23 | 84.964.646.649,49 |
| | Jumlah | 81.043.031.115,00 | 92.886.377.406,93 | 121.443.140.789,83 |

Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 23.355.000.000,00 | 27.427.262.028,47 | 29.439.686.762,34 |

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp27.427.262.028,47 atau mencapai 117,44% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp23.355.000.000,00. Realisasi Pendapatan Pajak daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,84% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp29.439.686.762,34 dengan rician yang terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pajak Hotel | 130.000.000,00 | 119.725.200,00 | 90.850.500,00 |
| 2 | Pajak Restoran | 2.850.000.000,00 | 3.874.588.848,00 | 2.382.450.493,50 |
| 3 | Pajak Hiburan | 20.000.000,00 | 73.229.175,00 | 6.216.000,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 500.000.000,00 | 542.382.055,49 | 602.070.579,07 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 11.000.000.000,00 | 12.022.163.886,00 | 9.744.049.854,06 |
| 6 | Pajak Parkir | 40.000.000,00 | 48.047.700,00 | 44.858.700,00 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 15.000.000,00 | 29.775.400,00 | 10.837.400,00 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 50.000.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 3.100.000.000,00 | 4.348.958.255,98 | 6.397.749.261,71 |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 1.900.000.000,00 | 1.809.578.521,00 | 1.000.288.796,00 |
| 11 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 3.750.000.000,00 | 4.549.312.987,00 | 9.160.315.178,00 |
| | Jumlah | 23.355.000.000,00 | 27.427.262.028,47 | 29.439.686.762,34 |

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4.570.465.000,00 | 4.003.044.421,23 | 2.337.412.375,00 |

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 4.003.044.421,23 atau mencapai 87,59% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp4.570.465.000,00. Realisasi Pendapatan retribusi daerah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 71,26% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.337.412.375,00 dengan rician yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Jenis Retribusi | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Retribusi Pelayanan kesehatan | 951.500.000,00 | 503.281.000,00 | 625.428.202,00 |
| | - Dinas Kesehatan | 951.500.000,00 | 503.281.000,00 | 625.428.202,00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 550.000.000,00 | 579.717.000,00 | 48.391.000,00 |
| | - Dinas Lingkungan Hidup | 550.000.000,00 | 579.717.000,00 | 48.391.000,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 21.600.000,00 | 47.450.000,00 | 37.600.000,00 |
| | - Dinas Perhubungan | 21.600.000,00 | 47.450.000,00 | 37.600.000,00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 30.000.000,00 | 51.972.000,00 | 7.300.000,00 |
| | - Dinas Perdagangan | 30.000.000,00 | 51.972.000,00 | 7.300.000,00 |
| 5 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 130.000.000,00 | 145.827.000,00 | 134.043.000,00 |
| | - Dinas Komunikasi & Informatika | 130.000.000,00 | 145.827.000,00 | 134.043.000,00 |
| 6 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 611.515.000,00 | 923.122.000,00 | 456.171.000,00 |
| | - Dinas Lingkungan Hidup | 180.000.000,00 | 248.830.000,00 | 37.880.000,00 |
| | - Dinas Perhubungan | 17.640.000,00 | 0,00 | 39.690.000,00 |
| | - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 259.111.880,00 | 323.250.000,00 | 292.100.000,00 |
| | - Badan Pendapatan Daerah | 144.763.120,00 | 313.342.000,00 | 61.851.000,00 |
| | - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 10.000.000,00 | 8.400.000,00 | 10.550.000,00 |
| | - Sekretariat Daerah | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 |
| | - Dinas Pertanian | 0,00 | 6.300.000,00 | 2.100.000,00 |
| | - Dinas Perdagangan | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 7 | Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan | 920.500.000,00 | 923.889.108,00 | 556.745.000,00 |
| | - Dinas Perdagangan | 920.500.000,00 | 923.889.108,00 | 556.745.000,00 |
| 8 | Retribusi Terminal | 917.000.000,00 | 396.552.000,00 | 156.682.000,00 |
| | - Dinas Perhubungan | 398.000.000,00 | 0,00 | - |
| | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 44.500.000,00 | 37.648.000,00 | 24.202.000,00 |
| | - Dinas Perdagangan | 474.500.000,00 | 358.904.000,00 | 132.480.000,00 |
| 9 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 70.600.000,00 | 109.600.000,00 | 89.200.000,00 |
| | - Dinas Perhubungan | 70.600.000,00 | 109.600.000,00 | 89.200.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Jenis Retribusi | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 15.500.000,00 | 10.875.000,00 | 9.700.000,00 |
| | - Dinas Pertanian | 15.500.000,00 | 10.875.000,00 | 9.700.000,00 |
| 11 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 59.000.000,00 | 6.200.000,00 | 2.442.500,00 |
| | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 9.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.442.500,00 |
| | - Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 50.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 12 | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah | 68.250.000,00 | 42.504.000,00 | 63.937.500,00 |
| | - Dinas Perikanan | 43.250.000,00 | 16.099.000,00 | 40.750.000,00 |
| | - Dinas Pertanian | 25.000.000,00 | 26.405.000,00 | 23.187.500,00 |
| 13 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 150.000.000,00 | 261.805.313,23 | 149.522.173,00 |
| | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 150.000.000,00 | 261.805.313,23 | 149.522.173,00 |
| 14 | Retribusi Izin Trayek | 3.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | - Dinas Perhubungan | 3.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 15 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Dinas Perhubungan | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 4.570.465.000,00 | 4.003.044.421,23 | 2.337.412.375,00 |

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.179.875.915,00 | 5.179.875.915,00 | 4.701.395.003,00 |

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.179.875.915,00 merupakan realisasi penerimaan Bagian Laba (deviden) Tahun 2022 atas Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin kepada BUMD Bank Kalsel yang telah ditransfer pada rekening Kasda PAD dan Penerimaan Lainnya, No Rekening 006.00.03.00001.7 tanggal 10 Maret 2022. Realisasi penerimaan tersebut berdasarkan pernyataan keputusan RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah No.24 Tanggal 26 Februari 2022. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 100% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp5.179.875.915,00. Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 10,18% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.701.395.003,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 47.937.690.200,00 | 56.276.195.042,23 | 84.964.646.649,49 |

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 56.276.195.042,23 atau mencapai 117,39% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp47.937.690.200,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 33,77% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 84.964.646.649,49.

Untuk penganggaran dan realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada tahun 2022 disajikan di Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 537.821.000,00 | 7.142.000,00 |
| 2 | Penerimaan Jasa Giro | 4.937.690.200,00 | 3.478.514.285,95 | 10.244.600.686,33 |
| 3 | Pendapatan Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 1.170.891.202,33 | 41.547.609,82 |
| 5 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 401.385.750,00 | 104.760.181,00 |
| 6 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 0,00 | 31.290.120,00 | 0,00 |
| 7 | Pendapatan Hasil Esekusi atas Jaminan | 0,00 | 247.062.500,00 | 0,00 |
| 8 | Pendapatan Dari Pengembalian | 0,00 | 270.980.926,00 | 1.063.945.475,00 |
| 9 | Pendapatan BLUD | 43.000.000.000,00 | 41.766.456.725,46 | 64.508.029.500,13 |
| 10 | Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (inkracht) | 0,00 | 0,00 | 522.749.819,00 |
| 11 | Pendapatan dana Kapitasi JKN | 0,00 | 0,00 | 5.889.268.129,00 |
| 12 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 8.371.792.532,49 | 2.582.603.249,21 |
| | Jumlah | 47.937.690.200,00 | 56.276.195.042,23 | 84.964.646.649,49 |

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun 2022 sebesar Rp537.821.000,00 merupakan hasil penjualan aset daerah yang terdiri dari:

| No | Uraian | Realisasi 2022 (Rp) |
|----|---|---------------------|
| 1. | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | |
| | Penjualan bahan bangunan sisa pembongkaran kantor Tapin TV | 3.323.000,00 |
| | Sub Jumlah | 3.323.000,00 |
| 2. | Hasil Penjualan Peralatan Mesin | |
| | Penjualan Hasil Lelang | 507.518.000,00 |
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai Dinas PUPR | 3.750.000,00 |
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai Dinas Pertanian | 3.425.000,00 |
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai Dinas Perhubungan | 1.000.000,00 |
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai Kantor Kesbangpol | 205.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Realisasi 2022 (Rp) |
|----|--|-----------------------|
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai BKAD | 400.000,00 |
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai Dinas DP3A | 75.000,00 |
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai Dinas Perkimtan | 1.110.000,00 |
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai Dinas Pendidikan | 9.500.000,00 |
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai Dinas Dukcapil | 200.000,00 |
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai Sekretariat DPRD | 640.000,00 |
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai Dinas Budpar | 3.100.000,00 |
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai Sekretariat Daerah | 3.225.000,00 |
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai Kecamatan CLU | 150.000,00 |
| | Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai Kec. Tapin Selatan | 200.000,00 |
| | Sub Jumlah | 534.498.000,00 |
| | Jumlah | 537.821.000,00 |

Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2022 terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Jasa Giro Kas Daerah | 4.937.690.200,00 | 3.373.186.935,18 | 10.071.861.385,54 |
| 2 | Jasa Giro Bendahara | 0,00 | 74.636.995,64 | 102.905.385,01 |
| 3 | Jasa Giro JKN | 0,00 | 5.563.327,00 | 13.552.233,00 |
| 4 | Jasa Giro BOS | 0,00 | 25.127.028,13 | 56.281.682,78 |
| 5 | Jasa Giro Optima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 4.937.690.200,00 | 3.478.514.285,95 | 10.244.600.686,33 |

Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022 terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – Dinas PUPR | 0,00 | 1.107.310.840,33 | 41.547.609,82 |
| 2 | Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – Dinas Kesehatan | 0,00 | 63.580.362,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 0,00 | 1.170.891.202,33 | 41.547.609,82 |

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2022 terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Pendapatan denda PBB - P2 | 0,00 | 401.385.750,00 | 104.760.181,00 |
| | Jumlah | 0,00 | 401.385.750,00 | 104.760.181,00 |

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2022 terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah | 0,00 | 31.290.120,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 0,00 | 31.290.120,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Realisasi Pendapatan Hasil Esekusi Jaminan Tahun 2022 terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa | 0,00 | 247.062.500,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 0,00 | 247.062.500,00 | 0,00 |

Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian Tahun 2022 terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 | 0,00 | 4.865.333,00 | 5.690.468,00 |
| 2 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan | 0,00 | 264.095.593,00 | 627.945.980,00 |
| 3 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 0,00 | 2.020.000,00 | 4.210.000,00 |
| 4 | Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Dana Hibah | 0,00 | 0,00 | 426.099.027,00 |
| 5 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kegiatan Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 0,00 | 270.980.926,00 | 1.063.945.475,00 |

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2022 terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Jasa Pelayanan Umum BLUD | 43.000.000.000,00 | 41.766.456.725,46 | 64.508.029.500,13 |
| | Jumlah | 43.000.000.000,00 | 41.766.456.725,46 | 64.508.029.500,13 |

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp41.766.456.725,46 dan Rp64.508.029.500,13 yang dapat dirinci sebagai berikut:

| No | Uraian | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Triwulan I | 7.883.276.684,47 | 8.662.046.532,37 |
| 2 | Triwulan II | 8.486.690.419,36 | 6.625.747.565,85 |
| 3 | Triwulan III | 12.246.568.636,30 | 24.577.498.598,00 |
| 4 | Triwulan IV | 13.149.920.985,33 | 24.642.736.803,91 |
| | Jumlah | 41.766.456.725,46 | 64.508.029.500,13 |

Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun 2022 terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kegiatan Fisik | 0,00 | 5.650.714.336,88 | 2.517.126.595,21 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | Pendapatan Dari Pengembalian Sisa Dana Hibah | 0,00 | 314.902.892,00 | 0,00 |
| 3 | Pendapatan Dari Pengembalian Kegiatan | 0,00 | 60.697.497,00 | 0,00 |
| 4 | Pendapatan Dari Denda Keterlambatan Pekerjaan Kegiatan Fisik | 0,00 | 147.098.691,90 | 0,00 |
| 5 | Pendapatan Dari Pencairan Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik | 0,00 | 1.665.329.600,00 | 0,00 |
| 6 | Dana Kapitasi | 0,00 | 269.835.400,00 | 0,00 |
| 7 | Bea Balik Nama Toko | 0,00 | 0,00 | 11.562.500,00 |
| 8 | Pendapatan Dari Lebih Salur kepada Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 1.294.926,00 |
| 9 | Hasil Penjualan Aset Daerah melalui KPKNL | 0,00 | 0,00 | 27.249.524,00 |
| 10 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kegiatan Non Fisik | 0,00 | 0,00 | 14.825.000,00 |
| 11 | Pendapatan Dari Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi | 0,00 | 1.337.471,00 | 655.802,00 |
| 12 | Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya | 0,00 | 261.876.643,71 | 9.888.902,00 |
| | Jumlah | 0,00 | 8.371.792.532,49 | 2.582.603.249,21 |

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.252.087.482.225,00 | 1.590.277.432.228,00 | 1.050.230.494.367,00 |

Pendapatan Transfer secara keseluruhan periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dianggarkan sebesar Rp1.252.087.482.225,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.590.277.432.228,00 atau mencapai 127,01%. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 meningkat sebesar Rp540.046.937.861,00 atau mencapai 51,42% jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp1.050.230.494.367,00 dengan rician sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 | | Tahun 2021 |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 946.578.546.527,00 | 1.455.670.208.493,00 | 977.176.119.595,00 |
| 2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 305.508.935.698,00 | 134.607.223.735,00 | 73.054.374.772,00 |
| | Jumlah | 1.252.087.482.225,00 | 1.590.277.432.228,00 | 1.050.230.494.367,00 |

Penjelasan masing-masing Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:



5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 946.578.546.527,00 | 1.455.670.208.493,00 | 977.176.119.595,00 |

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.455.670.208.493,00 atau mencapai 153,78% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp946.578.546.527,00. Realisasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 48,97% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp977.176.119.595,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 | | Tahun 2021 |
|----|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Dana Perimbangan | 847.615.623.527,00 | 1.357.000.364.733,00 | 811.326.553.141,00 |
| 2 | Dana Insentif Daerah (DID) | 5.594.207.000,00 | 5.594.207.000,00 | 63.219.134.000,00 |
| 3 | Dana Desa | 93.368.716.000,00 | 93.075.636.760,00 | 102.630.432.454,00 |
| | Jumlah | 946.578.546.527,00 | 1.455.670.208.493,00 | 977.176.119.595,00 |

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 847.615.623.527,00 | 1.357.000.364.733,00 | 811.326.553.141,00 |

Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.357.000.364.733,00 atau mencapai 160,10% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp847.615.623.527,00. Realisasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 67,26% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp811.326.553.141,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 | | Tahun 2021 |
|----|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Dana Bagi Hasil (DBH) | 278.728.814.000,00 | 812.527.669.430,00 | 245.007.552.390,00 |
| 2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 416.699.835.000,00 | 414.513.383.682,00 | 416.699.835.000,00 |
| 3 | Dana Akokasi Khusus (DAK) | 152.186.974.527,00 | 129.959.311.621,00 | 149.619.165.751,00 |
| | Jumlah | 847.615.623.527,00 | 1.357.000.364.733,00 | 811.326.553.141,00 |

5.1.1.2.1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 278.728.814.000,00 | 812.527.669.430,00 | 245.007.552.390,00 |

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2022 sebesar Rp812.527.669.430,00 dari Anggaran DBH Tahun 2022 sebesar Rp278.728.814.000,00 atau mencapai 291,51%. Realisasi DBH pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 231,63% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp245.007.552.390,00. Adapun rician Realisasi DBH terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 34.959.418.583,00 | 70.773.879.299,00 |
| 2 | DBH PPh Pasal 21 | 7.225.320.000,00 | 6.624.717.000,00 |
| 3 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 0,00 | 327.929.000,00 |
| 4 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 0,00 | 624,00 |
| 5 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 363.567.992,00 | 68.554.300,00 |
| 6 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 767.915.114.855,00 | 165.547.842.703,00 |
| 7 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 105.937.000,00 | 307.010.314,00 |
| 8 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.958.311.000,00 | 1.357.619.150,00 |
| | Jumlah | 812.527.669.430,00 | 245.007.552.390,00 |

5.1.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 416.699.835.000,00 | 414.513.383.682,00 | 416.699.835.000,00 |

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp414.513.383.682,00 dari Anggaran DAU Tahun 2022 sebesar Rp416.699.835.000,00 atau mencapai 99,48%. Realisasi DAU pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,52% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp416.699.835.000,00.

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 152.186.974.527,00 | 129.959.311.621,00 | 149.619.165.751,00 |

Realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 129.959.311.621,00 merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2022. Realisasi Tahun 2022 secara keseluruhan mencapai 85,39% dari Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp152.186.974.527,00. Realisasi DAK pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 13,14% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp149.619.165.751,00. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|---|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB | 6.816.304.144,00 | 6.071.385.947,00 | 18.932.462.966,00 |
| 2 | DAK Reguler Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Air minum dan Sanitasi | 12.670.701.000,00 | 12.320.887.993,00 | 12.802.274.865,00 |
| 3 | DAK Bidang Infrastruktur Jalan (DAK Reguler) | 18.413.262.000,00 | 18.204.197.400,00 | 9.258.185.000,00 |
| 4 | DAK Bidang Pendidikan (DAK Reguler) | 11.895.885.968,00 | 11.850.013.700,00 | 25.891.252.690,00 |
| 5 | DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (DAK Reguler) | 4.935.331.000,00 | 3.635.543.250,00 | 6.543.687.000,00 |
| 6 | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Reguler) | 0,00 | 0,00 | 1.092.136.000,00 |
| 7 | DAK Bidang Pertanian (DAK Reguler) | 20.020.714.000,00 | 20.493.087.365,00 | 2.934.457.048,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 8 | DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD | 3.813.000.000,00 | 382.800.000,00 | 3.866.468.000,00 |
| 9 | DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru | 52.732.247.000,00 | 45.186.139.260,00 | 55.302.213.000,00 |
| 10 | DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru | 1.488.000.000,00 | 1.431.999.500,00 | 1.080.938.000,00 |
| 11 | DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru | 807.529.000,00 | 577.919.400,00 | 594.075.145,00 |
| 12 | DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan | 12.235.011.415,00 | 6.362.831.833,00 | 4.497.844.536,00 |
| 13 | DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB | 3.107.752.000,00 | 2.259.544.973,00 | 2.896.853.391,00 |
| 14 | DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal | 374.435.000,00 | 234.481.000,00 | 938.526.110,00 |
| 15 | DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 451.800.000,00 | 451.800.000,00 | 0,00 |
| 16 | DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 385.200.000,00 | 377.880.000,00 | 0,00 |
| 17 | DAK Non Fisik Jaminan Persalinan | 33.002.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan | 2.006.800.000,00 | 118.800.000,00 | 2.652.619.000,00 |
| 19 | DAK Non Fisik Dana Bantuan BLPS | 0,00 | 0,00 | 335.173.000,00 |
| | Jumlah | 152.186.974.527,00 | 129.959.311.621,00 | 149.619.165.751,00 |

5.1.1.2.1.2. Dana Insentif Daerah (DID)

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5.594.207.000,00 | 5.594.207.000,00 | 63.219.134.000,00 |

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022 sebesar Rp5.594.207.000,00 merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2022. Secara keseluruhan realisasi DID tahun 2022 mencapai 100% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp5.594.207.000,00. Realisasi DID pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 91,15% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp63.219.134.000,00.

5.1.1.2.1.3. Dana Desa

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 93.368.716.000,00 | 93.075.636.760,00 | 102.630.432.454,00 |

Realisasi Dana Desa sebesar Rp 93.075.636.760,00 merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat ke Desa selama Tahun 2022. Realisasi Dana Desa tahun 2022 mencapai 99,69% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp93.368.716.000,00. Realisasi Dana Desa pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 9,31% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp102.630.432.454,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 305.508.935.698,00 | 134.607.223.735,00 | 73.054.374.772,00 |

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 134.607.223.735,00 dari Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp305.508.935.698,00 atau mencapai 44,06%. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 84,26% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp73.054.374.772,00. Adapun Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor | 43.384.640.000,00 | 12.931.196.456,00 | 7.911.310.905,18 |
| 2 | Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 30.339.839.000,00 | 13.183.653.170,00 | 6.152.431.363,82 |
| 3 | Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 221.767.635.698,00 | 95.203.932.548,00 | 47.254.861.890,00 |
| 4 | Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan | 88.248.000,00 | 288.510.399,00 | 133.695.728,00 |
| 5 | Bagi Hasil dari Pajak Rokok | 9.928.573.000,00 | 12.999.931.162,00 | 11.602.074.885,00 |
| | Jumlah | 305.508.935.698,00 | 134.607.223.735,00 | 73.054.374.772,00 |

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 471.731.727.311,00 | 34.767.790.436,00 | 30.466.329.121,00 |

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dianggarkan sebesar sebesar Rp471.731.727.311,00 dan terealisasi sebesarRp 34.767.790.436,00 atau mencapai 7,37%. Realisasi Tahun 2022 meningkat sebesar Rp4.301.461.315,00 atau mencapai 14,12% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2021 sebesar Rp30.466.329.121,00 yang terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2022 | | Tahun 2021 |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Pendapatan Hibah | 442.498.664.551,00 | 9.882.398.701,00 | 9.109.587.121,00 |
| 2 | Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 29.233.062.760,00 | 24.885.391.735,00 | 21.356.742.000,00 |
| | Jumlah | 471.731.727.311,00 | 34.767.790.436,00 | 30.466.329.121,00 |

Penjelasan masing-masing jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 442.498.664.551,00 | 9.882.398.701,00 | 9.109.587.121,00 |

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2022 sebesar Rp 9.882.398.701,00 dari Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp442.498.664.551,00 atau mencapai 2,23%. Realisasi Pendapatan Hibah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,48% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp.109.587.121,00. Adapun rincian pendapatan hibah sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 2.624.725.300,00 | 9.882.398.701,00 | 9.109.587.121,00 |
| 2 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri | 439.873.939.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 442.498.664.551,00 | 9.882.398.701,00 | 9.109.587.121,00 |

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2022 sebesar Rp9.882.398.701,00 seluruhnya merupakan Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) selama Tahun 2022. IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan Kabupaten.

5.1.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 29.233.062.760,00 | 24.885.391.735,00 | 21.356.742.000,00 |

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 sebesar Rp24.885.391.735,00 merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN selama Tahun 2022. Realisasi Tahun 2022 tercapai sebesar 85,13% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp29.233.062.760,00. Realisasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 16,52% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp21.356.742.000,00. Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2022 terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah Dana Bos | 22.153.000.000,00 | 18.851.610.265,00 | 21.356.742.000,00 |
| 2 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 7.080.062.760,00 | 6.033.781.470,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 29.233.062.760,00 | 24.885.391.735,00 | 21.356.742.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Pada Tahun 2021 Pendapatan Dana Kapitasi JKN disajikan pada Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berdasarkan Permendagri No.28 Tahun 2021 Dana Kapitasi JKN disajikan pada Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA Tahun 2022 masing-masing puskesmas adalah sebagai berikut:

| No | Nama Puskesmas | Realisasi 2022 (Rp) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Puskesmas Tapin Utara | 954.884.250,00 |
| 2 | Puskesmas Binuang | 917.326.000,00 |
| 3 | Puskesmas Hatungun | 264.324.500,00 |
| 4 | Puskesmas Tambarangan | 608.202.150,00 |
| 5 | Puskesmas Salam Babaris | 246.187.680,00 |
| 6 | Puskesmas Banua Padang | 366.194.319,00 |
| 7 | Puskesmas Bakarangan | 523.208.289,00 |
| 8 | Puskesmas Pandahan | 273.143.500,00 |
| 9 | Puskesmas Tambaruntung | 503.567.100,00 |
| 10 | Puskesmas Baringin | 572.846.556,00 |
| 11 | Puskesmas Margasari | 228.986.110,00 |
| 12 | Puskesmas Lokpaikat | 353.695.343,00 |
| 13 | Puskesmas Piani | 221.215.673,00 |
| Jumlah | | 6.033.781.470,00 |

5.1.2. Belanja Daerah

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.962.913.967.655,00 | 1.645.505.852.093,50 | 1.506.125.212.042,00 |

Struktur Belanja sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dianggarkan sebesar Rp1.962.913.967.655,00 dan terealisasi sebesar sebesar Rp 1.645.505.852.093,50 atau mencapai 83,83%. Realisasi Belanja Daerah tahun 2022 meningkat sebesar Rp139.380.640.051,50 atau mencapai 9,25% jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp1.506.125.212.042,00 yang terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2022 | | Tahun 2021 |
|---------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Belanja Operasi | 1.140.729.826.352,00 | 983.129.650.879,00 | 873.848.686.477,00 |
| 2 | Belanja Modal | 638.480.013.903,00 | 483.199.477.506,00 | 442.233.855.608,00 |
| 3 | Belanja Tak Terduga | 18.000.000.000,00 | 14.038.372.812,00 | 14.008.130.387,00 |
| 4 | Belanja Transfer | 165.704.127.400,00 | 165.138.350.896,50 | 176.034.539.570,00 |
| Jumlah | | 1.962.913.967.655,00 | 1.645.505.852.093,50 | 1.506.125.212.042,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.1.2.1. Belanja Operasi

| Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1.140.729.826.352,00 | 983.129.650.879,00 | 873.848.686.477,00 |

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp983.129.650.879,00 atau mencapai 86,18% dari anggaran sebesar Rp1.140.729.826.352,00. Realisasi Belanja Operasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp109.280.964.402,00 atau mencapai 12,51% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp873.848.686.477,00. Adapun rincian belanja operasi sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 | | Tahun 2021 |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Belanja Pegawai | 508.362.628.890,00 | 448.969.728.637,00 | 422.170.852.450,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 552.159.650.702,00 | 460.650.110.998,00 | 381.394.334.514,00 |
| 3 | Belanja Bunga | 7.782.683.508,00 | 7.578.695.680,00 | 1.948.221.349,00 |
| 4 | Belanja Hibah | 62.454.125.524,00 | 56.698.494.864,00 | 63.673.128.164,00 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 9.970.737.728,00 | 9.232.620.700,00 | 4.662.150.000,00 |
| Jumlah | | 1.140.729.826.352,00 | 983.129.650.879,00 | 873.848.686.477,00 |

Penjelasan untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

| Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 508.362.628.890,00 | 448.969.728.637,00 | 422.170.852.450,00 |

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 448.969.728.637,00 dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp508.362.628.890,00 atau mencapai 88,32%. Realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,35% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp422.170.852.450,00. Adapun rincian belanja pegawai merupakan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan pengeluaran lainnya terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Belanja Gaji Pokok ASN | 208.387.150.095,00 | 185.156.764.383,00 | 185.277.847.805,00 |
| 2 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 19.189.720.498,00 | 15.325.847.953,00 | 15.366.334.256,00 |
| 3 | Belanja Tunjangan Jabatan | 8.585.736.564,00 | 7.077.402.777,00 | 7.161.135.000,00 |
| 4 | Belanja Tunjangan Fungsional | 16.307.077.700,00 | 13.380.920.100,00 | 13.210.898.370,00 |
| 5 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum | 2.718.336.918,00 | 1.751.926.604,00 | 1.812.230.000,00 |
| 6 | Belanja Tunjangan Beras | 12.139.025.417,00 | 9.696.281.540,00 | 9.817.617.300,00 |
| 7 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 975.791.465,00 | 638.618.200,00 | 655.651.716,00 |
| 8 | Belanja Pembulatan Gaji | 49.948.607,00 | 2.664.804,00 | 2.662.547,00 |
| 9 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan | 16.755.593.412,00 | 16.755.593.412,00 | 12.771.047.349,00 |
| 10 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM) | 1.752.000.000,00 | 1.511.652.243,00 | 1.512.199.772,00 |
| 11 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 145.186.009.752,00 | 128.963.488.640,00 | 101.926.090.145,00 |
| 12 | Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 668.362.725,00 | 653.971.055,00 | 671.809.798,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 13 | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 189.105.455,00 | 102.683.070,00 | 53.921.732,00 |
| 14 | Belanja Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNSD | 52.732.247.000,00 | 48.954.381.400,00 | 54.438.428.760,00 |
| 15 | Belanja Tunjangan Khusus Guru PNSD | 807.529.000,00 | 574.531.800,00 | 604.690.800,00 |
| 16 | Belanja Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD | 1.488.000.000,00 | 1.303.750.000,00 | 1.137.250.000,00 |
| 17 | Belanja Honorarium | 2.903.122.500,00 | 2.396.090.000,00 | 1.788.232.000,00 |
| 18 | Belanja Uang Representasi DPRD | 567.700.000,00 | 563.115.000,00 | 556.395.000,00 |
| 19 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 79.909.200,00 | 54.734.400,00 | 53.283.300,00 |
| 20 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 101.388.000,00 | 64.598.640,00 | 62.729.100,00 |
| 21 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 814.233.000,00 | 814.233.000,00 | 806.772.750,00 |
| 22 | Belanja Uang Paket DPRD | 48.132.000,00 | 47.029.500,00 | 46.998.000,00 |
| 23 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 80.022.600,00 | 68.466.825,00 | 63.366.450,00 |
| 24 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 329.357.700,00 | 20.964.825,00 | 23.050.650,00 |
| 25 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 787.500.000,00 | 787.500.000,00 | 787.500.000,00 |
| 26 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 72.000.000,00 | 270.396,00 | 270.396,00 |
| 27 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 5.090.064.700,00 | 4.392.175.000,00 | 3.835.070.000,00 |
| 28 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 4.092.000.000,00 | 3.312.500.000,00 | 3.312.500.000,00 |
| 29 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 262.710.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 30 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 3.878.640.000,00 | 3.353.750.000,00 | 3.310.400.000,00 |
| 31 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 54.600.000,00 | 54.600.000,00 | 54.600.000,00 |
| 32 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 6.606.600,00 | 5.460.000,00 | 5.640.000,00 |
| 33 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 98.280.000,00 | 98.280.000,00 | 98.280.000,00 |
| 34 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 5.013.636,00 | 3.476.160,00 | 4.417.620,00 |
| 35 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 3.040.970,00 | 1.714.000,00 | 1.633.484,00 |
| 36 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 1.000.000,00 | 1.440,00 | 1.740,00 |
| 37 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | 292.118.208,00 | 276.671.875,00 | 271.793.750,00 |
| 39 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah | 63.035.168,00 | 34.559.595,00 | 18.112.860,00 |
| 40 | Belanja Dana Operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 400.000.000,00 | 398.530.000,00 | 399.870.000,00 |
| 41 | Belanja Pegawai BLUD | 394.520.000,00 | 370.530.000,00 | 248.020.000,00 |
| | Jumlah | 508.362.628.890,00 | 448.969.728.637,00 | 422.170.852.450,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 552.159.650.702,00 | 460.650.110.998,00 | 381.394.334.514,00 |

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 460.650.110.998,00 atau mencapai 83,43% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp552.159.650.702,00. Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 20,78% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp381.394.334.514,00.

Adapun rincian belanja barang dan jasa merupakan belanja uang/jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, belanja barang dan jasa BOS, belanja barang dan jasa BLUD untuk menunjang kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapin yang terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Barang | 113.043.685.667,00 | 91.285.365.700,00 | 106.939.237.897,00 |
| 2 | Belanja Jasa | 208.612.237.255,00 | 176.190.734.250,00 | 145.339.065.986,00 |
| 3 | Belanja Pemeliharaan | 56.839.594.274,00 | 51.058.011.352,00 | 13.191.933.795,00 |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas | 84.335.777.291,00 | 60.476.937.582,00 | 41.075.076.436,00 |
| 5 | Belanja Uang/Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat | 19.788.554.300,00 | 17.537.246.558,00 | 15.742.217.665,00 |
| 6 | Belanja Barang dan Jasa Bos | 11.076.500.000,00 | 15.140.082.563,00 | 15.189.655.188,00 |
| 7 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 58.463.301.915,00 | 48.961.732.993,00 | 43.917.147.547,00 |
| | Jumlah | 552.159.650.702,00 | 460.650.110.998,00 | 381.394.334.514,00 |

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebagai berikut:

a) Belanja Barang

| No. | Belanja Barang | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 6.259.348.453,00 | 4.350.240.850,00 | 27.040.975.067,00 |
| 2 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 437.310.454,00 | 393.544.964,00 | 2.192.687.400,00 |
| 3 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 15.628.791.008,00 | 15.074.655.319,00 | 7.799.898.277,00 |
| 4 | Belanja Bahan-Bahan Baku | 2.696.346.400,00 | 2.094.006.700,00 | 110.111.250,00 |
| 5 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 3.096.855.800,00 | 2.289.030.532,00 | 1.751.904.700,00 |
| 6 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 2.400.000,00 |
| 7 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 10.506.600,00 | 8.955.000,00 | 8.475.000,00 |
| 8 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 188.857.850,00 | 182.260.000,00 | 215.322.566,00 |
| 9 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 2.733.092.588,00 | 2.550.816.297,00 | 3.218.033.977,00 |
| 10 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 1.477.297.300,00 | 960.256.625,00 | 892.502.394,00 |
| 11 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 2.566.000,00 | 1.000.000,00 | 14.070.000,00 |
| 12 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 25.541.800,00 | 24.437.000,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Belanja Barang | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 829.980.900,00 | 607.136.595,00 | 56.576.300,00 |
| 14 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 8.096.402.938,00 | 4.265.882.447,00 | 3.526.116.938,00 |
| 15 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.110.898.000,00 | 1.958.332.179,00 | 1.298.512.110,00 |
| 16 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8.216.639.355,00 | 6.384.619.845,00 | 6.741.018.625,00 |
| 17 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 672.714.800,00 | 520.003.800,00 | 335.386.400,00 |
| 18 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 755.300,00 | 0,00 | 2.925.000,00 |
| 19 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 34.567.400,00 | 32.156.800,00 | 68.622.500,00 |
| 20 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2.090.078.900,00 | 1.621.639.653,00 | 1.105.463.350,00 |
| 21 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas | 9.420.000,00 | 7.700.000,00 | 18.186.500,00 |
| 22 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 402.668.100,00 | 327.164.278,00 | 190.849.000,00 |
| 23 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1.873.622.000,00 | 1.387.716.096,00 | 3.729.047.509,00 |
| 24 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 4.519.625.932,00 | 3.657.997.149,00 | 3.865.152.642,00 |
| 25 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 890.072.944,00 | 614.330.236,00 | 5.339.835.482,00 |
| 26 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 6.244.908.900,00 | 5.539.388.132,00 | 2.342.280.100,00 |
| 27 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 0,00 | 0,00 | 721.007.000,00 |
| 28 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 133.594.745,00 | 118.115.000,00 | 127.816.350,00 |
| 29 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 240.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 |
| 30 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14.228.952.000,00 | 10.074.206.253,00 | 8.196.175.619,00 |
| 31 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 5.126.380.000,00 | 4.773.397.617,00 | 3.435.330.081,00 |
| 32 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 150.056.000,00 | 102.947.967,00 | 11.315.000,00 |
| 33 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 34 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 523.435.000,00 | 482.467.000,00 | 382.840.200,00 |
| 35 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | 0,00 | 0,00 | 12.155.000,00 |
| 36 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 14.793.877.500,00 | 12.567.798.650,00 | 14.206.319.715,00 |
| 37 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 1.254.685.200,00 | 1.075.505.000,00 | 10.700.000,00 |
| 38 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 147.500.000,00 | 116.550.000,00 | 252.400.000,00 |
| 39 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 355.080.700,00 | 316.722.750,00 | 852.454.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Belanja Barang | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 40 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 2.025.047.900,00 | 1.868.870.500,00 | 1.618.355.600,00 |
| 41 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 1.263.545.000,00 | 1.106.365.742,00 | 1.431.840.745,00 |
| 42 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 61.500.000,00 | 59.662.500,00 | 183.925.000,00 |
| 43 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 9.302.700,00 | 9.275.000,00 | 4.495.000,00 |
| 44 | Belanja Pakaian Penyelamatan | 0,00 | 0,00 | 198.075.000,00 |
| 45 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | 725.395.700,00 | 493.445.200,00 | 325.818.800,00 |
| 46 | Belanja Pakaian KORPRI | 24.057.000,00 | 23.630.000,00 | 3.375.000,00 |
| 47 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 76.075.000,00 | 67.650.000,00 | 50.060.000,00 |
| 48 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 1.234.615.500,00 | 1.152.139.652,00 | 1.424.994.700,00 |
| 49 | Belanja Pakaian Olahraga | 2.102.600.000,00 | 1.773.746.160,00 | 1.399.582.000,00 |
| 50 | Belanja Pakaian Paskibraka | 250.500.000,00 | 242.770.212,00 | 220.500.000,00 |
| 51 | Belanja Komponen-Komponen Peralatan | 3.576.000,00 | 2.030.000,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 113.043.685.667,00 | 91.285.365.700,00 | 106.939.237.897,00 |

Rincian belanja barang dapat dilihat pada lampiran 1.

b) Belanja Jasa

| No. | Belanja Jasa | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.847.640.000,00 | 4.320.431.621,00 | 3.708.730.000,00 |
| 2 | Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 8.834.150.000,00 | 5.864.535.550,00 | 2.350.669.000,00 |
| 3 | Belanja Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 129.600.000,00 | 46.770.000,00 | 246.600.000,00 |
| 4 | Belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 2.453.510.000,00 | 2.065.590.000,00 | 1.053.990.000,00 |
| 5 | Belanja Honorarium Rohaniwan | 7.350.000,00 | 4.200.000,00 | 136.450.000,00 |
| 6 | Belanja Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 25.800.000,00 | 7.800.000,00 | 31.200.000,00 |
| 7 | Belanja Honorarium Penyelenggaraan Ujian | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 800.000,00 |
| 8 | Belanja Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 8.400.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 |
| 9 | Belanja Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 138.000.000,00 | 92.400.000,00 | 506.400.000,00 |
| 10 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 2.131.080.000,00 | 1.981.687.000,00 | 1.867.500.000,00 |
| 11 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 13.447.705.466,00 | 9.187.570.444,00 | 19.157.543.337,00 |
| 12 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 281.068.000,00 | 229.824.164,00 | 155.427.280,00 |
| 13 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 19.225.192.760,00 | 18.059.036.579,00 | 6.866.330.035,00 |
| 14 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2.630.600.000,00 | 2.574.643.000,00 | 1.480.500.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Belanja Jasa | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 15 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 207.000.000,00 | 206.625.000,00 | 0,00 |
| 16 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana | 490.050.000,00 | 404.300.000,00 | 313.000.000,00 |
| 17 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 642.570.000,00 | 602.695.000,00 | 566.425.000,00 |
| 18 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan | 882.701.000,00 | 872.395.600,00 | 264.000.000,00 |
| 19 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan | 2.601.400.000,00 | 2.498.700.000,00 | 1.719.675.000,00 |
| 20 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 297.600.000,00 | 256.050.000,00 | 184.100.000,00 |
| 21 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 11.956.356.540,00 | 10.879.514.676,00 | 8.520.057.100,00 |
| 22 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 2.160.791.000,00 | 2.143.991.000,00 | 1.356.582.000,00 |
| 23 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 5.692.077.800,00 | 5.328.990.511,00 | 3.936.595.200,00 |
| 24 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 3.963.509.900,00 | 2.917.797.809,00 | 2.284.524.850,00 |
| 25 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 10.387.272.300,00 | 9.860.694.400,00 | 10.156.535.400,00 |
| 26 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 3.473.767.700,00 | 3.354.771.900,00 | 15.120.290.000,00 |
| 27 | Belanja Jasa Tenaga Caraka | 25.500.000,00 | 21.600.000,00 | 1.227.200,00 |
| 28 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 834.984.000,00 | 675.528.000,00 | 517.600.000,00 |
| 29 | Belanja Jasa Tenaga Juru Masak | 266.600.000,00 | 259.200.000,00 | 169.200.000,00 |
| 30 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 583.325.800,00 | 351.886.793,00 | 258.810.498,00 |
| 31 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 201.600.000,00 | 145.500.000,00 | 82.650.000,00 |
| 32 | Belanja Jasa Tata Rias | 379.050.000,00 | 359.450.000,00 | 207.225.000,00 |
| 33 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 1.398.175.000,00 | 1.195.970.263,00 | 190.000.000,00 |
| 34 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 228.558.000,00 | 166.538.000,00 | 46.425.000,00 |
| 35 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 37 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 871.192.000,00 | 427.892.292,00 | 755.862.650,00 |
| 38 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 1.781.550.000,00 | 1.558.850.000,00 | 283.550.000,00 |
| 39 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | 1.853.850.000,00 | 1.383.425.000,00 | 640.900.000,00 |
| 40 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 63.378.000,00 | 58.451.000,00 | 0,00 |
| 41 | Belanja Jasa Kalibrasi | 21.807.500,00 | 21.352.500,00 | 11.907.500,00 |
| 42 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 39.000.000,00 | 38.850.000,00 | 0,00 |
| 43 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 171.875.000,00 | 166.855.000,00 | 55.880.000,00 |
| 44 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | 44.330.000,00 | 0 | 103.629.900,00 |
| 45 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 4.091.971.700,00 | 3.911.870.921,00 | 3.491.367.334,00 |
| 46 | Belanja Tagihan Telepon | 1.087.000.000,00 | 547.919.106,00 | 685.958.145,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Belanja Jasa | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 47 | Belanja Tagihan Air | 966.111.650,00 | 741.043.396,00 | 395.504.097,00 |
| 48 | Belanja Tagihan Listrik | 8.619.649.300,00 | 7.436.370.868,00 | 6.667.179.849,00 |
| 49 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 324.784.000,00 | 308.944.000,00 | 365.087.000,00 |
| 50 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 2.104.836.600,00 | 1.513.217.595,00 | 1.037.185.150,00 |
| 51 | Belanja Paket/Pengiriman | 13.565.000,00 | 0 | 23.570.850,00 |
| 52 | Belanja Penambahan Daya | 5.000.000,00 | 0 | 12.673.400,00 |
| 53 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1.042.533.216,00 | 346.892.574,00 | 415.925.974,00 |
| 54 | Belanja Pengolahan Air Limbah | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| 55 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.619.221.256,00 | 1.561.966.176,00 | 1.647.043.164,00 |
| 56 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 15.813.000.000,00 | 15.247.899.500,00 | 9.930.511.500,00 |
| 57 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 1.896.686.400,00 | 1.498.131.600,00 | 1.043.182.000,00 |
| 58 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 27.623.040,00 | 12.904.748,00 | 9.322.937,00 |
| 59 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN | 116.109.760,00 | 103.824.720,00 | 0,00 |
| 60 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 114.712.200,00 | 110.073.600,00 | 0,00 |
| 61 | Belanja Sewa Lapangan Lainnya | 275.950.000,00 | 211.050.000,00 | 0,00 |
| 62 | Belanja Sewa Grader | 2.444.891.191,00 | 2.444.891.191,00 | 1.619.882.800,00 |
| 63 | Belanja Sewa Excavator | 9.804.020.716,00 | 9.803.988.716,00 | 3.857.873.000,00 |
| 64 | Belanja Sewa Asphalt Equipment | 564.115.000,00 | 564.115.000,00 | 0,00 |
| 65 | Belanja Sewa Compacting Equipment | 5.370.389.220,00 | 5.370.389.219,00 | 1.655.524.000,00 |
| 66 | Belanja Sewa Loader | 253.170.000,00 | 253.170.000,00 | 0,00 |
| 67 | Belanja Sewa Electric Generating Set | 45.000.000,00 | 17.500.000,00 | 31.475.000,00 |
| 68 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 175.450.000,00 | 88.610.000,00 | 0,00 |
| 69 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 70 | Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 39.228.000,00 | 38.887.000,00 | 6.000.000,00 |
| 71 | Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 72 | Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 73 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1.698.434.000,00 | 1.397.836.080,00 | 873.535.334,00 |
| 74 | Belanja Sewa Alat Pendingin | 141.625.000,00 | 37.650.000,00 | 51.164.400,00 |
| 75 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 746.679.400,00 | 642.577.189,00 | 278.994.543,00 |
| 76 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 137.400.000,00 | 125.136.600,00 | 75.350.000,00 |
| 77 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya | 8.400.000,00 | 0 | 3.000.000,00 |
| 78 | Belanja Sewa Peralatan Umum | 121.300.000,00 | 86.850.000,00 | 130.200.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Belanja Jasa | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 79 | Belanja Sewa Komputer Jaringan | 92.502.000,00 | 75.583.244,00 | 0,00 |
| 80 | Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya | 150.000.000,00 | 0 | 800.000,00 |
| 81 | Belanja Sewa Peralatan Jaringan | 199.200.000,00 | 192.000.000,00 | 232.800.000,00 |
| 82 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 184.724.800,00 | 113.125.000,00 | 24.400.000,00 |
| 83 | Belanja Sewa Bangunan Gudang | 24.194.000,00 | 24.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 84 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 788.113.400,00 | 393.062.200,00 | 280.214.200,00 |
| 85 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 |
| 86 | Belanja Sewa Bangunan Terbuka | 722.700.000,00 | 580.811.500,00 | 45.500.000,00 |
| 87 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 183.500.000,00 | 82.488.700,00 | 4.552.400,00 |
| 88 | Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 89 | Belanja Sewa Hotel | 307.924.300,00 | 198.692.800,00 | 22.422.822,00 |
| 90 | Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 |
| 91 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 109.750.000,00 | 79.250.000,00 | 33.000.000,00 |
| 92 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural | 0,00 | 0,00 | 2.224.600,00 |
| 93 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 620.000.000,00 | 464.065.785,00 | 75.408.250,00 |
| 94 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung | 0,00 | 0,00 | 4.290.000,00 |
| 95 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior | 12.000.000,00 | 10.810.811,00 | 540.125.600,00 |
| 96 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 1.996.185.000,00 | 1.572.353.060,00 | 515.185.000,00 |
| 97 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik | 900.000.000,00 | 0,00 | 167.567.000,00 |
| 98 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 2.845.400.000,00 | 2.629.348.259,00 | 2.620.639.650,00 |
| 99 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 3.563.750.000,00 | 3.402.940.106,00 | 1.226.022.600,00 |
| 100 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 4.783.377.800,00 | 2.917.694.250,00 | 2.944.419.000,00 |
| 101 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Kontruksi | 90.000.000,00 | 40.344.144,00 | 0,00 |
| 102 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya | 1.392.933.928,00 | 1.223.088.046,00 | 947.589.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Belanja Jasa | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 103 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah | 755.000.000,00 | 691.113.000,00 | 572.006.000,00 |
| 104 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang | 100.000.000,00 | 99.178.000,00 | 83.215.000,00 |
| 105 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 970.130.000,00 | 863.142.066,00 | 384.887.148,00 |
| 106 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 2.682.100.000,00 | 2.508.451.067,00 | 2.878.075.539,00 |
| 107 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | 4.219.652.348,00 | 2.854.765.100,00 | 2.571.241.700,00 |
| 108 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 3.502.263.003,00 | 3.255.860.690,00 | 1.367.303.150,00 |
| 109 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri | 1.015.000.000,00 | 701.814.090,00 | 543.369.000,00 |
| 110 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang | 70.000.000,00 | 69.541.500,00 | 198.440.000,00 |
| 111 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan | 1.857.000.000,00 | 1.736.842.200,00 | 676.316.700,00 |
| 112 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan | 600.000.000,00 | 97.008.000,00 | 634.216.000,00 |
| 113 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan | 1.350.000.000,00 | 1.347.723.000,00 | 2.407.614.000,00 |
| 114 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika | 101.250.000,00 | 49.145.000,00 | 39.754.000,00 |
| 115 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei | 650.150.000,00 | 109.310.000,00 | 672.836.900,00 |
| 116 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 542.525.000,00 | 340.552.800,00 | 180.785.000,00 |
| 117 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta | 0,00 | 0,00 | 336.490.000,00 |
| 118 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian | 0,00 | 0,00 | 9.018.000,00 |
| 119 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 120 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 992.600.000,00 | 621.354.844,00 | 1.572.876.000,00 |
| 121 | Belanja Sosialisasi | 140.000.000,00 | 22.050.000,00 | 0,00 |
| 122 | Belanja Bimbingan Teknis | 2.023.000.000,00 | 1.146.370.087,00 | 380.044.000,00 |
| 123 | Belanja Diklat Kepemimpinan | 322.272.000,00 | 322.232.000,00 | 235.627.000,00 |
| 124 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 1.175.850,00 | 745.399,00 | 562.717,00 |
| 125 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 25.778.250,00 | 21.158.618,00 | 15.487.540,00 |
| 126 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan | 180.900,00 | 148.838,00 | 35.882,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Belanja Jasa | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 127 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 4.522.500,00 | 3.780.300,00 | 3.402.935,00 |
| 128 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 109.495.000,00 | 76.843.898,00 | 74.261.357,00 |
| 129 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 361.800,00 | 302.426,00 | 329.464,00 |
| 130 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 135.675,00 | 103.682,00 | 55.697,00 |
| 131 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet | 452.250,00 | 91.338,00 | 0,00 |
| 132 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 28.039.500,00 | 24.799.666,00 | 28.848.199,00 |
| 133 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 17.185.500,00 | 12.614.239,00 | 10.341.877,00 |
| 134 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 42.335.100,00 | 27.865.885,00 | 10.245.785,00 |
| 135 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 4.552.936,00 | 995.711,00 | 416.847,00 |
| JUMLAH | | 208.612.237.255,00 | 176.190.734.250,00 | 145.339.065.986,00 |

c) Belanja Pemeliharaan

| No. | Belanja Pemeliharaan | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya | 50.000.000,00 | 2.147.000,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman | 9.600.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 3 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya | 186.000.000,00 | 185.700.000,00 | 0,00 |
| 4 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 0,00 | 0,00 | 23.640.000,00 |
| 5 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set | 21.500.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| 6 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 1.413.681.800,00 | 786.908.612,00 | 1.059.069.574,00 |
| 7 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 61.800.000,00 | 39.360.656,00 | 23.595.500,00 |
| 8 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 42.700.000,00 | 1.290.000,00 | 0,00 |
| 9 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 4.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 10 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Belanja Pemeliharaan | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 13 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak | 8.657.000,00 | 8.657.000,00 | 25.200.000,00 |
| 14 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya | 53.500.000,00 | 9.000.000,00 | 12.142.000,00 |
| 15 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 2.000.000,00 | 447.770,00 | 0,00 |
| 16 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 667.760.290,00 | 562.400.188,00 | 377.764.790,00 |
| 17 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 0,00 | 0,00 | 23.428.900,00 |
| 18 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 88.325.000,00 | 69.552.000,00 | 92.995.000,00 |
| 19 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 20 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 21.340.000,00 |
| 21 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film | 60.500.000,00 | 32.109.000,00 | 7.000.000,00 |
| 22 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi | 7.940.200,00 | 7.900.000,00 | 0,00 |
| 23 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya | 0,00 | 0,00 | 44.550.000,00 |
| 24 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum | 12.000.000,00 | 11.988.000,00 | 20.248.400,00 |
| 25 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 306.640.000,00 | 200.970.100,00 | 101.051.000,00 |
| 26 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 123.119.900,00 | 96.579.896,00 | 75.088.000,00 |
| 27 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Peralatan Personal Computer | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 114.770.000,00 | 65.028.900,00 | 100.567.520,00 |
| 29 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 |
| 30 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 8.485.049.084,00 | 8.233.652.310,00 | 3.288.123.040,00 |
| 31 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar | 0,00 | 0,00 | 30.280.000,00 |
| 32 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 63.936.000,00 | 63.906.000,00 | 29.975.000,00 |
| 33 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 189.811.000,00 |
| 34 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 0,00 | 0,00 | 12.980.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Belanja Pemeliharaan | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 35 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam | 1.101.764.000,00 | 1.081.531.754,00 | 14.511.500,00 |
| 36 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 210.000.000,00 | 35.985.000,00 | 156.928.000,00 |
| 37 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I | 0,00 | 0,00 | 49.962.000,00 |
| 38 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III | 494.051.000,00 | 492.485.650,00 | 0,00 |
| 39 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 208.200.000,00 | 207.280.000,00 | 49.680.000,00 |
| 40 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 31.184.560,00 |
| 41 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya | 1.400.000.000,00 | 1.246.462.400,00 | 110.067.000,00 |
| 42 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 250.000.000,00 | 153.957.800,00 | 150.497.000,00 |
| 43 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai | 41.325.000.000,00 | 37.419.291.316,00 | 7.020.378.000,00 |
| 44 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya | 0,00 | 0,00 | 14.408.761,00 |
| 45 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| 46 | Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik | 9.600.000,00 | 8.720.000,00 | 9.600.000,00 |
| 47 | Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Piaraan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 3.363.250,00 |
| JUMLAH | | 56.839.594.274,00 | 51.058.011.352,00 | 13.191.933.795,00 |

d) Belanja Perjalanan Dinas

| No. | Belanja Perjalanan Dinas | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 73.326.067.191,00 | 54.273.121.172,00 | 34.387.492.991,00 |
| 2 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap | 0,00 | 0,00 | 5.250.000,00 |
| 3 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11.009.710.100,00 | 6.203.816.410,00 | 5.772.977.163,00 |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 0,00 | 0,00 | 108.120.000,00 |
| 5 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 0,00 | 0,00 | 801.236.282,00 |
| JUMLAH | | 84.335.777.291,00 | 60.476.937.582,00 | 41.075.076.436,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

e) Belanja Uang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

| No. | Belanja uang/jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 835.945.300,00 | 609.222.828,00 | 430.100.000,00 |
| 2 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | 77.000.000,00 | 69.000.000,00 | 620.000.000,00 |
| 3 | Belanja Beasiswa | 340.000.000,00 | 0,00 | 294.520.000,00 |
| 4 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan | 994.800.000,00 | 994.800.000,00 | 459.000.000,00 |
| 5 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) | 1.225.000.000,00 | 1.225.000.000,00 | 570.000.000,00 |
| 6 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 194.150.000,00 | 109.850.000,00 | 67.850.000,00 |
| 7 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 16.121.659.000,00 | 14.529.373.730,00 | 13.300.747.665,00 |
| JUMLAH | | 19.788.554.300,00 | 17.537.246.558,00 | 15.742.217.665,00 |

f) Belanja Barang dan Jasa BOS

| No. | Belanja Barang dan Jasa Bos | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 11.076.500.000,00 | 15.140.082.563,00 | 15.189.655.188,00 |
| JUMLAH | | 11.076.500.000,00 | 15.140.082.563,00 | 15.189.655.188,00 |

g) Belanja Barang dan Jasa BLUD

| No. | Belanja Barang dan Jasa BLUD | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 58.463.301.915,00 | 48.961.732.993,00 | 43.917.147.547,00 |
| JUMLAH | | 58.463.301.915,00 | 48.961.732.993,00 | 43.917.147.547,00 |

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7.782.683.508,00 | 7.578.695.680,00 | 1.948.221.349,00 |

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp7.578.695.680,00 atau mencapai 97,38% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp7.782.683.508,00. Realisasi belanja bunga tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 289,01% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.948.221.349,00. Realisasi belanja bunga 2022 merupakan realisasi atas pembayaran biaya fasilitasi pinjaman pembiayaan kepada PT. SMI atas pembiayaan pinjaman Pemerintah Kabupaten Tapin



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

dalam rangka pembangunan RSUD Baru Kabupaten Tapin. Adapun jumlah fasilitas menyesuaikan dengan akta pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp148.657.565.500,00.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 62.454.125.524,00 | 56.698.494.864,00 | 63.673.128.164,00 |

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp 56.698.494.864,00 atau mencapai 90,78% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp62.454.125.524,00. Realisasi belanja hibah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 10,95% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp63.673.128.164,00. Realisasi belanja hibah merupakan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Pemerintah Pusat, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 2.895.000.000,00 | 2.437.048.100,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.092.770.000,00 | 1.092.770.000,00 | 1.092.770.000,00 |
| 3 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 58.466.355.524,00 | 53.168.676.764,00 | 62.580.358.164,00 |
| Jumlah | | 62.454.125.524,00 | 56.698.494.864,00 | 63.673.128.164,00 |

Realisasi belanja hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.437.048.100,00 adalah realisasi belanja hibah Kepada Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|---------------|--|-------------------------|
| 1 | Pembangunan Rumdin Kejaksaan Negeri Tapin | 1.096.938.000,00 |
| 2 | Pembangunan Rumdin BPN Tapin | 753.423.000,00 |
| 3 | Pembangunan Kantor KORAMIL Candi Laras Utara | 89.315.100,00 |
| 4 | Sarana dan Prasarana Kantor Polsek Candi Laras Utara | 497.372.000,00 |
| Jumlah | | 2.437.048.100,00 |

Realisasi belanja hibah kepada partai politik sebesar Rp1.092.770.000,00 adalah realisasi belanja hibah kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Penerima | Tanggal | Nomor SP2D | Jumlah |
|----|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 1 | Partai PDI Perjuangan | 19-07-2022 | 2412/SP2D/2022 | 97.990.000,00 |
| 2 | Partai Golkar | 19-07-2022 | 2416/SP2D/2021 | 375.630.000,00 |
| 3 | Partai PKS | 20-07-2022 | 2429/SP2D/2021 | 87.880.000,00 |
| 4 | Partai Persatuan Pembangunan (P3) | 19-07-2022 | 2409/SP2D/2021 | 57.920.000,00 |
| 5 | Partai Demokrat | 19-07-2022 | 2411/SP2D/2021 | 97.540.000,00 |
| 6 | Partai Berkarya | 19-07-2022 | 2415SP2D/2021 | 39.780.000,00 |
| 7 | Partai Nasdem | 19-07-2022 | 2414/SP2D/2021 | 87.660.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Nama Penerima | Tanggal | Nomor SP2D | Jumlah |
|----|---------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
| 8 | Partai Gerindra | 19-07-2022 | 2410/SP2D/2021 | 89.080.000,00 |
| 9 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 29-09-2022 | 3735/SP2D/2021 | 61.310.000,00 |
| 10 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 19-07-2022 | 2413/SP2D/2021 | 97.980.000,00 |
| | Jumlah | | | 1.092.770.000,00 |

Realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Tahun 2022 sebesar Rp 53.168.676.764,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Penerima | Jumlah |
|----|---|-------------------|
| 1 | Dinas Kesehatan | |
| | - Palang Merah Indonesia Tapin | 480.000.000,00 |
| 2 | Dinas Komunikasi dan Informasi | |
| | - LPPL Tapin TV | 456.496.900,00 |
| 3 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | - Pokdarwis Binha Wisata Danau Suato Lama | 99.650.000,00 |
| | - DPC PAPRI Kab. Tapin | 200.000.000,00 |
| 4 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | - Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) | 250.000.000,00 |
| | - Mapolda Kalsel | 1.800.000.000,00 |
| | - PC PWRI Kab. Tapin | 35.000.000,00 |
| 5 | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | - KNPI Kab. Tapin | 550.000.000,00 |
| | - KONI Kab. Tapin | 7.928.265.000,00 |
| | - Gerakan Pramuka Kwartir Cab. Tapin | 450.000.000,00 |
| | - KORMI Kab. Tapin | 2.000.000.000,00 |
| 6 | Dinas Perikanan | |
| | - Kel. Bina Bersama | 59.168.000,00 |
| | - Kel. Papadaan | 32.879.000,00 |
| | - KT. Tunas Muda | 31.551.000,00 |
| | - Desa PKK | 20.007.000,00 |
| | - Kel. Membangun Bersama | |
| | - Kel. Pemuda Kreatif | 189.889.000,00 |
| | - Kel. Barokah | |
| | - Kel. Barakat Cangkal | 35.753.000,00 |
| | - Pembenhian Haruan | 167.177.000,00 |
| | - Pembesaran Haruan | 82.541.000,00 |
| | - Kel. Binuang Jaya Farm | 24.935.000,00 |
| | - KT. Karya Muda | |
| | - KT. Tunas Mandiri | |
| | - KT. Oriza Sativa | |
| | - KT. Siran Remaja | |
| | - KT. Tunas Bangsa | |
| | - Kel. Berkat Membangun Bersama | |
| | - Kel. Melati Jaya Abadi | |
| | - Kel. Mina Taruna | |
| | - Kel. Rangkung Maju Mapan | 49.763.000,00 |
| | - KT. Karya Remaja | |
| | - Pesantren Nurul Hidayah | 49.603.000,00 |
| 7 | Dinas Pertanian | 20.875.529.864,00 |
| 8 | Sekretariat Daerah | |
| | - KEJAKSAAN NEGERI TAPIN | 2.391.085.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Nama Penerima | Jumlah |
|----|---|--------------------------|
| - | LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) | 550.000.000,00 |
| - | BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) | 715.000.000,00 |
| - | PENGELOLA KUBURAN MUSLIMIN DATU THARIB | 300.000.000,00 |
| - | PANITIA PEMBANGUNAN LANGGAR DARUSSALAM DESA PERINTIS RAYA | 1.350.000.000,00 |
| - | PANITIA PEMBANGUNAN LANGGAR H. SUFIAN AL MUHDHAR | 500.000.000,00 |
| - | PANITIA REHAB BANGUNAN LANGGAR AL-KARAMAH KEL.TAMBARANGAN | 1.500.000.000,00 |
| - | YAYASAN SYEKH SALMAN AL-FARISI | 1.350.000.000,00 |
| - | MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN TAPIN | 825.000.000,00 |
| - | PENGURUS PEMBANGUNAN LANGGAR AL MUJAHIDIN DESA WARINGIN | 100.000.000,00 |
| - | PANITIA REHAB MASJID AL-WUSTHA DESA SERAWI | 100.000.000,00 |
| - | PENGELOLA KUBURAN MUSLIMIN NURUL HIDAYAH DULANG | 500.000.000,00 |
| - | PANITIA REHAB LANGGAR DARUL MAGFIRAH BINUANG | 250.000.000,00 |
| - | PENGURUS LANGGAR FATHUR RAHMAN KEL. RAYA BELANTI | 150.000.000,00 |
| - | PENG.PEMBANGUNAN MADRASAH DINIYAH DARUL FALIHIN DS. WARINGIN | 200.000.000,00 |
| - | PANITIA MESJID TAJUL QURA KELURAHAN KUPANG | 120.000.000,00 |
| - | PENGURUS MAJELIS TA'LIM DARUL KHAIRAT DESA LUMBU RAYA | 400.000.000,00 |
| - | PANITIA PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN DARUL MUSTHAFA | 800.000.000,00 |
| - | PANITIA PEMBANGUNAN MAJELIS TA'LIM AR-RAYYAN | 100.000.000,00 |
| - | PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITUSSALIMIN DESA LOKPAIKAT | 200.000.000,00 |
| - | PANITIA LANGGAR HIDAYATUSSALIKIN DESA BAKARANGAN | 100.000.000,00 |
| - | YAYASAN PONDOK PESANTREN MUTHI'UL HUDA DESA HATUNGUN | 150.000.000,00 |
| - | PANITIA LANGGAR NURUL MUBIEN MANDARAHAN | 250.000.000,00 |
| - | PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KABUPATEN TAPIN | 130.000.000,00 |
| - | PENGELOLA KUBURAN MUSLIMIN SURGIRAMA RANTAU | 90.000.000,00 |
| - | PANITIA REHAB MAKAM SYEKH SALMAN AL-FARISI DESA GADUNG | 150.000.000,00 |
| - | PENG. PEMBANGUNAN TK/TPA AL-IKHLAS UNIT 011 DS.GADUNG KERAMAT | 160.000.000,00 |
| - | PANITIA LANGGAR AL JIHAD KELURAHAN RANGDA MALINGKUNG | 95.000.000,00 |
| - | TK/TPA HIDAYATUSH-SHIBYAN UNIT 237 DESA LINUH | 100.000.000,00 |
| - | PANITIA PEMBANGUNAN MASJID NURUL IHSAN DESA LINUH | 100.000.000,00 |
| - | PANITIA LANGGAR DARUT TAQWA DESA SAWAJA | 100.000.000,00 |
| - | PANITIA REHAB LANGGAR SABILAL MUHTADIN DESA BANUA HANYAR | 250.000.000,00 |
| - | PANITIA PEMBANGUNAN MESJID ASY-SYUURA LABUNG | 100.000.000,00 |
| - | PANITIA PEMBANGUNAN LANGGAR AR-RAUDAH KOMPLEK GRIYA AL-MIRA | 100.000.000,00 |
| - | PANITIA PEMBANGUNAN MASJID MANBA'UL HUDA SUNGAI IMPAT | 150.000.000,00 |
| - | PANITIA LANGGAR DARUL HIDAYAH DESA PARIGI KACIL | 50.000.000,00 |
| - | PENGELOLA KUBURAN MUSLIMIN 40 DESA LAWAHAN | 350.000.000,00 |
| - | PANITIA LANGGAR AR RAHMAN DESA BANUA HALAT KANAN | 200.000.000,00 |
| - | PANITIA LANGGAR SIRAJUL MUNIR DESA TATAKAN | 80.000.000,00 |
| - | PANITIA REHAB MASJID DARUSSALAM DESA KAMBANG HABANG LAMA | 100.000.000,00 |
| - | PANITIA REHAB MASJID AL-IKHLAS DESA SUATO LAMA | 200.000.000,00 |
| - | DEWAN PENGURUS DAERAH BKPRMI KABUPATEN TAPIN | 100.000.000,00 |
| - | PENGURUS MAJELIS MAULIDURRASUL AL-MUHSININ DESA TANGKAWANG | 25.000.000,00 |
| - | PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL-AMANAH KEL. BITAHAN | 1.000.000.000,00 |
| - | PANITIA REHAB LANGGAR DARUL MAGFIRAH BINUANG | 450.000.000,00 |
| - | PANITIA LANGGAR AL-IHYA MANDARAHAN | 100.000.000,00 |
| - | PENGURUS MAJELIS MAULIDURRASUL AL-HUSIEN DESA WARINGIN | 46.245.000,00 |
| | Jumlah | 53.168.676.764,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 9.970.737.728,00 | 9.232.620.700,00 | 4.662.150.000,00 |

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.232.620.700,00 atau mencapai 92,60% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp9.970.737.728,00. Realisasi bantuan sosial tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 98,03% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.662.150.000,00. Adapun rincian belanja bantuan sosial tahun 2022 terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 4.959.498.100,00 | 4.279.598.100,00 | 2.048.750.000,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 2.298.000.000,00 | 2.240.700.000,00 | 0,00 |
| 3 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 56.039.628,00 | 55.122.600,00 | 0,00 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan | 2.657.200.000,00 | 2.657.200.000,00 | 2.613.400.000,00 |
| Jumlah | | 9.970.737.728,00 | 9.232.620.700,00 | 4.662.150.000,00 |

Realisasi belanja bantuan sosial kepada individu adalah realisasi belanja bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat lansia, warga eks kusta, dan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

| No | URAIAN | JUMLAH |
|---------------|--|-------------------------|
| 1 | Bantuan sosial untuk lansia | 1.677.600.000,00 |
| 2 | Bantuan sosial untuk warga eks kusta | 132.000.000,00 |
| 3 | Bantuan sosial untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 2.469.998.100,00 |
| JUMLAH | | 4.279.598.100,00 |

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga adalah Bantuan Sosial yang diberikan untuk Keluarga Penerima Manfaat dengan jumlah 3.735 Keluarga Penerima Manfaat dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|---------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | Penyaluran Tahap 1 | 1.120.500.000,00 |
| 2 | Penyaluran Tahap 2 | 1.120.200.000,00 |
| Jumlah | | 2.240.700.000,00 |

Realisasi belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat adalah bantuan sosial yang diberikan untuk kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

| No | URAIAN | JUMLAH |
|---------------|---|----------------------|
| 1 | Belanja Pengadaan Perahu Bermotor dalam rangka Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2022. | 55.122.600,00 |
| Jumlah | | 55.122.600,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Realisasi belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan adalah realisasi belanja bantuan sosial yang diberikan kepada panti asuhan sebagai berikut:

| No | NAMA PANTI ASUHAN | JUMLAH |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Panti Asuhan Budi Taqwa | 248.200.000,00 |
| 2 | Panti Asuhan Budi Akhlaqul Karimah | 277.400.000,00 |
| 3 | Panti Asuhan Mi'rajul Ulum | 350.400.000,00 |
| 4 | Panti Asuhan Miftahussalam | 445.300.000,00 |
| 5 | Panti Asuhan Budi Utomo | 109.500.000,00 |
| 6 | Panti Asuhan Izzul Hasan | 605.900.000,00 |
| 7 | Panti Asuhan Siti Khadijah | 620.500.000,00 |
| JUMLAH | | 2.657.200.000,00 |

5.1.2.2. Belanja Modal

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 638.480.013.903,00 | 483.199.477.506,00 | 442.233.855.608,00 |

Belanja Modal periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dianggarkan sebesar Rp638.480.013.903,00 dan terealisasi sebesar Rp483.199.477.506,00 atau mencapai 75,68%. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 meningkat sebesar Rp40.965.621.898,00 atau mencapai 9,26% jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp 442.233.855.608,00. Dengan rincian Realisasi Belanja Modal 2022 terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2022 | | Tahun 2021 |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Belanja Modal Tanah | 23.557.470.000,00 | 3.450.800.000,00 | 13.781.914.000,00 |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 99.598.593.139,00 | 70.914.035.623,00 | 54.642.456.139,00 |
| 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 185.248.715.745,00 | 154.432.756.722,00 | 228.023.651.539,00 |
| 4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 324.700.599.019,00 | 252.793.986.263,00 | 143.322.591.761,00 |
| 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.374.636.000,00 | 1.607.898.898,00 | 2.463.242.169,00 |
| | Jumlah | 638.480.013.903,00 | 483.199.477.506,00 | 442.233.855.608,00 |

Penjelasan masing-masing jenis Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 23.557.470.000,00 | 3.450.800.000,00 | 13.781.914.000,00 |

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp 3.450.800.000,00 atau mencapai 14,65% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp23.557.470.000,00. Realisasi belanja modal tanah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 74,96% dari realisasi tahun 2021 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Rp13.781.914.000,00. Realisasi belanja modal merupakan hasil pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2022, yaitu:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Modal Tanah Persil | 0,00 | 0,00 | 722.721.000,00 |
| 2 | Belanja Modal Tanah Non Persil | 3.897.470.000,00 | 3.450.800.000,00 | 13.059.193.000,00 |
| 3 | Belanja Modal Tanah untuk Lapangan | 19.660.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 23.557.470.000,00 | 3.450.800.000,00 | 13.781.914.000,00 |

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 99.598.593.139,00 | 70.914.035.623,00 | 54.642.456.139,00 |

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp70.914.035.623,00 atau mencapai 71,20% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp99.598.593.139,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 29,78% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp54.642.456.139,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan realisasi pengadaan belanja modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari APBD, BLUD, dan Dana BOS oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2022, yang terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat | 1.995.000.000,00 | 1.786.400.000,00 | 57.525.000,00 |
| 2 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu | 1.726.444.600,00 | 1.457.785.600,00 | 24.589.100,00 |
| 3 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 7.431.531.600,00 | 3.189.397.200,00 | 6.596.546.000,00 |
| 4 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Apung Tak Bermotor | 32.700.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 5 | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor | 65.000.000,00 | 25.000.000,00 | 16.750.000,00 |
| 6 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Bermesin | 0,00 | 0,00 | 49.499.100,00 |
| 7 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin | 67.926.300,00 | 56.233.460,00 | 80.587.600,00 |
| 8 | Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur | 151.474.300,00 | 141.271.000,00 | 2.137.000,00 |
| 9 | Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan | 893.099.300,00 | 829.079.525,00 | 8.100.000,00 |
| 10 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor | 1.936.025.000,00 | 1.366.860.464,00 | 1.253.069.200,00 |
| 11 | Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga | 15.101.060.206,00 | 11.007.610.699,00 | 5.178.172.540,00 |
| 12 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 15.878.406.148,00 | 14.167.759.765,00 | 12.816.203.596,00 |
| 13 | Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 2.475.534.550,00 | 1.935.213.442,00 | 1.230.642.991,00 |
| 14 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 3.765.300.968,00 | 3.263.585.221,00 | 2.503.793.967,00 |
| 15 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 297.200.000,00 | 216.250.000,00 | 75.850.000,00 |
| 16 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran | 21.843.806.934,00 | 18.413.423.781,00 | 3.780.940.449,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan | 19.658.283.719,00 | 9.597.258.095,00 | 2.312.328.768,00 |
| 18 | Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium | 368.678.256,00 | 262.541.680,00 | 0,00 |
| 19 | Belanja Modal pengadaan Alat Peraga/Pratek Sekolah | 2.329.836.400,00 | 262.639.841,00 | 2.338.750.940,00 |
| 20 | Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 755.500.000,00 | 744.554.000,00 | 19.000.000,00 |
| 21 | Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hydrodinamica | 50.495.600,00 | 33.450.000,00 | 74.321.300,00 |
| 22 | Belanja Modal Peralatan Mesin dari BLUD | 0,00 | 0,00 | 7.982.746.469,00 |
| 23 | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Dari Dana BOS | 0,00 | 0,00 | 6.174.825.771,00 |
| 24 | Belanja Modal Alat Eksplorasi | 115.550.000,00 | 96.899.000,00 | 350.435.000,00 |
| 25 | Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi | 426.319.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 48.556.100,00 | 48.479.900,00 | 167.762.348,00 |
| 27 | Belanja Modal Alat Peraga | 772.785.000,00 | 626.538.225,00 | 310.000.000,00 |
| 28 | Belanja Modal Alat Rambu-Rambu | 1.357.747.238,00 | 1.339.774.725,00 | 1.104.429.000,00 |
| 29 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 54.331.000,00 | 46.030.000,00 | 121.450.000,00 |
| | Jumlah | 99.598.593.139,00 | 70.914.035.623,00 | 54.642.456.139,00 |

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 185.248.715.745,00 | 154.432.756.722,00 | 228.023.651.539,00 |

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp154.432.756.722,00 atau mencapai 83,37% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp185.248.715.745,00. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 32,27% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp228.023.651.539,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan realisasi belanja modal pengadaan/pembangunan gedung dan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2022, berupa:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Belanja modal Pengadaan gedung tempat kerja | 184.204.700.745,00 | 153.538.305.722,00 | 227.612.558.539,00 |
| 2 | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 733.600.000,00 | 724.851.000,00 | 0,00 |
| 3 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan TuguTitik Kontrol/Pasti | 310.415.000,00 | 169.600.000,00 | 411.093.000,00 |
| | Jumlah | 185.248.715.745,00 | 154.432.756.722,00 | 228.023.651.539,00 |

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 324.700.599.019,00 | 252.793.986.263,00 | 143.322.591.761,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp252.793.986.263,00 atau mencapai 77,85% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp324.700.599.019,00. Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 76,38% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp143.322.591.761,00. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan realisasi belanja modal pengadaan/pembangunan konstruksi jalan, irigasi dan jaringan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2022, berupa:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Belanja modal Pengadaan Jalan | 222.239.248.529,00 | 174.165.262.741,00 | 72.440.501.449,00 |
| 2 | Belanja modal Pengadaan Jembatan | 45.721.911.683,00 | 25.368.156.948,00 | 28.012.987.705,00 |
| 3 | Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 8.235.331.000,00 | 7.832.045.980,00 | 16.396.469.000,00 |
| 4 | Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Banjir | 22.250.000.000,00 | 21.205.213.550,00 | 12.954.838.157,00 |
| 5 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa | 4.550.000.000,00 | 4.231.722.544,00 | 2.803.785.950,00 |
| 6 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor | 0,00 | 0,00 | 985.600.000,00 |
| 7 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah | 998.800.000,00 | 831.856.000,00 | 0,00 |
| 8 | Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik | 8.090.307.810,00 | 7.128.163.500,00 | 2.376.593.000,00 |
| 9 | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum | 12.614.999.997,00 | 12.031.565.000,00 | 7.168.175.000,00 |
| 10 | Belanja Modal Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Dana BLUD | 0,00 | 0,00 | 183.641.500,00 |
| | Jumlah | 324.700.599.019,00 | 252.793.986.263,00 | 143.322.591.761,00 |

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.374.636.000,00 | 1.607.898.898,00 | 2.463.242.169,00 |

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 1.607.898.898,00 atau mencapai 29,92% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp5.374.636.000,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 34,72% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.463.242.169,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya merupakan realisasi pengadaan/pembelian aset tetap lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Belanja Modal Pengadaan Bahan Perpustakaan | 4.844.313.600,00 | 1.501.527.898,00 | 374.320.500,00 |
| 2 | Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 124.000.000,00 | 100.050.000,00 | 23.628.000,00 |
| 3 | Belanja Modal Hewan | 6.322.400,00 | 6.321.000,00 | 38.700.000,00 |
| 4 | Belanja Modal Pengadaan Tanaman | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bersumber Dana BOS | 0,00 | 0,00 | 2.005.093.669,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 21.500.000,00 |
| | Jumlah | 5.374.636.000,00 | 1.607.898.898,00 | 2.463.242.169,00 |

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 18.000.000.000,00 | 14.038.372.812,00 | 14.008.130.387,00 |

Belanja Tidak Terduga periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.038.372.812,00 atau mencapai 77,99%. Realisasi BTT Tahun 2022 meningkat sebesar Rp30.242.425,00 atau mencapai 0,22% jika dibandingkan dengan realisasi BTT tahun lalu sebesar Rp14.008.130.387,00. Adapun Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga terdiri dari:

| No | Uraian | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pembayaran BANSOS Tidak Direncanakan | 69.505.476,00 | 1.015.975.000,00 |
| 2 | Pembayaran Belanja Tak Terduga untuk Pengembalian Piutang DPM-LUEP | 57.607.263,00 | 12.812.703.113,00 |
| 3 | Pembayaran Provisi dan Keterlambatan Pemkab Tapin kpd PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | 131.249.019,00 | 69.449.374,00 |
| 4 | Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Desa | 1.212.277.970,00 | 2.900,00 |
| 5 | Pembayaran Penanganan Kasus ODGJ dan Penyakit Dalam | 6.956.814,00 | 110.000.000,00 |
| 6 | Pembayaran dalam Rangka Pencegahan, Penanganan Gangguan Serta Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat & Ketertiban Umu | 443.358.000,00 | 0,00 |
| 7 | Pembayaran Bimtek Penyusunan TPP tahun 2023 | 60.450.000,00 | 0,00 |
| 8 | Pembayaran BTT Rumah Informasi Desa (Rumindes) | 76.000.000,00 | 0,00 |
| 9 | Pembayaran Belanja Pemindahan Gedung Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 10 | Penanganan Wabah Virus Disease 2019 (Covid-19) | 11.878.968.270,00 | 0,00 |
| 11 | Pengendalian Dampak Inflasi Daerah sektor Transportasi | 90.000.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 14.038.372.812,00 | 14.008.130.387,00 |

Dari Realisasi Belanja Tak Terduga untuk Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2022 sebesar Rp1.212.277.970,00 telah disalurkan ke beberapa desa dalam 12 (dua belas kecamatan) di Kabupaten Tapin dengan rician sebagai berikut:

| No | URAIAN | JUMLAH |
|----|------------------------------------|----------------|
| 1 | Desa pada Kec. Bakarangan | 33.196.693,00 |
| 2 | Desa pada Kec. Binuang | 71.666.455,50 |
| 3 | Desa pada Kec. Bungur | 120.150.396,50 |
| 4 | Desa pada Kec. Candi Laras Selatan | 106.912.200,50 |
| 5 | Desa pada Kec. Candi Laras Utara | 153.150.761,50 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | URAIAN | JUMLAH |
|---------------|------------------------------|-------------------------|
| 6 | Desa pada Kec. Hatungun | 139.845.987,00 |
| 7 | Desa pada Kec. Lokpaikat | 106.432.727,00 |
| 8 | Desa pada Kec. Piani | 63.443.267,50 |
| 9 | Desa pada Kec. Salam Babaris | 108.197.147,50 |
| 10 | Desa pada Kec. Tapin Selatan | 143.390.413,00 |
| 11 | Desa pada Kec. Tapin tengah | 73.345.198,50 |
| 12 | Desa pada Kec. Tapin Utara | 92.546.722,50 |
| JUMLAH | | 1.212.277.970,00 |

Dari Realisasi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan *Covid-19* Tahun 2022 sebesar Rp11.878.968.270,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

| No | URAIAN | JUMLAH |
|---------------|--|--------------------------|
| 1 | Satuan Polisi Pamong Praja | 10.669.437.600,00 |
| 2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 271.362.200,00 |
| 3 | RSUD Datu Sanggul | 144.510.270,00 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 565.100.000,00 |
| 5 | Sekretariat Daerah (Bag. Perlengkapan) | 228.558.200,00 |
| JUMLAH | | 11.878.968.270,00 |

Dari jumlah realisasi Belanja Tak Terduga untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp11.878.968.270,00 tersebut diatas telah diatribusi ke Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp13.450.000,00.

5.1.2.4. Belanja Transfer

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 165.704.127.400,00 | 165.138.350.896,50 | 176.034.539.570,00 |

Realisasi Belanja Transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dianggarkan sebesar Rp165.704.127.400,00 dan terealisasi sebesar Rp165.138.350.896,50 atau mencapai 99,66%. Realisasi Belanja Transper Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.896.188.673,50 atau mencapai 6,19% jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp176.034.539.570,00. Adapun Rincian Realisasi Belanja Transfer terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Bagi Hasil | 2.792.546.500,00 | 2.519.839.550,50 | 2.039.312.404,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan | 162.911.580.900,00 | 162.618.511.346,00 | 173.995.227.166,00 |
| | Jumlah | 165.704.127.400,00 | 165.138.350.896,50 | 176.034.539.570,00 |

Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada lampiran 2.1.

Penjelasan masing-masing transfer adalah sebagai berikut:



5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

| Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 2.792.546.500,00 | 2.519.839.550,50 | 2.039.312.404,00 |

Realisasi Belanja Bagi Hasil selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.519.839.550,50 atau mencapai 90,23% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp2.792.546.500,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 23,56% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.039.312.404,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil merupakan realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah | 2.271.151.112,00 | 2.267.224.672,50 | 1.805.616.074,00 |
| 2 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah | 521.395.388,00 | 252.614.878,00 | 233.696.330,00 |
| | Jumlah | 2.792.546.500,00 | 2.519.839.550,50 | 2.039.312.404,00 |

Rincian Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada Lampiran 2.2.

5.1.2.4.1.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

| Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 2.271.151.112,00 | 2.267.224.672,50 | 1.805.616.074,00 |

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.267.224.672,50 atau mencapai 99,83% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp2.271.151.112,00. Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 25,57% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.805.616.074,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa.

5.1.2.4.1.2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

| Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 521.395.388,00 | 252.614.878,00 | 233.696.330,00 |

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp252.614.878,00 atau mencapai 48,45% dari anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Tahun 2022 sebesar Rp 521.395.388,00. Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,10% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp233.696.330,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2022 merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.



5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 162.911.580.900,00 | 162.618.511.346,00 | 173.995.227.166,00 |

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 162.618.511.346,00 atau mencapai 99,82% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp162.911.580.900,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,54% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp173.995.227.166,00 Realisasi tahun 2022 merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa (DD) | 0,00 | 93.075.636.760,00 | 102.630.432.454,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (ADD) | 162.911.580.900,00 | 69.542.874.586,00 | 71.364.794.712,00 |
| | Jumlah | 162.911.580.900,00 | 162.618.511.346,00 | 173.995.227.166,00 |

5.1.2.4.2.1. Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa (DD)

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 0,00 | 93.075.636.760,00 | 102.630.432.454,00 |

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 93.075.636.760,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 9,31% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp102.630.432.454,00 .

5.1.2.4.2.2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (ADD)

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 162.911.580.900,00 | 69.542.874.586,00 | 71.364.794.712,00 |

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 69.542.874.586,00 atau mencapai 42,69% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp162.911.580.900,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,55% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 71.364.794.712,00.

5.1.3. Pembiayaan

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 158.051.727.004,00 | 155.262.062.552,10 | 436.777.764.925,27 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Struktur Pembiayaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Netto secara keseluruhan dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dianggarkan sebesar Rp158.051.727.004,00 dan terealisasi sebesar Rp155.262.062.552,10 atau mencapai 98,23%. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp281.515.702.373,17 atau mencapai 64,45% jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan netto tahun lalu sebesar Rp436.777.764.925,27. Adapun rincian terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2022 | | Tahun 2021 |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 172.029.069.911,00 | 168.117.818.946,10 | 436.777.764.925,27 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | (13.977.342.907,00) | (12.855.756.394,00) | (0,00) |
| Pembiayaan Netto | | 158.051.727.004,00 | 155.262.062.552,10 | 436.777.764.925,27 |

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 172.029.069.911,00 | 168.117.818.946,10 | 436.777.764.925,27 |

Penerimaan Pembiayaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dianggarkan sebesar Rp172.029.069.911,00 dan terealisasi sebesar Rp168.117.818.946,10 atau mencapai 97,73%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp268.659.945.979,17 atau mencapai 61,51% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun lalu sebesar Rp436.777.764.925,27. Adapun rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 | | Tahun 2021 |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Penggunaan SiLPA | 132.792.517.161,00 | 132.792.517.161,10 | 326.836.309.232,27 |
| 2 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 38.736.552.750,00 | 35.304.861.744,00 | 109.921.012.750,00 |
| 3 | Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | 500.000.000,00 | 20.440.041,00 | 20.442.943,00 |
| Jumlah | | 172.029.069.911,00 | 168.117.818.946,10 | 436.777.764.925,27 |

Penjelasan masing-masing jenis Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.3.1.1. Penggunaan SiLPA

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 132.792.517.161,00 | 132.792.517.161,10 | 326.836.309.232,27 |

Dalam tahun anggaran 2022 dianggarkan penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp132.792.517.161,00 dan realisasi penggunaannya sebesar Rp 132.792.517.161,10 atau mencapai 100%. Realisasi penggunaan Silpa Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar mencapai 59,37% jika dibandingkan dengan realisasi penggunaan Silpa tahun lalu sebesar Rp326.836.309.232,27.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.1.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

| Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 38.736.552.750,00 | 35.304.861.744,00 | 109.921.012.750,00 |

Penerimaan pinjaman daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 38.736.552.750,00 dan terealisasi sebesar Rp35.304.861.744,00 atau mencapai 91,14%. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 67,88% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp109.921.012.750,00.

Realisasi Penerimaan Pinjaman daerah Tahun 2022 adalah penerimaan pinjaman Kabupaten Tapin kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (BUMN) yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur, pinjaman tersebut diperuntukkan untuk pembangunan RSUD Baru di Kabupaten Tapin. Realisasi pinjaman dalam negeri tahun 2022 adalah sebesar Rp 35.304.861.744,00.

5.1.3.1.3. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

| Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 500.000.000,00 | 20.440.041,00 | 20.442.943,00 |

Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Tahun 2022 sebesar Rp 20.440.041,00 atau mencapai 4,09% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,01% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp20.442.943,00. Adapun Realisasi Tahun 2022 dan 2021 merupakan hasil penerimaan atas pemberian dana talangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Tanggal | Uraian | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|---------------|----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 11-01-2022 | Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2014 an. H. Sibransyah LUEP PP AU | 906.190,00 | 1.360.736,00 |
| 2 | 30-03-2022 | Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2014 an. H. Sibransyah LUEP PP AU | 906.190,00 | 906.190,00 |
| 3 | 21-04-2022 | Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2014 an. H. Sibransyah LUEP PP AU | 906.190,00 | 3.176.017,00 |
| 4 | 24-05-2022 | Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2014 an. H. Sibransyah LUEP PP AU | 906.190,00 | - |
| 5 | 17-11-2022 | Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2014 an. H. Sibransyah LUEP PP AU | 1.815.281,00 | - |
| 6 | 06-12-2022 | Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2015 an. Hj. Maisarah LUEP PP Berkat Hijrah | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 7 | 15-09-2021 | Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2015 an. Aberansyah LUEP PP Doa Ibu | - | 10.000.000,00 |
| JUMLAH | | | 20.440.041,00 | 20.442.943,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 13.977.342.907,00 | 12.855.756.394,00 | 0,00 |

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp 12.855.756.394,00 atau mencapai 91,98% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp13.977.342.907,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2022 merupakan pembayaran kewajiban pokok pinjaman Pemerintah Kabupaten Tapin kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Tahun 2022 | | Tahun 2021 |
|----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Pembayaran Cicilan Pokok UJT | 13.477.342.907,00 | 12.855.756.394,00 | 0,00 |
| 2 | Pemberian Pinjaman Daerah | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 13.977.342.907,00 | 12.855.756.394,00 | 0,00 |

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

| Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0,00 | 227.687.810.529,53 | 132.792.517.161,10 |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp227.687.810.529,53 dengan perhitungan sebagai berikut:

| Uraian | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pendapatan-LRA | 1.717.931.600.070,93 | 1.202.139.964.277,83 |
| Belanja | (1.645.505.852.093,50) | (1.506.125.212.042,00) |
| Surplus/(Defisit) | 72.425.747.977,43 | (303.985.247.764,17) |
| Penerimaan Pembiayaan | 168.117.818.946,10 | 436.777.764.925,27 |
| Pengeluaran Pembiayaan | (12.855.756.394,00) | 0,00 |
| Pembiayaan Netto | 155.262.062.552,10 | 436.777.764.925,27 |
| SiLPA Tahun Berjalan | 227.687.810.529,53 | 132.792.517.161,10 |

SiLPA Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 227.687.810.529,53 dan Rp132.792.517.161,10 terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Kas di Kasda (a+b) | 208.402.861.001,83 | 97.948.848.794,42 |
| | a. RKUD Bank Kalsel (PAD dan Penerimaan Lainnya) | 20.361.890.249,75 | 56.488.844.829,91 |
| | b. RKUD Bank Kalsel (DAU) | 188.040.970.752,08 | 41.460.003.964,51 |
| 2 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 143.148.682,00 |
| 3 | Kas di BLUD | 18.779.154.443,70 | 32.694.317.624,24 |
| 4 | Kas di Bendahara FKTP | 319.824.928,00 | 550.316.951,00 |
| 5 | Kas di Bendahara BOS | 185.970.156,00 | 1.455.885.109,44 |
| | Jumlah Saldo Akhir Kas (1+2+3+4+5) | 227.687.810.529,53 | 132.792.517.161,10 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Pada Kas di Kasda per 31 Desember 2022 sebesar Rp208.402.861.001,83 terdapat dana yang sudah ditentukan alokasi pemanfaatannya ditahun berikutnya sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---------------|---------------------------|
| 1 | DAK FISIK | 1.340.128.114,83 |
| 2 | DAK NON FISIK | 6.306.618.982,00 |
| 3 | DID | 425.387.371,00 |
| 4 | DAU | 140.801.815.572,00 |
| 5 | DBH/PAD | 59.528.910.962,00 |
| | TOTAL | 208.402.861.001,83 |

Dengan demikian dari total saldo Kas Umum Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp208.402.861.001,83 jika kegiatan-kegiatan diatas akan dilaksanakan di Tahun 2023 maka SiLPA Murni Tahun 2022 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana Kas Umum Daerah adalah sebesar Rp208.402.861.001,83.



5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 132.792.517.161,10 | 326.836.309.232,27 |

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp 132.792.517.161,10.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 132.792.517.161,10 | 326.836.309.232,27 |

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 282.066.233.815,36.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 227.687.810.529,53 | 132.792.517.161,10 |

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 227.687.810.529,53 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Surplus/Defisit Anggaran | 72.425.747.977,43 | (303.985.247.764,17) |
| Pembiayaan Netto | 155.262.062.552,10 | 436.777.764.925,27 |
| SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan | 227.687.810.529,53 | 132.792.517.161,10 |

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 227.687.810.529,53 | 132.792.517.161,10 |

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 sebesar Rp.227.687.810.529,53 dan Tahun 2021 sebesar Rp132.792.517.161,10 merupakan nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kas di Kas Daerah | 208.402.861.001,83 | 97.948.848.794,42 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 143.148.682,00 |
| Kas di Bendahara BOS | 185.970.156,00 | 1.455.885.109,44 |
| Kas di BLUD | 18.779.154.443,70 | 32.694.317.624,24 |
| Kas di Bendahara FKTP | 319.824.928,00 | 550.316.951,00 |
| Kas Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 227.687.810.529,53 | 132.792.517.161,10 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1. Aset Lancar

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 337.293.331.212,86 | 196.395.574.683,69 |

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp337.293.331.212,86 dan Rp196.395.754.683,69. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 naik sebesar Rp140.897.576.529,17 atau sebesar 71,74% dari Saldo Aset lancar per 31 Desember 2022, dengan penjelasan sebagai berikut:

| No | Jenis Rekening | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Kas dan Bank | 227.687.810.529,53 | 132.792.517.161,10 |
| 3 | Piutang | 108.658.766.493,12 | 62.672.818.488,10 |
| 4 | Penyisihan Piutang | (15.211.873.738,31) | (16.854.552.946,00) |
| 5 | Persediaan | 16.158.627.928,52 | 17.784.971.980,49 |
| Jumlah | | 337.293.331.212,86 | 196.395.754.683,69 |

Kas dan Bank

Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp227.687.810.529,53 dan Rp132.792.517.161,10 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas di Bendahara FKTP rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Rekening | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Kas di Kas Daerah | 208.402.861.001,83 | 97.948.848.794,42 |
| 2 | Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 143.148.682,00 |
| 4 | Kas di BLUD | 18.779.154.443,70 | 32.694.317.624,24 |
| 5 | Kas Dana BOS | 185.970.156,00 | 1.455.885.109,44 |
| 6 | Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 319.824.928,00 | 550.316.951,00 |
| 7 | Kas Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 227.687.810.529,53 | 132.792.517.161,10 |

5.3.1.1. Kas di Kas Daerah

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|--------------------------|
| 208.402.861.001,83 | 97.948.848.794,42 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp208.402.861.001,83 dan Rp97.948.848.794,42 merupakan saldo rekening giro pada Rekening Bank Kalsel Cabang Rantau. Rincian saldo Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

| No | Jenis Rekening | Nama Rekening | Nomor Rekening | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Rekening Giro Bank Kalsel | Kasda PAD dan Penerimaan Lainnya | 006.00.03.00001.7 | 20.361.890.249,75 | 56.488.844.829,91 |
| 2 | Rekening Giro Bank Kalsel | RKUD Kab. Tapin | 006.00.03.00003.9 | 188.040.970.752,08 | 41.460.003.964,51 |
| Jumlah | | | | 208.402.861.001,83 | 97.948.848.794,42 |

5.3.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|-----------------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 pada 45 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

5.3.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|-----------------------|-----------------------|
| 0,00 | 143.148.682,00 |

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp143.148.682,00.

5.3.1.4. Kas di BLUD

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 18.779.154.443,70 | 32.694.317.624,24 |

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp18.779.154.443,70 dan Rp32.694.317.624,24 merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Datu Sanggul. Rincian saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

| No | Jenis dan Nama Rekening | Nomor Rekening | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| A | Rekening Giro | | | |
| 1 | Bank Mandiri – Bend. Penerimaan RSUD | 031-00-5544556-6 | 9.352.693.552,87 | 23.546.198.622,02 |
| 2 | Bank Mandiri – Bendahara Pengeluaran | 031-00-4455665-5 | 1.466.387,72 | 1.586.628,30 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Jenis dan Nama Rekening | Nomor Rekening | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Bank Mandiri – BLUD RSU Datu Sanggul Rantau | 006.00.05.00001.1 | 9.424.994.503,11 | 3.146.532.373,92 |
| | Jumlah Rekening Giro | | 18.779.154.443,70 | 26.694.317.624,24 |
| B | Rekening Deposito | | | |
| 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul (1 bulan) Bank Kalsel | 006.04.01.40392.6 | 0,00 | 2.000.000.000,00 |
| 2 | Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul (1 bulan) Bank Kalsel | 006.04.01.40390.4 | 0,00 | 1.000.000.000,00 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul (3 bulan) Bank Kalsel | 006.04.02.00136.2 | 0,00 | 3.000.000.000,00 |
| | Jumlah Rekening Deposito | | 0,00 | 6.000.000.000,00 |
| | Saldo Kas di Bendahara BLUD | | 18.779.154.443,70 | 32.694.317.624,24 |

Rincian mutasi Kas di BLUD terdapat pada Lampiran 3.

5.3.1.5. Kas Dana BOS

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 185.970.156,00 | 1.455.885.109,44 |

Kas Di Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp185.970.156,00 dan Rp1.455.885.109,44. Kas di Bendahara BOS terdiri dari Kas dana BOS dan Kas dana BOP. Kas dana BOS merupakan saldo Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat yang berada pada rekening Bendahara BOS pada 197 sekolah terdiri dari 175 Sekolah Dasar (SD) Negeri dan 22 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Kas dana BOP merupakan saldo Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dari Pemerintah Pusat yang berada pada rekening Bendahara BOP terdiri dari 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 9 sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis Rekening | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Kas dana BOS | 185.780.156,00 | 1.455.885.109,44 |
| 2 | Kas dana BOP | 190.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 185.970.156,00 | 1.455.885.109,44 |

Rincian Kas di Bendahara BOS dan BOP pada masing-masing sekolah dapat dilihat pada Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2.

5.3.1.6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 319.824.928,00 | 550.316.951,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp319.824.928,00 dan Rp550.316.951,00. Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 tersebut terdapat pada 13 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Puskesmas | Nomor Rekening BNI | Saldo Tahun 2022 (Rp) | Saldo Tahun 2021 (Rp) |
|----|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Puskesmas Binuang | 0344939540 | 55.160,00 | 18.107.378,00 |
| 2 | Puskesmas Baringin | 0345089953 | 96.853.261,00 | 69.618.832,00 |
| 3 | Puskesmas Margasari | 0345092467 | 2.182.201,00 | 258.760.852,00 |
| 4 | Puskesmas Banua Padang | 0344926280 | 9.603.045,00 | 15.791.201,00 |
| 5 | Puskesmas Salam Babaris | 0345050652 | 1.069.770,00 | 37.705.804,00 |
| 6 | Puskesmas Piani | 0344901425 | 12.680.102,00 | 15.657.260,00 |
| 7 | Puskesmas Pandahan | 0345071616 | 4.889.086,00 | 14.337.321,00 |
| 8 | Puskesmas Lokpaikat | 0345067962 | 1.028.003,00 | 20.515.600,00 |
| 9 | Puskesmas Tapin Utara | 0345077845 | 1.111.436,00 | 5.640.038,00 |
| 10 | Puskesmas Hatungun | 0344922162 | 3.812.975,00 | 2.749.022,00 |
| 11 | Puskesmas Tambarangan | 0345081998 | 7.663.376,00 | 18.113.800,00 |
| 12 | Puskesmas Tambaruntung | 0345577485 | 96.432.623,00 | 1.017.824,00 |
| 13 | Puskesmas Bakarangan | 0344933117 | 82.443.890,00 | 72.302.019,00 |
| | Jumlah | | 319.824.928,00 | 550.316.951,00 |

Rincian mutasi Kas di Bendahara FKTP terdapat pada Lampiran 5.

5.3.1.9. Piutang Pajak

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 16.596.951.247,00 | 19.012.201.286,00 |

Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.596.951.247,00 dan Rp19.012.201.286,00 yang terdiri dari:

| No | Jenis Piutang Pajak Daerah | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan | 16.596.951.247,00 | 19.012.201.286,00 |
| | Jumlah | 16.596.951.247,00 | 19.012.201.286,00 |

5.3.1.9.1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 16.596.951.247,00 | 19.012.201.286,00 |

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp16.596.951.247,00 dan Rp19.012.201.286,00. Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Saldo Awal Tahun 2022 (Rp) | Penetapan Tahun 2022 (Rp) | Realisasi (Rp) | | Penghapusan Piutang (Rp) | Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp) |
|----------------------------|---------------------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | Piutang Tahun 2021 dan tahun sebelumnya | Tahun 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=(1+2)-(3+4)-5 |
| 19.012.201.286,00 | 2.221.843.995,00 | 909.075.895,00 | 900.502.626,00 | 2.827.515.513,00 | 16.596.951.247,00 |

Pada tahun 2022 mutasi penambah diperoleh dari penetapan tahun 2022 yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan untuk mutasi pengurang terdiri dari realisasi pembayaran PBB tahun 2022 dan piutang tahun 1994 sampai 2021 serta penghapusan piutang PBB. Penghapusan piutang tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati nomor 188.45/305/KUM/2021 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan Secara Bersyarat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp2.827.515.513,00.

Untuk Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp16.596.951.247,00 dan Rp19.012.201.286,00 merupakan saldo Piutang dari Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Tahun | Saldo Piutang PBB 2022 (Rp) | Saldo Piutang PBB 2021 (Rp) |
|----|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1994 | 6.498.723,00 | 10.146.100,00 |
| 2 | 1995 | 14.076.258,00 | 20.180.433,00 |
| 3 | 1996 | 17.913.052,00 | 34.776.863,00 |
| 4 | 1997 | 12.509.825,00 | 24.569.781,00 |
| 5 | 1998 | 18.957.634,00 | 39.853.091,00 |
| 6 | 1999 | 24.115.319,00 | 46.230.653,00 |
| 7 | 2000 | 23.865.306,00 | 46.968.680,00 |
| 8 | 2001 | 21.920.276,00 | 42.778.277,00 |
| 9 | 2002 | 7.476.901,00 | 8.331.764,00 |
| 10 | 2003 | 59.247.237,00 | 94.184.929,00 |
| 11 | 2004 | 180.609.651,00 | 243.426.105,00 |
| 12 | 2005 | 476.510,00 | 2.763.190,00 |
| 13 | 2006 | 416.590.919,00 | 496.651.722,00 |
| 14 | 2007 | 95.926.473,00 | 104.862.948,00 |
| 15 | 2008 | 856.983.113,00 | 1.182.320.651,00 |
| 16 | 2009 | 857.931.804,00 | 1.187.101.178,00 |
| 17 | 2010 | 955.153.595,00 | 1.292.806.666,00 |
| 18 | 2011 | 1.024.267.944,00 | 1.352.255.646,00 |
| 19 | 2012 | 1.076.664.294,00 | 1.468.450.656,00 |
| 20 | 2013 | 971.761.416,00 | 1.356.849.746,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Tahun | Saldo Piutang PBB 2022 (Rp) | Saldo Piutang PBB 2021 (Rp) |
|--------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| 21 | 2014 | 676.269.811,00 | 946.376.841,00 |
| 22 | 2015 | 955.373.661,00 | 1.224.494.532,00 |
| 23 | 2016 | 925.149.021,00 | 1.164.308.616,00 |
| 24 | 2017 | 1.135.714.305,00 | 1.224.788.379,00 |
| 25 | 2018 | 1.189.519.068,00 | 1.292.798.846,00 |
| 26 | 2019 | 1.228.744.548,00 | 1.336.986.196,00 |
| 27 | 2020 | 1.231.542.892,00 | 1.345.068.102,00 |
| 28 | 2021 | 1.290.350.322,00 | 1.421.870.695,00 |
| 29 | 2022 | 1.321.341.369,00 | 0,00 |
| Total | | 16.596.951.247,00 | 19.012.201.286,00 |

5.3.1.10. Penyisihan Piutang Pajak

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| (11.235.523.731,75) | (13.342.643.155,78) |

Dari Piutang Pajak Tahun 2022 sebesar Rp16.596.951.247,00 diperoleh penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp11.235.523.731,75 sehingga nilai Piutang Pajak setelah penyisihan adalah sebesar Rp5.361.427.515,26. Rincian Penyisihan Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Piutang Pajak (Rp) | Penyisihan Piutang Pajak (Rp) | Piutang Pajak Netto (Rp) |
|----|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3+4 |
| 1 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan | 16.596.951.247,00 | (11.235.523.731,75) | 5.361.427.515,25 |
| | Jumlah | 16.596.951.247,00 | (11.235.523.731,75) | 5.361.427.515,25 |

Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

| Tahun Piutang | Nilai Piutang | Kualitas Piutang | | | | Piutang Netto |
|---------------|------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Lancar (P<1 th) (Rp) | Kurang lancar (1 th<P<2 th) (Rp) | Diragukan (2 th<P<5 th) (Rp) | Macet (5 th<P) (Rp) | |
| | | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 2 - (3+4+5+6) |
| 1994 s.d 2011 | 4.594.520.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.594.520.540,00 | 0,00 |
| 2012 | 1.076.664.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076.664.294,00 | 0,00 |
| 2013 | 971.761.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.761.416,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Tahun Piutang | Nilai Piutang | Kualitas Piutang | | | | Piutang Netto |
|---------------|--------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Lancar (P<1 th) (Rp) | Kurang lancar (1 th<P<2 th) (Rp) | Diragukan (2 th<P<5 th) (Rp) | Macet (5 th<P) (Rp) | |
| | | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 2 - (3+4+5+6) |
| 2014 | 676.269.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.269.811,00 | 0,00 |
| 2015 | 955.373.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.373.661,00 | 0,00 |
| 2016 | 925.149.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.149.021,00 | 0,00 |
| 2017 | 1.135.714.305,00 | 0,00 | 0,00 | 567.857.152,50 | 0,00 | 567.857.152,50 |
| 2018 | 1.189.519.068,00 | 0,00 | 0,00 | 594.759.534,00 | 0,00 | 594.759.534,00 |
| 2019 | 1.228.744.548,00 | 0,00 | 0,00 | 614.372.274,00 | 0,00 | 614.372.274,00 |
| 2020 | 1.231.542.892,00 | 0,00 | 123.154.289,20 | 0,00 | 0,00 | 1.108.388.602,80 |
| 2021 | 1.290.350.322,00 | 0,00 | 129.035.032,20 | 0,00 | 0,00 | 1.161.315.289,80 |
| 2022 | 1.321.341.369,00 | 6.606.706,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314.734.662,15 |
| Jumlah | 16.596.951.247,00 | 6.606.706,85 | 252.189.321,40 | 1.776.988.960,50 | 9.199.738.743,00 | 5.361.427.515,25 |

5.3.1.11. Piutang Retribusi Daerah

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| 4.442.091.510,00 | 3.527.439.668,00 |

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.442.091.510,00 dan Rp3.527.439.668,00 merupakan tunggakan Wajib Retribusi Daerah (WRD) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Retribusi Daerah | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Retribusi Sewa Kios Pasar/Sewa Toko | 4.175.505.842,00 | 3.219.422.000,00 |
| 2 | Retribusi Sewa Rumah Dinas | 266.585.668,00 | 308.017.668,00 |
| | Jumlah | 4.442.091.510,00 | 3.527.439.668,00 |

Penjelasan masing-masing Piutang adalah sebagai berikut:

5.3.1.11.1. Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar/Sewa Toko

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| 4.175.505.842,00 | 3.219.422.000,00 |

Saldo Piutang Retribusi Sewa Kios/Sewa Toko per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.175.505.842,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Saldo Awal Tahun 2021 (Rp) | Penetapan Tahun 2022 (Rp) | Realisasi (Rp) | | Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp) |
|----------------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|
| | | Tahun 2022 | Piutang Tahun 2021 dan tahun sebelumnya | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 |
| 3.219.422.000,00 | 2.066.074.200,00 | 706.440.358,00 | 403.370.000,00 | 4.175.505.842,00 |

5.3.1.11.2. Piutang Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| <u>266.585.668,00</u> | <u>308.017.668,00</u> |

Saldo Piutang Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp266.585.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Saldo Awal Tahun 2021 (Rp) | Penetapan Tahun 2022 (Rp) | Realisasi (Rp) | | Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp) |
|----------------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|
| | | Tahun 2022 | Piutang Tahun 2021 dan tahun sebelumnya | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 |
| 308.017.668,00 | 171.750.000,00 | 143.903.000,00 | 69.279.000,00 | 266.585.668,00 |

5.3.1.12. Penyisihan Piutang Retribusi

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| <u>(3.485.174.264,37)</u> | <u>(3.008.412.918,00)</u> |

Dari Piutang Retribusi Tahun 2022 sebesar Rp4.442.091.510,00 dapat diperoleh Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp3.485.174.264,37 sehingga nilai piutang setelah penyisihan adalah sebesar Rp956.917.245,63. Rincian dari Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

| No | Uraian | Piutang Retribusi (Rp) | Penyisihan Piutang Retribusi (Rp) | Piutang Retribusi Netto (Rp) |
|----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3+4 |
| 1 | Retribusi Sewa Kios Pasar/sewa toko | 4.175.505.842,00 | (3.269.770.611,37) | 905.735.230,63 |
| 2 | Retribusi Sewa Rumah Dinas | 266.585.668,00 | (215.403.653,00) | 51.182.015,00 |
| | Jumlah | 4.442.091.510,00 | (3.485.174.264,37) | 956.917.245,63 |

Untuk masing-masing Penyisihan Piutang Retribusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

a. Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar/Sewa Toko

Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Toko/Sewa Kios Tahun 2022 dapat dilihat pada rincian berikut:

| Tahun Piutang | Nilai Piutang (Rp) | Kualitas Piutang | | | | Piutang Netto (Rp) |
|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Lancar (P<1 Bln) (Rp) | Kurang lancar (1 Bln<P<3 Bln) (Rp) | Diragukan (3 Bln<P<12 Bln) (Rp) | Macet (12 Bln<P) (Rp) | |
| | | 0,5% | 10% | 50% | 100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 2+3+4+5+6 |
| 2012 | 67.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (67.305.000,00) | 0,00 |
| 2013 | 102.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (102.845.000,00) | 0,00 |
| 2014 | 146.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (146.030.000,00) | 0,00 |
| 2015 | 231.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (231.227.000,00) | 0,00 |
| 2016 | 312.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (312.660.000,00) | 0,00 |
| 2017 | 366.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (366.840.000,00) | 0,00 |
| 2018 | 410.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (410.325.000,00) | 0,00 |
| 2019 | 361.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (361.610.000,00) | 0,00 |
| 2020 | 365.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (365.160.000,00) | 0,00 |
| 2021 | 452.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (452.050.000,00) | 0,00 |
| 2022 | 1.359.453.842,00 | (1.296.105,37) | (24.423.469,50) | (427.999.036,50) | 0,00 | 905.735.230,63 |
| Jumlah | 4.175.505.842,00 | (1.296.105,37) | (24.423.469,50) | (427.999.036,50) | (2.816.052.000,00) | 905.735.230,63 |

b. Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah

Penyisihan Piutang Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Tahun Piutang | Nilai Piutang (Rp) | Kualitas Piutang | | | | Piutang Netto (Rp) |
|---------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Lancar (P < 1 Bln) (Rp) | Kurang lancar (1 Bln<P<3 Bln) (Rp) | Diragukan (3 Bln<P<12 Bln) (Rp) | Macet (12 Bln<P) (Rp) | |
| | | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 2+3+4+5+6 |
| 2009 | 25.553.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (25.553.400,00) | 0,00 |
| 2010 | 9.011.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (9.011.730,00) | 0,00 |
| 2011 | 16.895.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (16.895.320,00) | 0,00 |
| 2012 | 18.843.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (18.843.938,00) | 0,00 |
| 2013 | 22.727.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (22.727.760,00) | 0,00 |
| 2014 | 25.165.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (25.165.780,00) | 0,00 |
| 2015 | 23.717.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (23.717.640,00) | 0,00 |
| 2016 | 21.807.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (21.807.120,00) | 0,00 |
| 2017 | 5.523.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.523.120,00) | 0,00 |
| 2018 | 7.604.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.604.120,00) | 0,00 |
| 2019 | 6.753.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.753.120,00) | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Tahun Piutang | Nilai Piutang (Rp) | Kualitas Piutang | | | | Piutang Netto (Rp) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Lancar (P < 1 Bln) (Rp) | Kurang lancar (1 Bln<P<3 Bln) (Rp) | Diragukan (3 Bln<P<12 Bln) (Rp) | Macet (12 Bln<P) (Rp) | |
| | | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 2+3+4+5+6 |
| 2020 | 8.187.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (8.187.120,00) | 0,00 |
| 2021 | 46.948.500,00 | 0,00 | 0,00 | (23.474.250,00) | 0,00 | 23.474.250,00 |
| 2022 | 27.847.000,00 | (139.235,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.707.765,00 |
| Jumlah | 266.585.668,00 | (139.235,00) | 0,00 | (23.474.250,00) | (191.790.168,00) | 51.182.015,00 |

5.3.1.13. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| 3.124.024.698,00 | 1.692.455.643,00 |

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.124.024.698,00 dan Rp1.692.455.643,00 merupakan Piutang Pelayanan BLUD pada RSUD Datu Sanggul. Rincian Piutang Pelayanan BLUD sebagai berikut:

| No | Uraian | Saldo Awal Tahun 2022 (Rp) | Penetapan Tahun 2022 (Rp) | Realisasi (Rp) | | Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp) |
|----|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | Piutang Tahun 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(3+4)-(5+6) |
| 1 | PT. Hasnur Riung Sinergi | 35.149.857,00 | 67.854.317,00 | 48.516.545,00 | 35.149.857,00 | 19.337.772,00 |
| 2 | PT Riung Mitra Lestari | 2.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590.000,00 | 0,00 |
| 3 | PT. Kalimantan Prima Persada | 66.559.462,00 | 312.877.887,00 | 291.874.723,00 | 66.559.462,00 | 21.003.164,00 |
| 4 | BPJS | 1.256.640.470,00 | 31.758.577.072,00 | 28.809.638.172,00 | 1.256.640.470,00 | 2.948.938.900,00 |
| 5 | BPJS –Covid 19 | 265.499.600,00 | 2.011.230.450,00 | 1.968.091.450,00 | 265.499.600,00 | 43.139.000,00 |
| 6 | PT. Trakindo Utama | 19.454.000,00 | 144.290.851,00 | 131.483.510,00 | 19.454.000,00 | 12.807.341,00 |
| 7 | PT. Adhi Luthfiatama | 46.562.254,00 | 8.662.403,00 | 0,00 | 36.445.773,00 | 18.778.884,00 |
| 8 | PT. Hasnur Riung Sinergi (AGM) | 0,00 | 11.605.178,00 | 8.565.385,00 | 0,00 | 3.039.793,00 |
| 9 | PT. Cipta Kridatama | 0,00 | 110.577.285,00 | 58.928.191,00 | 0,00 | 51.649.094,00 |
| 10 | BPJS Ketenaga Kerjaan | 0,00 | 21.439.610,00 | 16.108.860,00 | 0,00 | 5.330.750,00 |
| | Jumlah | 1.692.455.643,00 | 34.447.115.053,00 | 31.333.206.836,00 | 1.682.339.162,00 | 3.124.024.698,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.3.1.14. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| (16.581.189,19) | (8.462.278,22) |

Penyisihan Piutang Pelayanan BLUD Tahun 2022 dapat dilihat pada rincian berikut:

| Tahun Piutang | Nilai Piutang (Rp) | Kualitas Piutang | | | | Piutang Netto (Rp) |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|
| | | Lancar (P<Tgl Jatuh Tempo) (Rp) | Kurang Lancar (1 Bln Surat Tagihan ke-1<P) (Rp) | Diragukan (1 Bln Surat Tagihan ke-2<P) (Rp) | Macet (1 Bln Surat Tagihan ke-3<P) (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 2+3+4+5+6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10.116.481,00 | 0,00 | 1.011.648,10 | 0,00 | 0,00 | 1.011.648,10 |
| 2022 | 3.113.908.217,00 | 15.569.541,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.569.541,09 |
| Jumlah | 3.124.024.698,00 | 15.569.541,09 | 1.011.648,10 | 0,00 | 0,00 | 16.581.189,19 |

5.3.1.15. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| 37.241.117.750,00 | 0,00 |

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp37.241.117.750,00 dan Rp0,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan Piutang atas kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). Untuk rincian saldo Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Bagi Hasil | Piutang Dana Transfer Tahun 2022 (Rp) | Piutang Dana Transfer Tahun 2021 (Rp) |
|----|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | DBH SDA Kehutanan | 80.785.500,00 | 0,00 |
| 2 | DBH SDA Minerba | 37.160.322.440,00 | 0,00 |
| 3 | DBH Sektor Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DBH Cukai Hasil Tembakau | 9.810,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 37.241.117.750,00 | 0,00 |

5.3.1.16. Piutang Transfer Antar Daerah

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| 46.683.411.735,12 | 37.615.171.397,10 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp46.683.411.735,12 dan Rp37.615.171.397,10 merupakan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun berjalan namun sampai dengan per 31 Desember 2022 belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan rincian sebagai berikut:

| Jenis Bagi Hasil | Saldo Awal (Rp) | Koreksi Saldo Awal (Rp) | Penetapan Tahun 2022 (Rp) | Realisasi (Rp) | | Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp) |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | Piutang 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2+3+4)-(5+6) |
| DBH Pajak Kendaraan Bermotor | 5.152.450.387,79 | 0,00 | 11.037.913.085,90 | 7.778.746.068,00 | 5.152.450.388,00 | 3.259.167.017,55 |
| DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 4.909.060.247,43 | 0,00 | 11.587.353.314,96 | 8.274.592.923,00 | 4.909.060.247,00 | 3.312.760.392,01 |
| DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 25.376.941.630,70 | 0,00 | 107.359.545.434,54 | 69.826.990.917,00 | 25.376.941.631,00 | 37.532.554.517,40 |
| DBH Pajak Air Permukaan (AP) | 27.482.691,18 | 0,00 | 423.073.725,38 | 261.027.707,00 | 27.482.692,00 | 162.046.018,16 |
| DBH Pajak Rokok | 2.149.236.440,00 | 1.702.123.296,00 | 11.565.455.216,00 | 9.148.571.426,00 | 3.851.359.736,00 | 2.416.883.790,00 |
| Jumlah | 37.615.171.397,10 | 1.702.123.296,00 | 141.973.340.776,78 | 95.289.929.041,00 | 39.317.294.694,00 | 46.683.411.735,12 |

5.3.1.17. Piutang Lainnya

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 571.169.553,00 | 825.550.494,00 |

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp571.169.553,00 dan Rp825.550.494,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.17.1. Piutang Kepada LUEP

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 571.169.553,00 | 591.609.594,00 |

Piutang kepada LUEP merupakan saldo piutang kepada Lembaga Usaha Pedesaan (LUEP) atas pemberian Dana Talangan sebagai Dana Penguatan Modal. Rincian atas saldo Piutang kepada LUEP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Saldo Awal (Rp) | Penetapan Tahun 2022 (Rp) | Realisasi (Rp) | | Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp) |
|----|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | Piutang 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3+4+5-6 |
| 1 | PP Bina Usaha | 26.368.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.368.636,00 |
| 2 | PP AU | 105.089.958,00 | 0,00 | 5.440.041,00 | 0,00 | 99.649.917,00 |
| 3 | PP Doa Ibu | 158.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.001.000,00 |
| 4 | PP Berkat Hijrah | 109.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 94.000.000,00 |
| 5 | PP UD Surya | 157.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.450.000,00 |
| 6 | PP Akhmad | 35.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700.000,00 |
| | Jumlah | 591.609.594,00 | 0,00 | 20.440.041,00 | 0,00 | 571.169.553,00 |

Rincian saldo akhir Piutang kepada LUEP Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No | Uraian | Pokok Piutang (Rp) | Denda (Rp) | Realisasi 2022 | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|----|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | PP Bina Usaha | 26.368.636,00 | 0,00 | 0,00 | 26.368.636,00 | Diserahkan ke KPKNL |
| 2 | PP AU | 98.159.958,00 | 6.930.000,00 | 5.440.041,00 | 99.649.917,00 | Diserahkan ke KPKNL |
| 3 | PP Doa Ibu | 148.925.000,00 | 9.076.000,00 | 0,00 | 158.001.000,00 | |
| 4 | PP Berkat Hijrah | 109.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 94.000.000,00 | |
| 5 | PP UD Surya | 150.000.000,00 | 7.450.000,00 | 0,00 | 157.450.000,00 | |
| 6 | PP Akhmad | 34.000.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 35.700.000,00 | |
| | Jumlah | 566.453.594,00 | 25.156.000,00 | 20.440.041,00 | 571.169.553,00 | |

Dari Saldo Piutang kepada LUEP Tahun 2022 sebesar Rp571.169.553,00 termasuk nilai Piutang yang diserahkan ke KPKNL sebesar Rp131.458.594,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama LUEP | Tanggal Penyerahan | Nilai (Rp) | Alasan |
|----|---------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1 | PP Bina Usaha | 18 Oktober 2010 | 26.368.636,00 | Sesuai dengan SPK, Pasal 6 ayat (2) bahwa apabila dalam waktu yang telah ditetapkan debitur tidak mengembalikan pinjamannya maka agunan akan diserahkan ke KPKNL untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku |
| 2 | PP AU | 13 Juni 2016 | 105.089.958,00 | |
| | Jumlah | | 131.458.594,00 | |

5.3.1.18. Penyisihan Piutang Lainnya

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| (474.594.553,00) | (495.034.594,00) |

Dari nilai Piutang Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp571.169.553,00 dapat diperoleh Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp474.594.553,00 sehingga nilai Piutang Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

setelah penyisihan adalah sebesar Rp96.575.000,00. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya yaitu:

| No | Uraian | Piutang lainnya (Rp) | Penyisihan Piutang Lainnya (Rp) | Piutang Lainnya Netto (Rp) |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | Piutang Kepada LUEP | 571.169.553,00 | (474.594.553,00) | 96.575.000,00 |
| Jumlah | | 571.169.553,00 | (474.594.553,00) | 96.575.000,00 |

Penyisihan Piutang Kepada LUEP Tahun 2022 dapat dilihat pada rincian berikut:

| Tahun Piutang | Nilai Piutang (Rp) | Kualitas Piutang | | | | Piutang Netto (Rp) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------|
| | | Lancar (P<Tgl Jatuh Tempo) | Kurang Lancar (1 Bln Surat Tagihan ke-1<P) | Diragukan (1 Bln Surat Tagihan ke-2<P) | Macet (1 Bln Surat Tagihan ke-3<P) | |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| | | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 2+3+4+5+6 |
| 2009 | 26.368.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (26.368.636,00) | 0,00 |
| 2014 | 99.649.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (99.649.917,00) | 0,00 |
| 2015 | 252.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (252.001.000,00) | 0,00 |
| 2019 | 193.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | (96.575.000,00) | 0,00 | 96.575.000,00 |
| Jumlah | 571.169.553,00 | 0,00 | 0,00 | (96.575.000,00) | (378.019.553,00) | 96.575.000,00 |

Rincian Piutang dapat dilihat pada Lampiran 6.1 dan rincian Penyisihan Piutang dapat dilihat pada lampiran 6.2.

5.3.1.19. Persediaan

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 16.158.627.928,52 | 17.784.971.980,49 |

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15.994.317.622,52 dan Rp17.784.971.980,49 terdiri dari persediaan yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan persediaan yang diperoleh untuk dijual atau diserahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Persediaan yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah daerah | | |
| | Alat Tulis Kantor | 541.694.700,00 | 413.162.300,00 |
| | Benda Pos, Cukai, Karcis, | 19.197.000,00 | 28.421.300,00 |
| | Bahan Cetak | 71.965.098,00 | 336.704.801,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| | Obat/Alat Kesehatan Habis Pakai | 4.290.000,00 | 0,00 |
| | Bahan Kimia | 69.064.368,00 | 35.330.086,00 |
| | Lainnya | 1.178.167.553,00 | 570.950.862,00 |
| | Sub Jumlah 1 | 1.884.378.719,00 | 1.384.569.349,00 |
| 2 | Persediaan yang diperoleh untuk dijual atau diserahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan | | |
| | Obat/Alkes Habis Pakai | 13.573.283.118,52 | 15.989.556.770,49 |
| | Obat-obatan untuk Hewan/Tanaman | 0,00 | 0,00 |
| | Gabah/Padi | 0,00 | 0,00 |
| | Bibit Ternak/Tanaman | 328.505.305,00 | 10.580.000,00 |
| | Lainnya | 269.391.286,00 | 385.422.361,00 |
| | Sub Jumlah 2 | 14.171.179.709,52 | 16.385.559.131,49 |
| 3 | Persediaan yang digunakan dalam proses produksi | | |
| | Pupuk, Obat-obatan untuk Tanaman | 103.069.500,00 | 14.843.500,00 |
| | Sub Jumlah 3 | 103.069.500,00 | 14.843.500,00 |
| | Jumlah | 16.158.627.928,52 | 17.784.971.980,49 |

Dari nilai Persediaan sebesar Rp16.158.627.928,52 diantaranya merupakan Persediaan Obat/Alat kesehatan Habis Pakai sebesar Rp13.577.573.118,52

Rincian Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 7.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 147.039.416.139,45 | 124.367.355.884,78 |

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp147.039.416.139,45 dan Rp124.367.355.884,78 terdiri dari:

| No | Uraian | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Investasi Non Permanen Lainnya | 44.850.000,00 | 44.850.000,00 |
| 2 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 146.994.566.139,45 | 124.322.505.884,78 |
| | Jumlah | 147.039.416.139,45 | 124.367.355.884,78 |

Penjelasan masing-masing jenis Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.3.2.1. Investasi Non Permanen

| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|-------------------------|-------------------------|
| (Rp) | (Rp) |
| 44.850.000,00 | 44.850.000,00 |

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.850.000,00 merupakan Investasi Non Permanen – Lainnya berupa penyaluran dana bergulir yang diberikan kepada kelompok peternak sapi melalui Dinas Peternakan dan Perikanan, yang terdiri dari:

| No | Nama Penerima Ternak Guliran | Tahun Perguliran | Saldo Buku | |
|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2022(Rp) |
| 1 | Ilham | 2019 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| 2 | Hairil Anwar | 2020 | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 |
| 3 | Fitri Ramadhani | 2020 | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 |
| 4 | Adi Yannor | 2021 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| Jumlah | | | 44.850.000,00 | 44.850.000,00 |

Rincian dari mutasi Investasi Non Permanen Lainnya dan Penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 8.

5.3.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---------------------------|---------------------------|
| (Rp) | (Rp) |
| 146.994.566.139,45 | 124.322.505.884,78 |

Investasi Permanen Kabupaten Tapin berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Nilai Investasi Permanen atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2022 dan 2021 pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah Kabupaten Tapin masing-masing sebesar Rp146.994.566.139,45 dan Rp124.322.505.884,78 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama BUMD | Persentase Kepemilikan (%) | 31 Desember 2021 (Rp) | Tambah / (Kurang) Tahun 2022 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) | Metode Perhitungan |
|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | Bank Kalsel | 3,16 | 42.442.328.939,00 | 0,00 | 42.442.328.939,00 | Biaya |
| 2 | BPR Tapin Selatan | 65,05 | 7.481.111.369,82 | 450.897.173,83 | 7.932.008.543,65 | Ekuitas |
| 3 | PDAM Kab. Tapin | 91,32 | 74.399.065.575,96 | 22.221.163.080,84 | 96.620.228.656,80 | Ekuitas |
| Jumlah | | | 124.322.505.884,78 | 22.672.060.254,67 | 146.994.566.139,45 | |

Untuk masing-masing penyertaan modal ke BUMD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2022 tidak terdapat penambahan jumlah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tapin pada Bank Kalimantan Selatan (Bank Kalsel), sehingga



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Desember 2022 tetap sebesar Rp42.442.328.939,00. Pencatatan atas penyertaan modal kepada Bank Kalsel menggunakan metode biaya perolehan (*cost method*) dengan persentase kepemilikan senilai 3,16 %. Pencatatan atas penyertaan modal kepada Bank Kalsel menggunakan metode biaya perolehan (*cost method*) dimana penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehannya, sedangkan dividen yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Pada tahun 2022 berdasarkan hasil RUPS atas Laporan Keuangan Tahun 2021 audited, Bank Kalsel telah memberikan deviden tunai sebesar Rp5.179.875.915,00 yang ditransfer pada tanggal 13 Maret 2022 yang telah dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah – Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

2. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan Mandiri Sejahtera (PT BPR Tapin Selatan) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995 juncto Nomor 9 Tahun 1996. Nomor 5 tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan, dan terakhir Peraturan Daerah No.14 Tahun 2017 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan rakyat di Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin yang sudah disertakan sebesar Rp1.767.411.122,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2010. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tapin ke PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera pada tahun 2022 senilai 65,05% pencatatan atas penyertaan modal menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera maka nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapin pada PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.932.008.543,65.

Laporan Keuangan PT BPR Tapin Selatan Tahun 2022 telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan dan 2021 telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodiq.

3. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin (PDAM Kabupaten Tapin) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1990. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapin yang sudah disertakan adalah sebesar Rp 99.973.330.241,00 yang terdiri dari penyerahan aset dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 4.580.705.241,00 yang kemudian menjadi penyertaan modal dari Kabupaten Tapin sebesar Rp 95.392.625.000,00 berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 tahun 2009, Peraturan daerah Kabupaten tapin Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 20 pjs Tahun 2012 dan Peraturan daerah Kabupaten tapin Nomor 8 Tahun 2015. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tapin tidak menambah penyertaan modalnya pada PDAM Kabupaten Tapin. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tapin ke PDAM Kabupaten Tapin sebesar 91,32%. Pencatatan atas penyertaan modal menggunakan metode ekuitas (*equity*



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

method). Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Tapin maka nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapin pada PDAM Kabupaten Tapin per 31 Desember 2022 sebesar Rp96.620.228.656,80.

Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Tapin Tahun 2022 telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak & Rekan dan 2021 telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Buntaran dan Lisawati. Laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Rincian mutasi dari Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Lampiran 9.

5.3.3. Aset Tetap

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| 2.372.882.176.622,71 | 2.084.789.585.614,66 |

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Tapin Per 31 Desember 2022 senilai Rp2.372.882.176.622,71 berasal dari nilai aset tetap per 31 Desember 2021 dan mutasi aset tetap selama Tahun Anggaran 2022. Penjelasan mutasi nilai aset tetap selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| Jenis Aset Tetap | Saldo 31 - 12 - 2021 (Rp) | Mutasi Tahun 2022 (Rp) | | Saldo 31 - 12 - 2022 (Rp) |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Tambah | Kurang | |
| Tanah | 459.531.680.582,68 | 26.677.739.000,00 | 17.296.595.000,00 | 468.912.824.582,68 |
| Peralatan dan Mesin | 384.302.483.962,49 | 74.220.883.686,00 | 14.096.860.444,80 | 444.426.507.203,69 |
| Gedung dan Bangunan | 1.115.184.145.989,58 | 338.760.880.346,47 | 215.838.775.036,00 | 1.238.106.251.300,05 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.806.019.963.294,51 | 302.631.609.467,00 | 14.857.671.515,00 | 2.093.793.901.246,51 |
| Aset Tetap Lainnya | 22.713.071.083,00 | 1.707.386.898,00 | 509.481.109,00 | 23.910.976.872,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 254.795.701.634,47 | 115.360.808.934,00 | 71.251.106.456,47 | 298.905.404.112,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (1.957.757.460.932,07) | (246.737.664.514,95) | (9.321.436.752,80) | (2.195.173.688.694,22) |
| Jumlah | 2.084.789.585.614,66 | 612.621.643.816,52 | 324.529.052.808,47 | 2.372.882.176.622,71 |

5.3.3.1. Tanah

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| 468.912.824.582,68 | 459.531.680.582,68 |

Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp468.912.824.582,68 dan Rp459.531.680.582,68. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2022 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. Saldo Awal | 459.531.680.582,68 | 446.957.018.257,68 |
| 2. Mutasi Penambahan | | |
| a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal | 3.450.800.000,00 | 13.781.914.000,00 |
| b. Hibah | 3.936.368.000,00 | 0,00 |
| c. Pencatatan kembali aset tetap tanah | 1.196.852.000,00 | 41.990.000,00 |
| d. Kapitalisasi | 69.354.000,00 | 187.517.000,00 |
| e. Reklasifikasi | 1.289.660.000,00 | 684.678.000,00 |
| f. Mutasi Unit Kerja | 16.734.705.000,00 | 10.610.576.123,00 |
| Jumlah Mutasi Penambahan | 26.677.739.000,00 | 25.306.675.123,00 |
| 3. Mutasi Pengurangan | | |
| a. Hibah | (561.890.000,00) | (93.665.250,00) |
| b. Koreksi | (0,00) | (2.027.771.425,00) |
| c. Mutasi Unit Kerja | (16.734.705.000,00) | (10.610.576.123,00) |
| Jumlah Mutasi Pengurangan | (17.296.595.000,00) | (12.732.012.798,00) |
| 4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3) | 468.912.824.582,68 | 459.531.680.582,68 |

Rincian mutasi aset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 10.1.

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---------------|--|--------------------------|--|
| 1. | Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal | 3.450.800.000,00 | Dis Perkimtan |
| 2. | Hibah | 3.936.368.000,00 | Dis Perkimtan, DinSos, Kec.Lokpaikat |
| 3. | Koreksi aset tetap yang tidak tercatat | 1.196.852.000,00 | Disdik, Kec.Piani dan Kec.Tapin Selatan |
| 4. | Kapitalisasi | 69.354.000,00 | Dis Perkimtan |
| 5. | Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan | 739.152.000,00 | Disdik |
| 6. | Reklas dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan | 550.508.000,00 | Disdik |
| 7. | Mutasi aset tetap dari SKPD lain | 16.734.705.000,00 | Setda |
| Jumlah | | 26.677.739.000,00 | |

Rincian dimuat dalam Lampiran 10.2

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2022 terdiri dari:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. | Hibah | 561.890.000,00 | Disdik dan Kec.Binuang |
| 2. | Mutasi aset tetap dari SKPD lain | 16.734.705.000,00 | DisPUPR dan DisPerpustakaan |
| Jumlah | | 17.296.595.000,00 | |

Rincian dimuat dalam lampiran 10.3

Informasi tambahan :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Terdapat satu persil aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Tapin yang bermasalah/tumpang tindih kepemilikan antara sertifikat Hak Pakai Nomor 07 Tahun 1995 atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Tapin dengan sertifikat Hak Milik Nomor 166 Tahun 1985 atas nama pemegang hak Hj.Norsehan binti Abdul Wahab (Alm). Tanah tersebut tercatat pada SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin, sebagaimana data di bawah ini :

| No. | Nama Barang | Luas (m2) | Tahun | Letak/ Alamat | Sertifikat | | Penggunaan | Asal Usul | Harga (RP) |
|-----|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------|------------|-------|------------------------------|-----------|----------------|
| | | | | | Tanggal | Nomor | | | |
| 1. | Tanah Bangunan Terminal Darat | 6.194 | 1995 | Jl.Jend.Sudirman Rantau | 21/09/1995 | 07 | Terminal angkutan antar kota | Pembelian | 371.640.000,00 |

Dalam hal sengketa tanah daerah tersebut, pihak ahli waris Hj.Norsehan binti Abdul Wahab (Alm) selaku penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pemerintah Kabupaten Tapin ke Pengadilan Negeri Rantau tertanggal 24 Juni 2021. Setelah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Rantau, akhirnya diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rta. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021. Dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rta, antara lain :

1. Menyatakan sebidang tanah berdasarkan gambar situasi surat ukur Nomor 39/1974 dalam sertifikat Hak Milik Nomor 166 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapin adalah milik para penggugat;
2. Menghukum tergugat dan atau siapapun yang menguasai dan mendapat hak dari sebidang tanah hak milik penggugat/objek sengketa yang telah digunakan dan dimanfaatkan oleh tergugat sebagai terminal angkutan umum yang terletak di jalan Jend. Sudirman Rantau Kabupaten Tapin, untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat sejumlah Rp457.596.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), apabila tergugat dan atau siapa pun yang menguasai dan mendapatkan hak dari padanya tidak menyerahkan tanah tersebut kepada para penggugat.

Proses hukum terhadap tanah tersebut saat ini yaitu penggugat dan tergugat melakukan proses banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

5.3.3.2. Peralatan dan Mesin

| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---------------------------|---------------------------|
| (Rp) | (Rp) |
| <u>444.426.507.203,69</u> | <u>384.302.483.962,49</u> |

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp444.426.507.203,69 dan Rp384.302.483.962,49.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 terdiri dari:

| Uraian | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. Saldo Awal | 384.302.483.962,49 | 337.821.273.598,41 |
| 2. Mutasi Penambahan | | |
| a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal | 70.914.035.623,00 | 54.642.456.139,00 |
| b. Koreksi | 0,00 | 137.144.500,00 |
| c. Hibah | 77.625.748,00 | 2.485.612.935,00 |
| d. Kapitalisasi | 34.265.000,00 | 45.420.000,00 |
| e. Reklasifikasi | 121.940.000,00 | 1.087.907.640,00 |
| f. Mutasi Unit Kerja | 3.073.017.315,00 | 1.032.119.671,00 |
| Jumlah | 74.220.883.686,00 | 59.430.660.885,00 |
| 3. Mutasi Pengurangan | | |
| a. Koreksi | (1.183.033.500,00) | (1.976.641.231,50) |
| b. Reklasifikasi | (5.344.130.330,80) | (7.175.416.623,42) |
| c. Mutasi Unit Kerja | (3.073.017.315,00) | (1.032.119.671,00) |
| d. Aset Ekstrakomtable | (2.830.445.299,00) | (2.765.272.995,00) |
| e. Kelebihan bayar | (2.432.000,00) | (0,00) |
| f. Penghapusan aset | (1.663.802.000,00) | (0,00) |
| Jumlah | (14.096.860.444,80) | (12.949.450.520,92) |
| 4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3) | 444.426.507.203,69 | 384.302.483.962,49 |

Rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran 11.1

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|-----|--|--------------------------|---|
| 1. | Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal | 70.914.035.623,00 | Sebanyak 44 SKPD |
| 2. | Hibah | 77.625.748,00 | Dishub dan Dis Perpustakaan |
| 3. | Kapitalisasi | 34.265.000,00 | Dinkes, Satpol PP, DPP KB, Dis Kominfo, Dis PMPTSP, Dis Perpustakaan, Dis Perdagangan dan Setda |
| 4. | Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan | 75.357.000,00 | Dis Budpar |
| 5. | Reklas dari aset tetap lainnya | 46.583.000,00 | Dis Budpar dan Kec.Tapin Tengah |
| 6. | Mutasi aset tetap dari SKPD lain | 3.073.017.315,00 | Disdik, RSUD, Satpol PP, Dinsos, DPPKB, Kdh, Kec.Hatungun dan Kec.CLU |
| | Jumlah | 74.220.883.686,00 | |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Rincian dimuat dalam lampiran 11.2

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 terdiri dari:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Koreksi <i>double</i> catat aset tetap | 253.197.000,00 | Disdik, Setda dan Set DPRD |
| 2. | Koreksi lebih catat aset tetap | 929.836.500,00 | Setda |
| 3. | Reklas ke aset tetap gedung dan bangunan | 1.014.569.994,00 | DisBudpar, Distan, Setda dan BKAD |
| 4. | Reklas ke aset lain-lain (kondisi rusak berat) | 4.263.626.336,80 | Sebanyak 26 SKPD |
| 5. | Reklas ke aset lainnya (aset yang akan dihibahkan) | 65.934.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6. | Mutasi aset tetap ke SKPD lain | 3.073.017.315,00 | Satpol PP, Kdh dan Setda |
| 7. | Barang ekstrakompatabel | 2.830.445.299,00 | Sebanyak 33 SKPD |
| 8. | Kelebihan bayar | 2.432.000,00 | Kec.Candi Laras Selatan |
| 9. | Penghapusan aset tetap | 1.663.802.000,00 | Dis PUPR, DLH dan Kec.CLU |
| Jumlah | | 14.096.860.444,80 | |

Rincian dimuat dalam lampiran 11.3

5.3.3.3. Gedung dan Bangunan

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| 1.238.106.251.300,05 | 1.115.184.145.989,58 |

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp1.238.106.251.300,05 dan Rp1.115.184.145.989,58. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 terdiri dari:

| Uraian | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Saldo Awal | 1.115.184.145.989,58 | 1.050.524.168.061,83 |
| 2. Mutasi Penambahan | | |
| a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal | 154.432.756.722,00 | 228.023.651.539,00 |
| b. Hibah | 3.734.796.100,00 | 4.675.051.875,00 |
| c. Kapitalisasi | 7.066.560.697,00 | 2.091.081.500,00 |
| d. Reklasifikasi | 67.169.721.496,47 | 11.115.078.736,75 |
| e. Mutasi Unit Kerja | 106.357.045.331,00 | 93.761.680.954,00 |
| Jumlah Mutasi Penambahan | 338.760.880.346,47 | 339.666.544.604,75 |
| 3. Mutasi Pengurangan | | |
| a. Koreksi | (0,00) | (575.444.900,00) |
| b. Hibah | (913.589.000,00) | (538.702.000,00) |
| c. Setor pengembalian belanja modal | (0,00) | (233.940.900,00) |
| d. Reklasifikasi | (108.568.140.705,00) | (179.896.797.923,00) |
| e. Mutasi Unit Kerja | (106.357.045.331,00) | (93.761.680.954,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Jumlah Mutasi Pengurangan | (215.838.775.036,00) | (275.006.566.677,00) |
| 4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3) | 1.238.106.251.300,05 | 1.115.184.145.989,58 |

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 12.1

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---------------|--|---------------------------|---|
| 1. | Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal | 154.432.756.722,00 | Sebanyak 22 SKPD |
| 2. | Hibah | 3.734.796.100,00 | Dishub |
| 3. | Kapitalisasi | 7.066.560.697,00 | Sebanyak 22 SKPD |
| 4. | Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin | 1.014.569.994,00 | DisBudpar, Distan, Setda dan BKAD |
| 5. | Reklas dari aset tetap KDP | 66.155.151.502,47 | Dinkes, DisPUPR, Distan dan Setda |
| 6. | Mutasi aset tetap dari SKPD lain | 106.357.045.331,00 | DLH, DisKomifo, Dis PMPTSP, Distan, Setda, BKAD dan Kec.Binuang |
| Jumlah | | 338.760.880.346,47 | |

Rincian dimuat dalam lampiran 12.2

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 terdiri dari:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---------------|--|---------------------------|---|
| 1. | Hibah | 913.589.000,00 | Dinkes dan Kec.Binuang |
| 2. | Reklas ke aset tetap tanah | 739.152.000,00 | Disdik |
| 3. | Reklas ke aset tetap peralatan dan mesin | 75.357.000,00 | DisBudpar |
| 4. | Reklas ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan | 1.928.282.885,00 | DisPora, Distan dan Set DPRD |
| 5. | Reklas ke aset tetap KDP | 102.211.467.319,00 | DisPUPR dan DisPora |
| 6. | Reklas ke aset lain-lain (kondisi rusak berat) | 1.779.998.600,00 | Disdik, Setda dan Kec.CLU |
| 7. | Reklas ke aset lainnya (aset yang akan dihibahkan) | 1.833.882.901,00 | Disdik |
| 8. | Mutasi aset tetap ke SKPD lain | 106.357.045.331,00 | Dis PUPR, BPBD, DisPerpustakaan, Setda dan BKAD |
| Jumlah | | 215.838.775.036,00 | |

Rincian dimuat dalam lampiran 12.3



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (Rp) | (Rp) |
| 2.093.793.901.246,51 | 1.806.019.963.294,51 |

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp2.093.793.901.246,51 dan Rp1.806.019.963.294,51.

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 terdiri dari :

| Uraian | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Saldo Awal | 1.806.019.963.294,51 | 1.634.351.241.517,51 |
| 2. Mutasi Penambahan | | |
| a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal | 252.793.986.263,00 | 143.322.591.761,00 |
| b. Hibah | 0,00 | 1.592.474.047,00 |
| c. Kapitalisasi | 39.261.098.365,00 | 33.126.823.400,00 |
| d. Reklasifikasi | 7.026.848.839,00 | 4.935.337.400,00 |
| e. Mutasi Unit Kerja | 3.549.676.000,00 | 41.910.000,00 |
| Jumlah | 302.631.609.467,00 | 183.019.136.608,00 |
| 3. Mutasi Pengurangan | | |
| a. Hibah | (0,00) | (466.244.119,00) |
| b. Koreksi | (0,00) | (213.798.395,00) |
| c. Reklasifikasi | (11.307.995.515,00) | (10.628.462.317,00) |
| d. Mutasi Unit Kerja | (3.549.676.000,00) | (41.910.000,00) |
| Jumlah | (14.857.671.515,00) | (11.350.414.831,00) |
| 4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3) | 2.093.793.901.246,51 | 1.806.019.963.294,51 |

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 13.1

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|-----|--|--------------------|---|
| 1. | Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal | 252.793.986.263,00 | Sebanyak 9 SKPD |
| 2. | Kapitalisasi | 39.261.098.365,00 | DisPUPR, DisPerkimtan, DisPemdes dan Distan |
| 3. | Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan | 1.928.282.885,00 | DisPora, Distan dan Set DPRD |
| 4. | Reklas dari aset tetap KDP | 5.095.954.954,00 | DisPUPR dan Distan |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---------------|--|---------------------------|------------|
| 5. | Reklas dari aset lain-lain (kondisi rusak berat) | 2.611.000,00 | DisPUPR |
| 6. | Mutasi aset tetap dari SKPD lain | 3.549.676.000,00 | Setda |
| Jumlah | | 302.631.609.467,00 | |

Rincian dimuat dalam Lampiran 13.2

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 terdiri dari :

| No. | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 1. | Reklas ke aset tetap tanah | 550.508.000,00 | Disdik |
| 2. | Reklas ke aset tetap KDP | 10.668.293.515,00 | DisPUPR |
| 3. | Reklas ke aset tidak berwujud | 89.194.000,00 | DisPUPR |
| 4. | Mutasi aset tetap ke SKPD lain | 3.549.676.000,00 | DisPUPR |
| Jumlah | | 14.857.671.515,00 | |

Rincian dimuat dalam lampiran 13.3

5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 23.910.976.872,00 | 22.713.071.083,00 |

Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp23.910.976.872,00 dan Rp 22.713.071.083,00.

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 terdiri dari:

| Uraian | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Saldo Awal | 22.713.071.083,00 | 16.293.148.714,00 |
| 2. Mutasi Penambahan | | |
| a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal | 1.607.898.898,00 | 2.463.242.169,00 |
| b. Kapitalisasi | 1.020.000,00 | 1.305.000,00 |
| c. Koreksi | 0,00 | 4.023.078.200,00 |
| d. Hibah | 98.468.000,00 | 325.550.000,00 |
| Jumlah | 1.707.386.898,00 | 6.813.175.369,00 |
| 3. Mutasi Pengurangan | | |
| a. Koreksi | (0,00) | (38.960.000,00) |
| b. Reklasifikasi | (162.513.109,00) | (354.293.000,00) |
| c. Penghapusan | (346.968.000,00) | (0,00) |
| Jumlah | (509.481.109,00) | (393.253.000,00) |
| 4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3) | 23.910.976.872,00 | 22.713.071.083,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 14.1.

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut::

| No. | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---------------|--|-------------------------|-----------------|
| 1. | Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal | 1.607.898.898,00 | Sebanyak 7 SKPD |
| 2. | Kapitalisasi | 1.020.000,00 | DisPerpustakaan |
| 3. | Hibah | 98.468.000,00 | DisPerpustakaan |
| Jumlah | | 1.707.386.898,00 | |

Rincian dimuat dalam lampiran 14.2.

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 terdiri dari :

| No. | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | Reklas ke aset tetap peralatan dan mesin | 46.583.000,00 | DisBudpar dan Kec.Tapin Tengah |
| 2. | Reklas ke aset lain-lain (kondisi rusak berat) | 115.930109,00 | DisPerkimtan |
| 3. | Penghapusan aset tetap | 346.968.000,00 | DisPUPR |
| Jumlah | | 509.481.109,00 | |

Rincian dimuat dalam lampiran 14.3

5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| 298.905.404.112,00 | 254.795.701.634,47 |

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp298.905.404.112 dan 254.795.701.634,47.

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:

| Uraian | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Saldo Awal | 254.795.701.634,47 | 72.712.563.295,47 |
| 2. Mutasi Penambahan | | |
| a. Kapitalisasi | 2.481.048.100,00 | 7.663.083.989,00 |
| b. Reklasifikasi | 112.879.760.834,00 | 188.453.602.600,00 |
| Jumlah | 115.360.808.934,00 | 196.116.686.589,00 |
| 3. Mutasi Pengurangan | | |
| a. Reklasifikasi | (71.251.106.456,47) | (14.033.548.250,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Jumlah | (71.251.106.456,47) | (14.033.548.250,00) |
| 4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3) | 298.905.404.112,00 | 254.795.701.634,47 |

Rician mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 15.1.

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---------------|--|---------------------------|-----------------------|
| 1. | Kapitalisasi | 2.481.048.100,00 | DisPUPR dan DisBudpar |
| 2. | Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan | 102.211.467.319,00 | DisPUPR dan DisPora |
| 3. | Reklas dari aset tetap JIJ | 10.668.293.515,00 | DisPUPR |
| Jumlah | | 115.360.808.934,00 | |

Rincian dimuat dalam lampiran 15.2

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdiri dari:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Reklas ke aset tetap gedung dan bangunan | 66.155.151.502,47 | Dinkes, DisPUPR, Distan dan Setda |
| 2. | Reklas ke aset tetap JIJ | 5.095.954.954,00 | DisPUPR dan Distan |
| Jumlah | | 71.251.106.456,47 | |

Rincian dimuat dalam lampiran 15.3

5.3.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
| (Rp) | (Rp) |
| (2.195.173.688.694,22) | (1.957.757.460.932,07) |

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp2.195.173.688.694,22) dan sebesar (Rp1.957.757.460.932,07) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Per 31 Desember 2022 (Rp) | Per 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | (292.560.311.841,99) | (261.766.860.799,92) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| | | | |
|----|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 2. | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | (584.368.096.009,80) | (523.132.312.488,72) |
| 3. | Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan | (1.318.245.280.842,43) | (1.172.858.287.643,43) |
| 4. | Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya | (0,00) | (0,00) |
| | Jumlah | (2.195.173.688.694,22) | (1.957.757.460.932,07) |

Penyusutan aset tetap dimulai tahun 2015, saldo penyusutan sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar (Rp1.957.757.460.932,07), penyusutan tersebut merupakan penyusutan s.d. 31 Desember 2021. Penyusutan s.d 31 Desember 2021 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2022 ditambah mutasi tambah dan dikurang mutasi kurang, sehingga saldo penyusutan tahun 2022 menjadi sebesar (Rp2.195.173.688.694,22). Untuk metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | Penyusutan s.d tahun 2021 | (1.957.757.460.932,07) |
| 2. | Beban penyusutan tahun 2022 | (246.737.664.514,95) |
| 3. | Mutasi tambah/Mutasi Kurang | 9.321.436.752,80 |
| | Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 | (2.195.173.688.694,22) |

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 16.

- a. Akumulasi penyusutan setelah penambahan beban penyusutan dan mutasi tambah tahun 2022

| No | Jenis Aset Tetap | Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2021 | Beban Penyusutan Tahun 2022 | Mutasi Tambah | Akumulasi Penyusutan (setelah ditambah Beban Penyusutan dan Mutasi Tambah) |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| 1. | Peralatan dan Mesin | 261.766.860.799,92 | 37.766.960.994,87 | 0,00 | 299.533.821.794,79 |
| 2. | Gedung dan Bangunan | 523.132.312.488,72 | 63.583.710.321,08 | 0,00 | 586.716.022.809,80 |
| 3. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.172.858.287.643,43 | 145.386.993.199,00 | 0,00 | 1.318.245.280.842,43 |
| | Jumlah | 1.957.757.460.932,07 | 246.737.664.514,95 | 0,00 | 2.204.495.125.447,02 |

- b. Akumulasi penyusutan per 31 Desember Tahun 2022

| No | Jenis Aset Tetap | Akumulasi Penyusutan (setelah ditambah Beban Penyusutan dan Mutasi Tambah) | Mutasi Kurang | | | | Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 |
|----|---------------------|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | Hibah | Reklas ke Aset Lainnya | Penghapusan | Lebih Catat | |
| 1. | Peralatan dan Mesin | 299.533.821.794,79 | 0,00 | 5.671.704.452,80 | 364.969.000,00 | 936.836.500,00 | 292.560.311.841,99 |
| 2. | Gedung dan Bangunan | 586.716.022.809,80 | 455.417.000,00 | 1.892.509.800,00 | 0,00 | 0,00 | 584.368.096.009,80 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Jenis Aset Tetap | Akumulasi Penyusutan (setelah ditambah Beban Penyusutan dan Mutasi Tambah) | Mutasi Kurang | | | | Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 |
|---------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | Hibah | Reklas ke Aset Lainnya | Penghapusan | Lebih Catat | |
| 3. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.318.245.280.842,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318.245.280.842,43 |
| Jumlah | | 2.204.495.125.447,02 | 455.417.000,00 | 7.564.214.252,80 | 364.969.000,00 | 936.836.500,00 | 2.195.173.688.694,22 |

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 untuk setiap SKPD adalah sebagai berikut :

| No | SKPD | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | 217.192.742.198,81 | 199.700.994.370,81 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 63.247.665.831,05 | 58.165.573.758,18 |
| 3 | RSUD Datu Sanggul | 94.675.262.482,00 | 78.933.512.921,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.279.333.698.858,34 | 1.155.748.000.064,34 |
| 5 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 21.322.813.016,85 | 19.704.458.729,85 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran | 2.819.328.172,00 | 2.527.824.613,00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8.288.084.258,00 | 7.156.994.690,00 |
| 8 | Dinas Sosial | 1.830.134.093,00 | 1.202.996.608,00 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | 2.212.355.610,00 | 2.073.913.710,00 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3.099.716.646,00 | 2.556.152.303,00 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 4.943.781.738,60 | 4.755.077.824,60 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 24.834.280.918,15 | 22.311.521.002,15 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.851.718.329,00 | 2.950.367.168,00 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 5.470.319.080,00 | 4.221.871.629,00 |
| 15 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7.231.165.383,00 | 6.073.628.229,00 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 26.960.535.461,00 | 23.467.674.606,00 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2.586.957.569,00 | 1.774.180.510,00 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 18.705.067.760,00 | 16.789.307.781,00 |
| 19 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 86.039.575.970,00 | 75.022.992.760,00 |
| 20 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 4.322.858.848,99 | 3.601.600.443,99 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3.812.309.365,00 | 3.523.036.094,00 |
| 22 | Dinas Perikanan | 13.051.523.171,95 | 11.901.676.604,95 |
| 23 | Dinas Pertanian | 34.896.350.451,43 | 32.348.121.663,15 |
| 24 | Dinas Perdagangan | 76.952.971.383,00 | 68.512.248.090,00 |
| 25 | Dinas Perindustrian | 2.615.765.777,00 | 2.436.941.671,00 |
| 26 | KDH & Wakil KDH | 0,00 | 18.229.135.318,00 |
| 27 | Sekretariat Daerah | 128.241.115.127,05 | 82.573.001.928,05 |
| 28 | Sekretariat DPRD | 12.454.606.687,00 | 10.650.607.675,00 |
| 29 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 5.732.099.836,00 | 5.569.393.405,00 |
| 30 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3.391.798.589,00 | 3.832.244.129,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | SKPD | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 31 | Badan Pendapatan Daerah | 2.022.246.387,00 | 1.808.248.464,00 |
| 32 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7.557.267.451,00 | 6.945.473.074,00 |
| 33 | Inspektorat | 3.529.470.146,00 | 3.505.264.779,00 |
| 34 | Kecamatan Lokpaikat | 1.277.181.863,00 | 1.165.038.252,00 |
| 35 | Kecamatan Piani | 1.643.438.684,00 | 1.402.751.856,00 |
| 36 | Kecamatan Hatungun | 1.403.383.127,00 | 1.163.202.093,00 |
| 37 | Kecamatan Tapin Utara | 1.897.280.714,00 | 1.576.338.340,00 |
| 38 | Kecamatan Binuang | 2.905.002.538,00 | 2.003.322.448,00 |
| 39 | Kecamatan Bakarangan | 1.698.351.557,00 | 1.266.280.248,00 |
| 40 | Kecamatan Candi Laras Selatan | 931.829.974,00 | 567.011.231,00 |
| 41 | Kecamatan Candi Laras Utara | 1.987.008.151,00 | 1.777.227.003,00 |
| 42 | Kecamatan Tapin Selatan | 2.243.191.041,00 | 1.244.950.615,00 |
| 43 | Kecamatan Salam Babaris | 1.852.487.052,00 | 1.459.753.605,00 |
| 44 | Kecamatan Tapin Tengah | 1.168.052.942,00 | 1.102.938.113,00 |
| 45 | Kecamatan Bungur | 2.209.194.232,00 | 1.760.450.173,00 |
| 46 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 731.700.224,00 | 694.160.338,00 |
| Jumlah | | 2.195.173.688.694,22 | 1.957.757.460.932,07 |

5.3.4. Aset Lainnya

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 65.064.577.747,79 | 13.279.895.607,67 |

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp65.064.577.747,79 dan Rp13.279.895.607,67 terdiri dari:

| No. | Uraian | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Tagihan Jangka Panjang | 2.225.392.206,00 | 2.225.392.206,00 |
| | - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 2.225.392.206,00 | 2.225.392.206,00 |
| 2. | Aset Lainnya | 54.375.846.439,72 | 0,00 |
| 3. | Aset Tidak Berwujud | 7.222.332.973,40 | 8.483.715.228,00 |
| | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (5.617.094.280,00) | (6.728.088.233,00) |
| | Aset Tidak Berwujud (Netto) | 1.605.238.693,40 | 1.755.626.995,00 |
| 4. | Aset Lain-lain | 30.291.601.844,27 | 35.189.657.734,87 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | (23.433.501.435,60) | (25.890.781.328,20) |
| | Aset Lain-Lain (Netto) | 6.858.100.408,67 | 9.298.876.406,67 |
| Jumlah | | 65.064.577.747,79 | 13.279.895.607,67 |

5.3.4.1. Tagihan Jangka Panjang

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 2.225.392.206,00 | 2.225.392.206,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.225.392.206,00 merupakan saldo Tagihan/Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp 1.564.500.292,00 dan Tagihan Ganti Kerugian Daerah karena adanya penyimpangan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan daerah sebesar 660.891.914,00.

5.3.4.1.1. Tuntutan Perbendaharaan

| | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | 1.564.500.292,00 | 1,564,500,292.00 |

Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.535.885.785,00, dengan rincian sebagai berikut;

| No | Uraian | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Pemotongan dana operasional Puskesmas dan Biaya Lainnya, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tapin Nomor 700/06-LHP-RiksusTim/INSP/2008 tanggal 14 April 2008 | 28.614.507,00 | 28.614.507,00 |
| 2 | Kerugian Daerah pada pengeluaran keuangan Tahun Anggaran 2007 di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, sesuai Surat Penetapan Kasus Kerugian Daerah dari BPK-RI Nomor: 46/S/II/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 | 1.535.885.785,00 | 1.535.885.785,00 |
| Jumlah | | 1.564.500.292,00 | 1.564.500.292,00 |

Rincian dari mutasi Tuntutan Perbendaharaan dapat dilihat pada Lampiran 17.1.

5.3.4.1.2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

| | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | 660.891.914,00 | 660.891.914,00 |

Tuntutan ganti kerugian keuangan daerah adalah tagihan atas adanya penyimpangan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan daerah dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Pengeluaran honorarium tim/panitia yang diberikan lebih dari dua kegiatan tidak disertai bukti pertanggungjawaban, sesuai LHP BPK Tahun 2006. | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 2 | Pengeluaran Kegiatan Muspida tidak sesuai ketentuan, sesuai LHP BPK tahun 2006. | 245.642.714,00 | 245.642.714,00 |
| 3 | Realisasi biaya pungut upah PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin tidak sesuai ketentuan, sesuai LHP BPK Tahun 2006. | 335.249.200,00 | 335.249.200,00 |
| Jumlah | | 660.891.914,00 | 660.891.914,00 |

Rincian dari mutasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada Lampiran 17.2



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.3.4.2. Aset Lainnya

| | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|--|--------------------------|-------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 54.375.846.439,72 | 0,00 |

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp54.375.846.439,72 dan Rp0,00. Aset Lainnya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat yang dibayarkan secara *non-tunai* yang disimpan pada *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Bank Indonesia serta remunerasi dari saldo DBH *non-tunai* pada Rekening TDF Bank Indonesia. Sebelumnya saldo DBH *non-tunai* dicatat sebagai setara Kas kemudian dicatat sebagai Aset Lainnya sesuai dengan SE Kemendagri no. 900.1.14.1/7481/Keuda tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | DBH <i>non-tunai</i> Pemerintah Pusat pada TDF | 54.362.661.841,00 | 0,00 |
| 2 | Remunerasi TDF | 13.184.598,72 | 0,00 |
| | Jumlah | 54.375.846.439,72 | 0,00 |

5.3.4.3. Aset Tak Berwujud

| | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 7.222.332.973,40 | 8.483.715.228,00 |

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp7.222.332.973,40 dan Rp8.483.715.228,00 merupakan saldo Aset Tidak Berwujud berupa Lisensi, Software, Website, Database dan Hasil Kajian (DED) yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

| No. | SKPD | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | 0,00 | 542.844.710,00 |
| 2 | RSUD Datu Sanggul | 503.300.000,00 | 503.300.000,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 422.461.500,00 | 1.546.257.500,00 |
| 4 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 520.235.000,00 | 520.235.000,00 |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 644.508.986,00 | 644.508.986,00 |
| 6 | Dinas Ketahanan Pangan | 110.260.000,00 | 110.260.000,00 |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup | 87.355.000,00 | 87.355.000,00 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 38.000.000,00 | 18.463.636,00 |
| 9 | Dinas Perhubungan | 233.482.482,00 | 233.482.482,00 |
| 10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 205.050.000,00 | 165.900.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | SKPD | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 138.817.514,00 | 138.817.514,00 |
| 12 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 13 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 370.185.342,00 | 267.843.000,00 |
| 14 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 47.850.000,00 | 47.850.000,00 |
| 15 | Dinas Perdagangan | 34.788.000,00 | 34.788.000,00 |
| 16 | Sekretariat Daerah | 186.490.000,00 | 186.490.000,00 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 1.050.000.000,00 | 900.000.000,00 |
| 18 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 1.536.285.049,40 | 1.491.450.300,00 |
| 19 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 186.960.000,00 | 186.960.000,00 |
| 20 | Badan Pendapatan Daerah | 287.786.100,00 | 287.786.100,00 |
| 21 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 393.775.000,00 | 393.775.000,00 |
| 22 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran | 16.160.000,00 | 16.160.000,00 |
| 23 | Dinas Pertanian | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 |
| 24 | Dinas Perindustrian | 36.688.000,00 | 36.688.000,00 |
| 25 | Dinas Perikanan | 49.395.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 7.222.332.973,40 | 8.483.715.228,00 |

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 18.1.

Rincian jenis Aset Tidak Berwujud pada beberapa SKPD adalah sebagai berikut:

| No. | SKPD | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | Goodwill | | |
| 1 | Dinas Pendidikan | 0,00 | 460.706.987,00 |
| 2 | RSUD Datu Sanggul | 129.395.000,00 | 129.395.000,00 |
| 3 | Dinas Ketahanan Pangan | 110.260.000,00 | 110.260.000,00 |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 95.370.000,00 | 95.370.000,00 |
| 6 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 129.706.250,00 | 129.706.250,00 |
| 7 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 26.350.000,00 | 26.350.000,00 |
| 8 | Dinas Perdagangan | 22.788.000,00 | 22.788.000,00 |
| 9 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 722.742.300,00 | 722.742.300,00 |
| Sub jumlah | | 1.244.111.550,00 | 1.704.818.537,00 |
| | Lisensi dan Frenchise | | |
| 1 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | SKPD | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|
| | Sub jumlah | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 |
| | Software | | |
| 1 | Dinas Pendidikan | 0,00 | 82.137.723,00 |
| 2 | RSUD Datu Sanggul | 373.905.000,00 | 373.905.000,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 327.590.500,00 | 526.967.500,00 |
| 4 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran | 16.160.000,00 | 16.160.000,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 25.732.486,00 | 25.732.486,00 |
| 7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 38.000.000,00 | 18.463.636,00 |
| 8 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 205.050.000,00 | 165.900.000,00 |
| 9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9.111.264,00 | 9.111.264,00 |
| 10 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 11 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 211.742.342,00 | 109.400.000,00 |
| 12 | Dinas Pertanian | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 |
| 13 | Sekretariat Daerah | 186.490.000,00 | 186.490.000,00 |
| 14 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 173.460.000,00 | 173.460.000,00 |
| 15 | Badan Pendapatan Daerah | 287.786.100,00 | 287.786.100,00 |
| 16 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 393.775.000,00 | 393.775.000,00 |
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup | 74.855.000,00 | 74.855.000,00 |
| 18 | Dinas Perdagangan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 |
| 20 | Dinas Perindustrian | 36.688.000,00 | 36.688.000,00 |
| 21 | Dinas Perikanan | 49.395.000,00 | 0,00 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 44.834.749,40 | 0,00 |
| | Sub jumlah | 2.620.575.441,40 | 2.646.831.709,00 |
| | Kajian | | |
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 94.871.000,00 | 1.019.290.000,00 |
| 2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 618.776.500,00 | 618.776.500,00 |
| 3 | Dinas Lingkungan Hidup | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 158.443.000,00 | 158.443.000,00 |
| 5 | Sekretariat DPRD | 1.050.000.000,00 | 900.000.000,00 |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 768.708.000,00 | 768.708.000,00 |
| 7 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 510.235.000,00 | 510.235.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | SKPD | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|-----|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8 | Dinas Perhubungan | 138.112.482,00 | 138.112.482,00 |
| | Sub jumlah | 3.344.145.982,00 | 4.118.564.982,00 |
| | Jumlah semua | 7.222.332.973,40 | 8.483.715.228,00 |

5.3.4.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| (5.617.094.280,00) | (6.728.088.233,00) |

Saldo nilai akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp5.617.094.280,00 dan Rp6.728.088.233,00. Perhitungan nilai amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 20 tahun untuk Lisensi, Hak Cipta dan Hak Paten, sedangkan untuk Aset Tidak Berwujud seperti *Software, Website, Database, Hasil Kajian/Penelitian* dengan masa manfaat selama 5 tahun. Penyajian nilai akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 pada beberapa SKPD adalah sebagai berikut:

| No | SKPD | Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2021 (Rp) | Beban Amortisasi (Rp) | Mutasi Kurang(Rp) | Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2022 (Rp) |
|----|--|--|-----------------------|-------------------|--|
| 1 | Dinas Pendidikan | 542.844.710,00 | 0,00 | 542.844.710,00 | 0,00 |
| 2 | RSUD Datu Sanggul | 490.606.666,00 | 7.035.000,00 | 0,00 | 497.641.666,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.320.996.958,00 | 62.487.250,00 | 1.212.990.000,00 | 170.494.208,00 |
| 4 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 222.597.917,00 | 102.047.000,00 | 0,00 | 324.644.917,00 |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 533.535.195,00 | 65.682.383,00 | 0,00 | 599.217.578,00 |
| 6 | Dinas Ketahanan Pangan | 110.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.260.000,00 |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup | 47.432.333,00 | 14.971.000,00 | 0,00 | 62.403.333,00 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16.463.636,00 | 600.000,00 | 15.463.636,00 | 1.600.000,00 |
| 9 | Dinas Perhubungan | 152.916.867,00 | 27.622.496,00 | 0,00 | 180.539.363,00 |
| 10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 94.766.667,00 | 18.813.333,00 | 0,00 | 113.580.000,00 |
| 11 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 138.817.514,00 | 0,00 | 0,00 | 138.817.514,00 |
| 12 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 13 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 180.929.082,00 | 45.567.251,00 | 0,00 | 226.496.333,00 |
| 14 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 29.575.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 33.875.000,00 |
| 15 | Dinas Perdagangan | 26.188.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 28.588.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | SKPD | Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2021 (Rp) | Beban Amortisasi (Rp) | Mutasi Kurang(Rp) | Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2022 (Rp) |
|---------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|
| 16 | Sekretariat Daerah | 127.498.335,00 | 24.716.666,00 | 0,00 | 152.215.001,00 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 596.250.000,00 | 143.750.001,00 | 0,00 | 740.000.001,00 |
| 18 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 1.478.416.968,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 1.481.816.968,00 |
| 29 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 100.563.667,00 | 34.692.000,00 | 0,00 | 135.255.667,00 |
| 20 | Badan Pendapatan Daerah | 219.452.767,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 239.452.767,00 |
| 21 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 212.362.084,00 | 48.352.333,00 | 0,00 | 260.714.417,00 |
| 22 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran | 10.234.667,00 | 3.232.000,00 | 0,00 | 13.466.667,00 |
| 23 | Dinas Pertanian | 66.933.333,00 | 23.300.000,00 | 0,00 | 90.233.333,00 |
| 24 | Dinas Perindustrian | 2.445.867,00 | 7.335.680,00 | 0,00 | 9.781.547,00 |
| 25 | Dinas Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 6.728.088.233,00 | 660.304.393,00 | 1.771.298.346,00 | 5.617.094.280,00 |

Aset tidak berwujud per tahun perolehan serta amortisasinya disajikan pada Lampiran 19

5.3.4.5. Aset Lain-Lain

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 30.291.601.844,27 | 35.189.657.734,87 |

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp30.291.601.844,27 dan Rp35.189.657.734,87 yang merupakan nilai aset yang berasal dari hasil reklasifikasi aset tetap yang sudah tidak berfungsi mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tapin, antara lain karena kondisi rusak berat dengan rincian per SKPD adalah sebagai berikut:

| No | SKPD | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|----|--|------------------|------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | 9.228.220.322,00 | 8.594.063.150,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 4.265.747.436,00 | 4.723.581.436,00 |
| 3 | RSUD Datu Sanggul | 462.503.500,00 | 462.503.500,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 49.107.000,00 | 4.353.329.000,00 |
| 5 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 674.891.381,00 | 336.298.750,00 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran | 326.657.480,00 | 319.657.480,00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 211.671.005,00 | 0,00 |
| 8 | Dinas Sosial | 82.712.000,00 | 19.164.000,00 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | 30.238.000,00 | 30.238.000,00 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 21.932.000,00 | 22.270.000,00 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 680.307.500,00 | 631.728.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | SKPD | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 182.462.750,00 | 116.528.750,00 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 19.996.750,00 | 62.500.545,00 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 91.396.000,00 | 73.146.000,00 |
| 15 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.147.547.082,00 | 1.079.968.573,00 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 920.210.700,00 | 2.064.109.700,00 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 277.514.197,00 | 214.022.091,00 |
| 19 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 574.230.726,67 | 141.840.976,67 |
| 20 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 533.044.819,00 | 678.778.569,00 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 99.119.227,00 | 73.960.922,00 |
| 22 | Dinas Perikanan | 1.295.123.163,80 | 1.295.123.163,80 |
| 23 | Dinas Pertanian | 2.356.903.514,80 | 2.442.850.725,40 |
| 24 | Dinas Perdagangan | 1.199.063.318,00 | 1.199.063.318,00 |
| 25 | Dinas Perindustrian | 123.547.000,00 | 78.272.000,00 |
| 26 | KDH & Wakil KDH | 876.294.354,00 | 1.075.031.366,00 |
| 27 | Sekretariat Daerah | 1.496.201.629,00 | 1.769.091.629,00 |
| 28 | Sekretariat DPRD | 0,00 | 693.400.250,00 |
| 29 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 249.870.858,00 | 115.196.400,00 |
| 30 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 518.570.470,00 | 330.463.390,00 |
| 31 | Badan Pendapatan Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 200.568.200,00 | 200.568.200,00 |
| 33 | Inspektorat | 172.142.279,00 | 12.532.100,00 |
| 34 | Kecamatan Lokpaikat | 186.886.727,00 | 175.316.000,00 |
| 35 | Kecamatan Piani | 83.020.000,00 | 137.562.000,00 |
| 36 | Kecamatan Hatungun | 238.051.000,00 | 122.644.000,00 |
| 37 | Kecamatan Tapin Utara | 42.343.000,00 | 122.471.000,00 |
| 38 | Kecamatan Binuang | 64.002.705,00 | 0,00 |
| 39 | Kecamatan Bakarangan | 95.548.000,00 | 95.548.000,00 |
| 40 | Kecamatan Candi Laras Selatan | 192.165.550,00 | 283.909.550,00 |
| 41 | Kecamatan Candi Laras Utara | 218.021.000,00 | 150.781.000,00 |
| 42 | Kecamatan Tapin Selatan | 144.124.000,00 | 209.180.000,00 |
| 43 | Kecamatan Salam Babaris | 189.378.200,00 | 206.046.200,00 |
| 44 | Kecamatan Tapin Tengah | 92.530.000,00 | 92.530.000,00 |
| 45 | Kecamatan Bungur | 290.038.000,00 | 290.038.000,00 |
| 46 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 87.699.000,00 | 94.350.000,00 |
| Jumlah | | 30.291.601.844,27 | 35.189.657.734,87 |

Rincian mutasi Aset Lain-lain dapat dilihat pada Lampiran 20.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.3.4.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

| | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | (23.433.501.435,60) | (25.890.781.328,20) |

Saldo akumulasi penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp23.433.501.435,60 dan Rp25.890.781.328,20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per SKPD adalah sebagai berikut:

| No | SKPD | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|----|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | (4.582.222.884,00) | (3.581.964.884,00) |
| 2 | Dinas Kesehatan | (3.814.690.446,00) | (4.272.524.446,00) |
| 3 | RSUD Datu Sanggul | (432.408.944,00) | (432.408.944,00) |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | (49.107.000,00) | (2.652.160.248,00) |
| 5 | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | (558.248.247,00) | (336.298.750,00) |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran | (325.357.480,00) | (318.357.480,00) |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | (161.253.005,00) | (0,00) |
| 8 | Dinas Sosial | (79.545.334,00) | (19.164.000,00) |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | (30.238.000,00) | (30.238.000,00) |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | (21.805.959,00) | (22.143.959,00) |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | (677.971.146,00) | (629.391.646,00) |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | (115.593.416,00) | (115.593.416,00) |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | (19.996.750,00) | (62.500.545,00) |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | (91.396.000,00) | (73.146.000,00) |
| 15 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | (1.133.289.714,00) | (1.073.977.740,00) |
| 16 | Dinas Perhubungan | (775.297.676,00) | (1.361.677.676,00) |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | (0,00) | (0,00) |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | (277.514.197,00) | (214.022.091,00) |
| 19 | Dinas Pemuda dan Olahraga | (566.250.699,00) | (138.191.540,00) |
| 20 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | (279.433.113,00) | (403.663.481,00) |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | (99.119.227,00) | (73.960.922,00) |
| 22 | Dinas Perikanan | (1.154.985.056,80) | (1.154.985.056,80) |
| 23 | Dinas Pertanian | (1.987.251.514,80) | (2.033.499.696,40) |
| 24 | Dinas Perdagangan | (1.130.638.568,00) | (1.130.638.568,00) |
| 25 | Dinas Perindustrian | (73.487.950,00) | (9.712.950,00) |
| 26 | KDH & Wakil KDH | (0,00) | (905.830.449,00) |
| 27 | Sekretariat Daerah | (2.089.587.479,00) | (1.602.758.941,00) |
| 28 | Sekretariat DPRD | (0,00) | (693.400.250,00) |
| 29 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | (243.245.858,00) | (115.196.400,00) |
| 30 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | (506.967.483,00) | (324.785.403,00) |
| 31 | Badan Pendapatan Daerah | (0,00) | (0,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | SKPD | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 32 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | (196.130.492,00) | (196.130.492,00) |
| 33 | Inspektorat | (171.697.604,00) | (12.087.425,00) |
| 34 | Kecamatan Lokpaikat | (186.886.727,00) | (175.316.000,00) |
| 35 | Kecamatan Piani | (80.532.889,00) | (135.074.889,00) |
| 36 | Kecamatan Hatungun | (232.238.500,00) | (122.644.000,00) |
| 37 | Kecamatan Tapin Utara | (41.993.000,00) | (122.121.000,00) |
| 38 | Kecamatan Binuang | (64.002.705,00) | (0,00) |
| 39 | Kecamatan Bakarangan | (95.448.000,00) | (95.448.000,00) |
| 40 | Kecamatan Candi Laras Selatan | (163.041.740,00) | (251.685.740,00) |
| 41 | Kecamatan Candi Laras Utara | (160.969.000,00) | (150.281.000,00) |
| 42 | Kecamatan Tapin Selatan | (143.257.332,00) | (204.080.000,00) |
| 43 | Kecamatan Salam Babaris | (189.378.200,00) | (206.046.200,00) |
| 44 | Kecamatan Tapin Tengah | (53.285.100,00) | (53.285.100,00) |
| 45 | Kecamatan Bungur | (290.038.000,00) | (290.038.000,00) |
| 46 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | (87.699.000,00) | (94.350.000,00) |
| Jumlah | | (23.433.501.435,60) | (25.890.781.328,20) |

Rincian mutasi tambah, mutasi kurang dan akumulasi penyusutan aset lain-lain dapat dilihat pada Lampiran 21.

5.3.5. Kewajiban

5.3.5.1. Kewajiban Jangka Pendek

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------------------|--------------------------|
| 112.761.476.488,06 | 59.450.822.606,53 |

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp112.761.476.488,06 dan Rp59.450.822.606,53 yang terdiri dari:

| No | Uraian | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 58.831.163.012,00 | 0,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka | 176.151.232,06 | 181.439.855,53 |
| 4 | Utang Belanja | 663.627.766,00 | 380.498.201,00 |
| 5 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 53.090.534.478,00 | 58.888.884.550,00 |
| Jumlah | | 112.761.476.488,06 | 59.450.822.606,53 |

Penjelasan untuk masing-masing jenis Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.4.2.8.1 Pendapatan Diterima Dimuka

| | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | 176.151.232,06 | 181.439.855,53 |

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp176.151.232,06 dan Rp181.439.855,53 yang terdiri dari:

| No | SKPD | Uraian | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Badan Pendapatan Daerah | Ijin Reklame | 165.802.752,60 | 136.133.964,77 |
| | | Pemakaian Kekayaan Daerah | 3.929.794,53 | 2.563.150,68 |
| 2 | Dinas Perhubungan | Ijin Trayek dan KIR | 2.418.684,93 | 4.512.740,08 |
| | | Pemakaian Kekayaan Daerah | 0,00 | 22.050.000,00 |
| 3 | RSUD Datu Sanggul | Pemakaian Kekayaan Daerah | 4.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| 4 | Dinas Perdagangan | Pemakaian Kekayaan Daerah | 0,00 | 180.000,00 |
| Jumlah | | | 176.151.232,06 | 181.439.855,53 |

Rincian dari mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 22.

5.4.2.8.1 Utang Belanja

| | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | 663.627.766,00 | 380.498.201,00 |

Utang Belanja merupakan kewajiban yang timbul sampai dengan 31 Desember 2022 namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp663.627.766,00 dan Rp380.498.201,00. Saldo Utang Beban Tahun 2022 merupakan Utang Beban Barang Jasa yaitu kewajiban atas pembayaran beban listrik, telepon serta serta pembayaran barang dan jasa lainnya pada 45 SKPD yang terdiri dari:

| No | Uraian | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Listrik | 390.184.518,00 | 141.166.691,00 |
| 2 | Belanja Air | 63.153.000,00 | 33.840.652,00 |
| 3 | Belanja Telepon | 14.932.141,00 | 16.415.585,00 |
| 4 | Belanja Internet | 32.558.107,00 | 26.275.273,00 |
| 5 | Belanja Jasa Pelayanan | 162.800.000,00 | 162.800.000,00 |
| Jumlah | | 663.627.766,00 | 380.498.201,00 |

Rincian mutasi Utang Belanja dari seluruh SKPD dapat dilihat pada Lampiran 23.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.4.2.8.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|--------------------------|--------------------------|
| (Rp) | (Rp) |
| 53.090.534.478,00 | 58.888.884.550,00 |

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp53.090.534.478,00 dan Rp58.888.884.550,00. Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.090.534.478,00 merupakan saldo Utang Transfer Pemerintah Pusat dan Utang BLUD pada RSUD Datu Sanggul yang terdiri atas utang pembelian obat, utang jasa pelayanan medis dan BBM untuk mobil *ambulance*.

Rincian dari Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

5.3.5.1.3.1. Utang Transfer Pemerintah Pusat

| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|--------------------------|--------------------------|
| (Rp) | (Rp) |
| 47.507.394.392,00 | 51.355.266.702,00 |

Saldo Utang Lebih Salur Dana Transfer per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp47.507.394.392,00 dan Rp51.355.266.702,00 yang merupakan Utang Transfer atas lebih salur dana bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) dari Pemerintah Pusat yang diakui Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2022, yang terdiri atas:

| No | Uraian | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|-----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| 1 | DBH SDA Minerba | 46.828.560.956,00 | 50.893.968.760,00 |
| 2 | DBH PBB | 502.635.572,00 | 49.144.282,00 |
| 3 | DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi | 0,00 | 251.734.700,00 |
| 4 | DBH SDA Perikanan | 173.472.924,00 | 157.694.020,00 |
| 5 | DBH SDA Kehutanan | 2.724.940,00 | 2.724.940,00 |
| | Jumlah | 47.507.394.392,00 | 51.355.266.702,00 |

Rincian dari Utang Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada Lampiran 24.

5.3.5.1.3.2. Utang Badan Layanan Umum Daerah

| 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|-------------------------|-------------------------|
| (Rp) | (Rp) |
| 5.583.140.086,00 | 7.533.617.848,00 |

Saldo Utang Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.583.140.086,00 dan Rp7.533.617.848,00. Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.583.140.086,00 merupakan saldo Utang BLUD pada RSUD Datu



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Sanggul yang terdiri atas utang pembelian obat, utang jasa pelayanan medis dan BBM untuk mobil ambulance, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kreditur | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | PT. ANTAR MITRA SEMBADA | 28.871.100,00 | 2.376.000,00 |
| 2 | PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | 199.669.645,00 | 14.927.892,00 |
| 3 | PT. ANUGRAH ARGON MEDICA | 158.762.702,00 | 21.366.298,00 |
| 4 | PT. BANUA INSAN MANDIRI | 150.629.220,00 | 0,00 |
| 5 | PT. BANUA INSAN MANDIRI | 150.629.220,00 | 0,00 |
| 6 | PT. BINA SAN PRIMA | 62.760.074,00 | 3.564.990,00 |
| 7 | PT. BORNEO PERKASA MEDIKA | 29.274.030,00 | 194.596.050,00 |
| 8 | PT. BORNEO SEJAHTERA MEDIKA | 6.339.210,00 | 0,00 |
| 9 | PT. DAYA MUDA AGUNG | 11.225.238,00 | 2.351.250,00 |
| 10 | PT. DOS NI ROHA | 0,00 | 48.881.250,00 |
| 11 | PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING | 54.756.466,00 | 20.080.881,00 |
| 12 | PT. EUREKA SUKSES ABADI | 9.157.500,00 | 0,00 |
| 13 | PT. GLOPER PRIMA MANDIRI | 6.646.707,00 | 0,00 |
| 14 | PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI | 45.238.704,00 | 17.534.000,00 |
| 15 | PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA | 12.953.397,00 | 4.352.501,00 |
| 16 | PT. KALIMANTAN JAYA MEDIKA | 21.318.660,00 | 0,00 |
| 17 | PT. KALLISTA PRIMA | 0,00 | 5.275.050,00 |
| 18 | PT. KEBAYORAN PHARMA | 15.966.950,00 | 12.210.000,00 |
| 19 | PT. KIMIA FARMA | 37.252.877,00 | 13.859.351,00 |
| 20 | PT. MENSA BINA SUKSES | 72.924.641,00 | 3.790.187,00 |
| 21 | PT. MERAPI UTAMA PHARMA | 70.719.221,00 | 10.226.225,00 |
| 22 | PT. MILLENNIUM PHARMACONT INT | 87.736.966,00 | 42.384.299,00 |
| 23 | PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI | 0,00 | 35.189.000,00 |
| 24 | PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI | 42.779.400,00 | 0,00 |
| 25 | PT. PARIT PADANG GLOBAL | 24.997.124,00 | 24.309.856,00 |
| 26 | PT. PENTAVALENT | 27.111.595,00 | 18.841.727,00 |
| 27 | PT. RAJAWALI NUSINDO | 63.582.158,00 | 4.186.619,00 |
| 28 | PT. SAMATOR | 68.154.000,00 | 13.200.000,00 |
| 29 | PT. SAPTA SARI TAMA | 21.345.046,00 | 2.227.500,00 |
| 30 | PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA | 66.167.100,00 | 0,00 |
| 31 | PT. SURYA BORNEO HIGIENIS | 0,00 | 10.296.000,00 |
| 32 | PT. TEMPO | 0,00 | 2.428.650,00 |
| 33 | PT. TIGAMAS PUTERA | 106.628.265,00 | 22.902.339,00 |
| 34 | PT. TRI SAPTA JAYA | 1.690.235,00 | 5.940.000,00 |
| 35 | PT. UNITED DICO CITAS | 0,00 | 17.241.984,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Kreditur | 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 36 | PT. YAMHATEVY PARAN MANDIRI | 0,00 | 100.100.000,00 |
| 37 | Jasa Pelayanan Umum | 562.267.670,00 | 208.036.992,00 |
| 38 | Jasa Pelayanan BPJS | 3.088.042.925,00 | 958.198.805,00 |
| 39 | Jasa Pelayanan BPJS (Covid-19) | 272.758.910,00 | 5.689.831.372,00 |
| 40 | BBM Ambulance | 4.783.130,00 | 2.910.780,00 |
| Jumlah | | 5.583.140.086,00 | 7.533.617.848,00 |

Rincian dari Utang Badan Layanan Umum Daerah dapat dilihat pada Lampiran 25.

5.4.2.8.1 Bagian Lancar-Utang Jangka Panjang

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 58.831.163.012,00 | 0,00 |

Saldo Bagian Lancar-Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp58.831.163.012,00 dan 0,00. Saldo Bagian Lancar-Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 seluruhnya merupakan bagian dari Utang Jangka Panjang kepada Lembaga keuangan bukan bank atau BUMN yaitu ke PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI).

5.3.5.2. Kewajiban Jangka Panjang

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|
| 73.538.955.088,00 | 109.921.012.750,00 |

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp73.538.955.088,00 dan Rp109.921.012.750,00. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 seluruhnya merupakan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

5.4.2.8.1 Utang Jangka Panjang Lainnya

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|
| 73.538.955.088,00 | 132.370.118.100,00 |

Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp73.538.955.088,00 dan Rp132.370.118.100,00. Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 seluruhnya merupakan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan pinjaman daerah kepada Lembaga keuangan bukan bank atau BUMN yaitu ke PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI) dengan tujuan Pembangunan Rumah Sakit Umum Baru Kelas C. Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 8 Tanggal 25 Februari 2020, Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan pinjaman kepada PT. SMI dengan plafond sebesar Rp148.657.565.500,00 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

- a. Konstruksi Bangunan (Fisik) sebesar Rp125.000.000.000,00; dan
- b. Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) sebesar Rp23.657.565.500,00.

Selanjutnya berdasarkan perubahan perjanjian terakhir yaitu Perubahan Ketiga Perjanjian Pinjaman Pembiayaan No. PERJ-115/SMI/0922 tanggal 14 September 2022, posisi pinjaman Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar Rp145.225.874.494,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| a. Saldo utang tahun 2021 | : | Rp109.921.012.750,00 |
| b. Penambahan di tahun 2022 | : | Rp35.304.861.744,00 |
| c. Total (a+b) | : | Rp145.225.874.494,00 |
| d. Pembayaran pokok di tahun 2022 | : | (Rp12.855.756.394,00) |
| e. Saldo utang tahun 2022 (c-d) | : | Rp132.370.118.100,00 |

Terdiri dari:

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | : | Rp58.831.163.012,00 |
| - Utang Jangka Panjang | : | Rp73.538.955.088,00 |

5.3.6. Ekuitas

| 31 Desember 2022 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>2.735.979.070.146,75</u> | <u>2.249.460.756.434,27</u> |

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tapin yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai setelah dikurangi hak pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak Pihak Ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) ini disusun untuk menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah Kabupaten Tapin yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Tapin mengalami surplus sebesar Rp267.093.290.016,35 atau mengalami kenaikan sebesar Rp325.447.060.795,80 atau naik 557,71% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mengalami defisit sebesar Rp58.353.770.779,45. Adapun surplus defisit LO tahun 2022 dan 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|----|---|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional | 272.371.748.657,35 | (54.266.136.861,45) |
| 2 | Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | (3.119.054.099,00) | (2.892.206.644,00) |
| 3 | Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa | 269.252.694.558,35 | (57.158.343.505,45) |
| 4 | Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa | (2.159.404.542,00) | (1.195.427.274,00) |
| 5 | Surplus/Defisit-LO | 267.093.290.016,35 | (58.353.770.779,45) |

Masing-masing uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Surplus-LO dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp272.371.748.657,35
Jumlah tersebut merupakan selisih dari Pendapatan-LO dari kegiatan operasional Tahun 2022 sebesar Rp1.538.954.366.012,28 dengan beban kegiatan operasional Tahun 2022 sebesar Rp1.266.582.617.354,93.
- b. Defisit dari kegiatan Non Operasional Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.119.054.099,00.
Jumlah tersebut merupakan selisih antara penjumlahan Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.119.054.099,00 pada Tahun 2022 dengan penjumlahan Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00, Defisit atas Ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.
- c. Surplus sebelum Pos Luar Biasa Rp269.252.694.558,35
Jumlah tersebut merupakan penjumlahan Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp272.371.748.657,35 dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.119.054.099,00.
- d. Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp2.159.404.542,00
Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Luar Biasa-LO sebesar Rp0,00 dengan Beban Luar Biasa-LO sebesar Rp2.159.404.542,00 selama Tahun 2022.
- e. Defisit-LO sebesar Rp267.093.290.016,35
Jumlah tersebut merupakan penjumlahan Surplus sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2022 sebesar Rp269.252.694.558,35 dengan Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2022 sebesar Rp2.159.404.542,00.

Penjelasan untuk masing-masing Pos Laporan Operasional akan diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kegiatan Operasional

5.4.1. Pendapatan-LO

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.538.954.366.012,28 | 1.107.909.981.496,70 |

Rincian Pendapatan-LO Tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Pendapatan-LO | Realisasi Tahun 2022 (Rp) | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) |
|----|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah-LO | 96.549.367.104,06 | 120.202.590.427,60 | (23.653.223.323,54) |
| 2 | Pendapatan Transfer-LO | 1.399.133.796.089,02 | 956.449.273.271,10 | 442.684.522.817,92 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO | 43.271.202.819,20 | 31.258.117.798,00 | 12.013.085.021,20 |
| | Jumlah | 1.538.954.366.012,28 | 1.107.909.981.496,70 | 431.044.384.515,58 |

Kenaikan Pendapatan Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp431.044.384.515,58 disebabkan adanya penurunan dan kenaikan pendapatan sebagai berikut:

1. Penurunan Pendapatan Pajak daerah sebesar Rp2.634.596.275,87;
2. Kenaikan Pendapatan Retribusi daerah sebesar Rp2.086.927.700,29;
3. Kenaikan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.121.688.467,58;
4. Penurunan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp24.227.243.215,54;
5. Kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp382.614.768.171,00;
6. Kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp60.069.754.646,92;
7. Kenaikan Pendapatan Hibah sebesar Rp8.484.435.286,20; dan
8. Kenaikan lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp3.528.649.735,00.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|
| 96.549.367.104,06 | 120.202.590.427,60 |

PAD Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp96.549.367.104,06 dan Rp120.202.590.427,60. Terdapat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 sebesar Rp23.653.223.323,54 atau turun 19,68%. Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah-LO | 27.809.858.714,64 | 30.444.454.990,51 | (2.634.596.275,87) |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah-LO | 4.940.653.674,53 | 2.853.725.974,24 | 2.086.927.700,29 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 6.299.846.918,94 | 5.178.158.451,36 | 1.121.688.467,58 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 57.499.007.795,95 | 81.726.251.011,49 | (24.227.243.215,54) |
| | Jumlah | 96.549.367.104,06 | 120.202.590.427,60 | (23.653.223.323,54) |

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LO dengan LRA (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 27.809.858.714,64 | 27.427.262.028,47 | 382.596.686,17 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 4.940.653.674,53 | 4.003.044.421,23 | 937.609.253,30 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.299.846.918,94 | 5.179.875.915,00 | 1.119.971.003,94 |
| 4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 57.499.007.795,95 | 56.276.195.042,23 | 1.222.812.753,72 |
| | Jumlah | 96.549.367.104,06 | 92.886.377.406,93 | 3.662.989.697,13 |

Penjelasan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah -LO

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 27.809.858.714,64 | 30.444.454.990,51 |

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp27.809.858.714,64 dan Rp30.444.454.990,51. Terdapat penurunan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp2.634.596.275,87 atau 8.65%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pajak Hotel | 119.725.200,00 | 86.744.135,00 | 32.981.065,00 |
| 2 | Pajak Restoran | 3.874.588.848,00 | 2.298.401.288,32 | 1.576.187.559,68 |
| 3 | Pajak Hiburan | 73.229.175,00 | 6.216.000,00 | 67.013.175,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 512.713.267,66 | 606.427.728,24 | (93.714.460,58) |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 12.022.163.886,00 | 9.724.108.710,75 | 2.298.055.175,25 |
| 6 | Pajak Parkir | 48.047.700,00 | 39.041.233,50 | 9.006.466,50 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 29.775.400,00 | 10.837.400,00 | 18.938.000,00 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00 |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 4.348.958.255,98 | 6.318.373.470,70 | (1.969.415.214,72) |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 2.221.843.995,00 | 2.193.989.846,00 | 27.854.149,00 |
| 11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 4.549.312.987,00 | 9.160.315.178,00 | (4.611.002.191,00) |
| | Jumlah | 27.809.858.714,64 | 30.444.454.990,51 | (2.634.596.275,87) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Pajak- LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Pajak Hotel | 119.725.200,00 | 119.725.200,00 | 0,00 |
| 2 | Pajak Restoran | 3.874.588.848,00 | 3.874.588.848,00 | 0,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | 73.229.175,00 | 73.229.175,00 | 0,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 512.713.267,66 | 542.382.055,49 | (29.668.787,83) |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 12.022.163.886,00 | 12.022.163.886,00 | 0,00 |
| 6 | Pajak Parkir | 48.047.700,00 | 48.047.700,00 | 0,00 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 29.775.400,00 | 29.775.400,00 | 0,00 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 4.348.958.255,98 | 4.348.958.255,98 | 0,00 |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 2.221.843.995,00 | 1.809.578.521,00 | 412.265.474,00 |
| 11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 4.549.312.987,00 | 4.549.312.987,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 27.809.858.714,64 | 27.427.262.028,47 | 382.596.686,17 |

Selisih lebih Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA tahun 2022 sebesar Rp382.596.686,17 terdiri dari:

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Pajak Daerah LRA | | | 27.427.262.028,47 |
| 1. Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dan Pengurangan atas Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka s/d Tahun 2021 Pada Pajak Reklame | 147.189.382,95 | (176.858.170,78) | (29.668.787,83) |
| 2. Penambahan Piutang Tahun 2022 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2021 Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan | 1.321.341.369,00 | (909.075.895,00) | 412.265.474,00 |
| Pendapatan Pajak Daerah LO | 1.468.530.751,95 | (1.085.934.065,78) | 27.809.858.714,64 |

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 4.940.653.674,53 | 2.853.725.974,24 |

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.940.653.674,53 dan Rp2.853.725.974,24. Terdapat kenaikan Pendapatan Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Daerah –LO Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp2.086.927.700,29 atau 73.13%.
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 503.281.000,00 | 625.428.202,00 | (122.147.202,00) |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 579.717.000,00 | 48.391.000,00 | 531.326.000,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 47.450.000,00 | 37.600.000,00 | 9.850.000,00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 51.972.000,00 | 7.300.000,00 | 44.672.000,00 |
| 5 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 145.827.000,00 | 134.043.000,00 | 11.784.000,00 |
| 6 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 902.373.356,15 | 532.107.349,32 | 370.266.006,83 |
| 7 | Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan | 1.880.152.950,00 | 967.220.000,00 | 912.932.950,00 |
| 8 | Retribusi Terminal | 396.552.000,0 | 156.682.000,00 | 239.870.000,00 |
| 9 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 109.600.000,00 | 89.200.000,00 | 20.400.000,00 |
| 10 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 10.875.000,00 | 9.700.000,00 | 1.175.000,00 |
| 11 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 6.200.000,00 | 2.442.500,00 | 3.757.500,00 |
| 12 | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah | 42.504.000,00 | 63.937.500,00 | (21.433.500,00) |
| 13 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 261.805.313,23 | 149.522.173,00 | 112.283.140,23 |
| 14 | Retribusi Izin Trayek | 2.344.055,15 | 3.278.108,92 | (934.053,77) |
| 15 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0,00 | 26.874.141,00 | (26.874.141,00) |
| | Jumlah | 4.940.653.674,53 | 2.853.725.974,24 | 2.086.927.700,29 |

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Pendapatan Retribusi Daerah | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|---|------------------|----------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 503.281.000,00 | 503.281.000,00 | 0,00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 579.717.000,00 | 579.717.000,00 | 0,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 47.450.000,00 | 47.450.000,00 | 0,00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 51.972.000,00 | 51.972.000,00 | 0,00 |
| 5 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 145.827.000,00 | 145.827.000,00 | 0,00 |
| 6 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 902.373.356,15 | 923.122.000,00 | (20.748.643,85) |
| 7 | Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan | 1.880.152.950,00 | 923.889.108,00 | 956.263.842,00 |
| 8 | Retribusi Terminal | 396.552.000,00 | 396.552.000,00 | 0,00 |
| 9 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 109.600.000,00 | 109.600.000,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Pendapatan Retribusi Daerah | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 10 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 10.875.000,00 | 10.875.000,00 | 0,00 |
| 11 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 0,00 |
| 12 | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah | 42.504.000,00 | 42.504.000,00 | 0,00 |
| 13 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 261.805.313,23 | 261.805.313,23 | 0,00 |
| 14 | Retribusi Izin Trayek | 2.344.055,15 | 250.000,00 | 2.094.055,15 |
| 15 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 4.940.653.674,53 | 4.003.044.421,23 | 937.609.253,30 |

Selisih lebih Pendapatan Retribusi Daerah LO dengan LRA tahun 2022 sebesar Rp937.609.253,30 terdiri dari:

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan Retribusi Daerah LRA | | | 4.003.044.421,23 |
| 1. Penambahan Piutang Tahun 2022 dan Pengurangan atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2021 Pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah Dan Bangunan | 27.847.000,00 | (69.279.000,00) | (41.432.000,00) |
| 2. Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dan Pengurangan atas Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka s/d Tahun 2021 Pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah | 24.661.676,70 | (3.978.320,55) | 20.683.356,15 |
| 3. Penambahan piutang tahun 2022 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2021 Pada Retribusi Pasar Grosir Pertokoan | 1.359.633.842,00 | (403.670.000,00) | 956.263.842,00 |
| 4. Penambahan atas Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka s/d Tahun 2022 dan Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 Pada Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 2.300.630,49 | (206.575,34) | 2.094.055,15 |
| Pendapatan Retribusi Daerah LO | 1.414.443.149,19 | (477.133.895,89) | 4.940.653.674,53 |

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 6.299.846.918,94 | 5.178.158.451,36 |

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.299.846.918,94 dan Rp5.178.158.451,36. Terdapat kenaikan Hasil



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp1.121.688.467,58 atau naik 21,66%. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bank Kalsel | 5.179.875.915,00 | 4.701.395.003,00 | 478.480.912,00 |
| 2 | BPR Tapin Selatan | 553.270.055,12 | 476.763.448,36 | 76.506.606,76 |
| 3 | PDAM Tapin | 566.700.948,82 | 0,00 | 566.700.948,82 |
| | Jumlah | 6.299.846.918,94 | 5.178.158.451,36 | 1.121.688.467,58 |

Perbandingan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 5.733.145.970,12 | 5.179.875.915,00 | 553.270.055,12 |
| 2 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) | 566.700.948,82 | 0,00 | 566.700.948,82 |
| | Jumlah | 6.299.846.918,94 | 5.179.875.915,00 | 1.119.971.003,94 |

Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dengan LRA tahun 2022 sebesar Rp1.119.971.003,94 terdiri dari:

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA | | | 5.179.875.915,00 |
| 1. Penambahan Pengakuan atas kenaikan nilai investasi pada BPR Tapin Selatan Tahun 2022 Pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 553.270.055,12 | (0,00) | 553.270.055,12 |
| 2. Penambahan Pengakuan atas kenaikan nilai investasi pada PDAM Tapin Tahun 2022 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) | 566.700.948,82 | (0,00) | 566.700.948,82 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO | 1.119.971.003,94 | (0,00) | 6.299.846.918,94 |

5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>57.499.007.795,95</u> | <u>81.726.251.011,49</u> |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp57.499.007.795,95 dan Rp81.726.251.011,49. Terdapat penurunan Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp24.227.243.215,54 atau turun 29,64%. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 537.821.000,00 | 7.142.000,00 | 530.679.000,00 |
| 2 | Penerimaan Jasa Giro | 3.478.514.285,95 | 10.244.600.686,33 | (6.766.086.400,38) |
| 3 | Pendapatan Bunga | 13.184.598,72 | 0,00 | 13.184.598,72 |
| 4 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1.170.891.202,33 | 41.547.609,82 | 1.129.343.592,51 |
| 5 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 401.385.750,00 | 104.760.181,00 | 296.625.569,00 |
| 6 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 31.290.120,00 | 0,00 | 31.290.120,00 |
| 7 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | 247.062.500,00 | 0,00 | 247.062.500,00 |
| 8 | Pendapatan dari Pengembalian | 270.980.926,00 | 1.063.945.475,00 | (792.964.549,00) |
| 9 | Pendapatan dari BLUD | 43.210.025.780,46 | 61.269.633.862,13 | (18.059.608.081,67) |
| 10 | Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) | 0,00 | 522.749.819,00 | (522.749.819,00) |
| 11 | Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya | 8.137.851.632,49 | 2.582.603.249,21 | 5.555.248.383,28 |
| 12 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 0,00 | 5.889.268.129,00 | (5.889.268.129,00) |
| | Jumlah | 57.499.007.795,95 | 81.726.251.011,49 | (24.227.243.215,54) |

Penjelasan atas selisih antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Lain-lain PAD yang Sah-LO | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|---|------------------|------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 537.821.000,00 | 537.821.000,00 | 0,00 |
| 2 | Penerimaan Jasa Giro | 3.478.514.285,95 | 3.478.514.285,95 | 0,00 |
| 3 | Pendapatan Bunga | 13.184.598,72 | 0,00 | 13.184.598,72 |
| 4 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1.170.891.202,33 | 1.170.891.202,33 | 0,00 |
| 5 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 401.385.750,00 | 401.385.750,00 | 0,00 |
| 6 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 31.290.120,00 | 31.290.120,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Lain-lain PAD yang Sah-LO | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 7 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | 247.062.500,00 | 247.062.500,00 | |
| 8 | Pendapatan dari Pengembalian | 270.980.926,00 | 270.980.926,00 | 0,00 |
| 9 | Pendapatan dari BLUD | 43.210.025.780,46 | 41.766.456.725,46 | 1.443.569.055,00 |
| 10 | Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya | 8.137.851.632,49 | 8.371.792.532,49 | (233.940.900,00) |
| 12 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 0,00 | 0,00 | |
| Jumlah | | 57.499.007.795,95 | 56.276.195.042,23 | 1.222.812.753,72 |

Pada Tahun 2022 Pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan di Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO. Sedangkan untuk Tahun 2021 dianggarkan di Lain-lain PAD yang Sah-LO. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022. Sehingga untuk Tahun 2022 di Lain-lain PAD yang Sah-LO tidak terdapat realisasi. Selisih Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dengan LRA tahun 2022 sebesar Rp1.222.812.753,72 terdiri dari:

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA | | | 56.276.195.042,23 |
| 1. Penambahan Piutang Tahun 2022 serta Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2021 serta Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 Pada Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 3.129.908.217,00 | (1.686.339.162,00) | 1.443.569.055,00 |
| 2. Pengurangan atas Pelunasan Piutang Uang Muka Tahun 2022 Pada Dinas Pertanian | 0,00 | (233.940.900,00) | (233.940.900,00) |
| 3. Penambahan Pendapatan Bunga atas Remunerasi Pada Rekening TDF-TKD sesuai SE Kemendagri no. 900.1.14.1/7481/Keuda pada BEPENDA Tahun 2022 | 13.184.598,72 | (0,00) | 13.184.598,72 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO | 3.143.092.815,72 | (1.920.280.062,00) | 57.499.007.795,95 |

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1.399.133.796.089,02 | 956.449.273.271,10 |

Pendapatan Transfer-LO untuk Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.399.133.796.089,02 dan Rp956.449.273.271,10. Terdapat kenaikan Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp 442.684.522.817,92 atau naik 46,28%. Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.257.160.455.312,00 | 874.545.687.141,00 | 382.614.768.171,00 |
| 2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 141.973.340.777,02 | 81.903.586.130,10 | 60.069.754.646,92 |
| | Jumlah | 1.399.133.796.089,02 | 956.449.273.271,10 | 442.684.522.817,92 |

Penjelasan masing-masing Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1.257.160.455.312,00 | 874.545.687.141,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO untuk Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.257.160.455.312,00 dan Rp874.545.687.141,00. Terdapat kenaikan Pendapatan Transfer Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp382.614.768.171,00 atau naik 43,75%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | 1.251.566.248.312,00 | 811.326.553.141,00 | 440.239.695.171,00 |
| 2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah | 5.594.207.000,00 | 63.219.134.000,00 | (57.624.927.000,00) |
| | Jumlah | 1.257.160.455.312,00 | 874.545.687.141,00 | 382.614.768.171,00 |

Penjelasan masing-masing Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.251.566.248.312,00 dan Rp811.326.553.141,00. Terdapat kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp440.239.695.171,00 atau naik 64,82%. Rincian Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Dana Bagi Hasil | 707.093.553.009,00 | 245.007.552.390,00 | 462.086.000.619,00 |
| 2 | Dana Alokasi Umum | 414.513.383.682,00 | 416.699.835.000,00 | (2.186.451.318,00) |
| 3 | Dana Alokasi Khusus | 129.959.311.621,00 | 149.619.165.751,00 | (19.659.854.130,00) |
| | Jumlah | 1.251.566.248.312,00 | 811.326.553.141,00 | 440.239.695.171,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.251.566.248.312,00 merupakan pendapatan bagi hasil dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2022.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 untuk Pemerintah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil

Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp707.093.553.009,00 dan Rp245.007.552.390,00. Terdapat kenaikan Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp462.086.000.619,00. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

1) Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp38.087.825.737,00 dan Rp77.726.525.923,00. Terdapat penurunan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp39.638.700.186,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Bagi Hasil Pajak | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | 29.968.696.267,00 | 70.773.879.299,00 | (40.805.183.032,00) |
| 2 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan | 8.119.091.495,00 | 6.952.646.000,00 | 1.166.445.495,00 |
| 3 | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 37.975,00 | 624,00 | 37.351,00 |
| | Jumlah | 38.087.825.737,00 | 77.726.525.923,00 | (39.638.700.186,00) |

Perbandingan antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Bagi Hasil Pajak | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | 29.968.696.267,00 | 34.959.418.583,00 | (4.990.722.316,00) |
| 2 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan | 8.119.091.495,00 | 7.225.320.000,00 | 893.771.495,00 |
| 3 | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 37.975,00 | 0,00 | 37.975,00 |
| | Jumlah | 38.087.825.737,00 | 42.184.738.583,00 | (4.096.912.846,00) |

Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dengan LRA tahun 2022 sebesar Rp4.096.912.846,00 terdiri dari:

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|----------------|--------------------|--------------------------|
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA | | | 42.184.738.583,00 |
| 1. Pengurangan atas Realisasi Kurang Bayar 2021 berdasarkan KMK no.29/KM.7/2022 tahun 2022 pada DBH-PBB | 0,00 | (4.990.722.316,00) | (4.990.722.316,00) |
| 2. Penambahan atas Pendapatan DBH Transfer Pusat Non-Tunai | 856.998.973,00 | 0,00 | 856.998.973,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Treasury Deposit Facility BI Tahun 2022 pada DBH PPh Pasal 21 | | | |
| 3. Penambahan atas Pendapatan DBH Transfer Pusat Non-Tunai Treasury Deposit Facility BI Tahun 2022 pada DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 | 36.772.522,00 | 0,00 | 36.772.522,00 |
| 4. Penambahan atas Pendapatan DBH Transfer Pusat Non-Tunai Treasury Deposit Facility BI Tahun 2022 pada DBH CHT | 37.975,00 | 0,00 | 37.975,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO | 893.809.470,00 | (4.990.722.316,00) | 38.087.825.737,00 |

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp669.005.727.272,00 dan Rp167.281.026.467,00. Terdapat kenaikan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp501.724.700.805,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan | 117.392.024,00 | 307.010.314,00 | (189.618.290,00) |
| 2 | Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) | 666.628.617.737,00 | 165.547.842.703,00 | 501.080.775.034,00 |
| 3 | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan | 2.170.064.211,00 | 1.357.619.150,00 | 812.445.061,00 |
| 4 | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi | 89.653.300,00 | 68.554.300,00 | 21.099.000,00 |
| | Jumlah | 669.005.727.272,00 | 167.281.026.467,00 | 501.724.700.805,00 |

Perbandingan antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan | 117.392.024,00 | 105.937.000,00 | 11.455.024,00 |
| 2 | Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) | 666.628.617.737,00 | 767.915.114.855,00 | (101.286.497.118,00) |
| 3 | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan | 2.170.064.211,00 | 1.958.311.000,00 | 211.753.211,00 |
| 4 | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi | 89.653.300,00 | 363.567.992,00 | (273.914.692,00) |
| | Jumlah | 669.005.727.272,00 | 770.342.930.847,00 | (101.337.203.575,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Selisih Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam LO dengan LRA tahun 2022 sebesar Rp101.337.203.575,00 terdiri dari:

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam LRA | | | 770.342.930.847,00 |
| 1. Pengurangan atas Realisasi Kurang Bayar 2021 berdasarkan KMK no.29/KM.7/2022 tahun 2022 dan KMK No 37/KM.7/2022 tahun 2022 pada DBH - SDA Minerba (Royalti) | 0,00 | (101.286.497.118,00) | (101.286.497.118,00) |
| 2. Pengurangan atas Realisasi Kurang Bayar tahun 2021 berdasarkan KMK no.29/KM.7/2022 tahun 2022 pada DBH - SDA Minyak Bumi | 0,00 | (273.914.692,00) | (273.914.692,00) |
| 3. Penambahan atas Pendapatan DBH Transfer Pusat Non-Tunai Treasury Deposit Facility BI Tahun 2022 pada DBH SDA Kehutanan | 11.455.024,00 | 0,00 | 11.455.024,00 |
| 4. Penambahan atas Pendapatan DBH Transfer Pusat Non-Tunai Treasury Deposit Facility BI Tahun 2022 pada DBH SDA Perikanan | 211.753.211,00 | 0,00 | 211.753.211,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam LO | 223.208.235,00 | (101.560.411.810,00) | 669.005.727.272,00 |

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun 2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Umum sebesar Rp414.513.383.682,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp416.699.835.000,00. Terdapat penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Umum Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp2.186.451.318,00. Pendapatan operasional yang berasal dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 untuk Pemerintah Kabupaten Tapin telah diterima seluruhnya pada Tahun 2022. Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Dana Alokasi Umum | 414.513.383.682,00 | 416.699.835.000,00 | (2.186.451.318,00) |
| Jumlah | 414.513.383.682,00 | 416.699.835.000,00 | (2.186.451.318,00) |

Perbandingan antara Dana Alokasi Umum (DAU) LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| Dana Alokasi Umum (DAU) | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | LO | LRA | |
| Dana Alokasi Umum | 414.513.383.682,00 | 414.513.383.682,00 | 0,00 |
| Jumlah | 414.513.383.682,00 | 414.513.383.682,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada Tahun 2022, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Khusus sebesar Rp129.959.311.621,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp149.619.165.751,00. Terdapat penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp19.659.854.130,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

| No | Dana Alokasi Khusus | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Dana Alokasi Khusus Fisik | 72.575.115.655,00 | 77.454.455.569,00 | (4.879.339.914,00) |
| | a. Pendidikan | 11.850.013.700,00 | 25.891.252.690,00 | (14.041.238.990,00) |
| | b. Jalan | 18.204.197.400,00 | 9.258.185.000,00 | 8.946.012.400,00 |
| | c. Irigasi | 3.635.543.250,00 | 6.543.687.000,00 | (2.908.143.750,00) |
| | d. Air Minum | 7.237.459.000,00 | 8.467.674.865,00 | (1.230.215.865,00) |
| | e. Sanitasi | 5.083.428.993,00 | 4.334.600.000,00 | 748.828.993,00 |
| | f. Kesehatan | 6.071.385.947,00 | 18.932.462.966,00 | (12.861.077.019,00) |
| | g. Kelautan Dan Perikanan | 0,00 | 1.092.136.000,00 | (1.092.136.000,00) |
| | h. Pertanian | 20.493.087.365,00 | 2.934.457.048,00 | 17.558.630.317,00 |
| 2 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 57.384.195.966,00 | 72.164.710.182,00 | (14.780.514.216,00) |
| | a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) | 0,00 | 3.866.468.000,00 | (3.866.468.000,00) |
| | b. Tunjangan Profesi Guru | 45.186.139.260,00 | 55.302.213.000,00 | (10.116.073.740,00) |
| | c. Tambahan Penghasilan Guru | 1.431.999.500,00 | 1.080.938.000,00 | 351.061.500,00 |
| | d. Bantuan Operasional Kesehatan | 6.362.831.833,00 | 4.497.844.536,00 | 1.864.987.297,00 |
| | e. Bidang Keluarga Berencana | 2.259.544.973,00 | 2.896.853.391,00 | (637.308.418,00) |
| | f. Tunjangan Khusus Guru | 577.919.400,00 | 594.075.145,00 | (16.155.745,00) |
| | g. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 0,00 | 938.526.110,00 | (938.526.110,00) |
| | h. BOP Pendidikan Kesetaraan | 501.600.000,00 | 2.652.619.000,00 | (2.151.019.000,00) |
| | i. Fasilitasi Penanaman Modal | 234.481.000,00 | 0,00 | 234.481.000,00 |
| | j. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 451.800.000,00 | 0,00 | 451.800.000,00 |
| | k. Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 377.880.000,00 | 0,00 | 377.880.000,00 |
| | l. Dana Bantuan BLPS | 0,00 | 335.173.000,00 | (335.173.000,00) |
| | Jumlah | 129.959.311.621,00 | 149.619.165.751,00 | (19.659.854.130,00) |

Perbandingan antara Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Dana Alokasi Khusus | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Dana Alokasi Khusus Fisik | 72.575.115.655,00 | 72.575.115.655,00 | 0,00 |
| | a. Pendidikan | 11.850.013.700,00 | 11.850.013.700,00 | 0,00 |
| | b. Jalan | 18.204.197.400,00 | 18.204.197.400,00 | 0,00 |
| | c. Irigasi | 3.635.543.250,00 | 3.635.543.250,00 | 0,00 |
| | d. Air Minum | 7.237.459.000,00 | 7.237.459.000,00 | 0,00 |
| | e. Sanitasi | 5.083.428.993,00 | 5.083.428.993,00 | 0,00 |
| | f. Kesehatan | 6.071.385.947,00 | 6.071.385.947,00 | 0,00 |
| | g. Kelautan Dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | h. Pertanian | 20.493.087.365,00 | 20.493.087.365,00 | 0,00 |
| 2 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 57.384.195.966,00 | 57.384.195.966,00 | 0,00 |
| | a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) | 0,00 | 382.800.000,00 | (382.800.000,00) |
| | b. Tunjangan Profesi Guru | 45.186.139.260,00 | 45.186.139.260,00 | 0,00 |
| | c. Tambahan Penghasilan Guru | 1.431.999.500,00 | 1.431.999.500,00 | 0,00 |
| | d. Bantuan Operasional Kesehatan | 6.362.831.833,00 | 6.362.831.833,00 | 0,00 |
| | e. Bidang Keluarga Berencana | 2.259.544.973,00 | 2.259.544.973,00 | 0,00 |
| | f. Tunjangan Khusus Guru | 577.919.400,00 | 577.919.400,00 | 0,00 |
| | g. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | h. BOP Pendidikan Kesetaraan | 501.600.000,00 | 118.800.000,00 | 382.800.000,00 |
| | i. Fasilitasi Penanaman Modal | 234.481.000,00 | 234.481.000,00 | 0,00 |
| | j. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 451.800.000,00 | 451.800.000,00 | 0,00 |
| | k. Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 377.880.000,00 | 377.880.000,00 | 0,00 |
| | l. Dana Bantuan BLPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 129.959.311.621,00 | 129.959.311.621,00 | 0,00 |

5.4.1.2.1.2. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>5.594.207.000,00</u> | <u>63.219.134.000,00</u> |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID) pada Tahun 2022 sebesar Rp5.594.207.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp63.219.134.000,00. Terdapat penurunan DID Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp57.624.927.000,00 atau turun sebesar 91,15%. Rincian DID pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Dana Insentif Daerah | 5.594.207.000,00 | 63.219.134.000,00 | (57.624.927.000,00) |
| | Jumlah | 5.594.207.000,00 | 63.219.134.000,00 | (57.624.927.000,00) |

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Dana Insentif Daerah | 5.594.207.000,00 | 5.594.207.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 5.594.207.000,00 | 5.594.207.000,00 | 0,00 |

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------|--------------------------|
| 141.973.340.777,02 | 81.903.586.130,10 |

Pendapatan Transfer Antar Daerah periode tahun anggaran 2022 berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 sebesar Rp141.973.340.777,02 dan Tahun 2021 sebesar Rp81.903.586.130,10. Terdapat kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp60.069.754.646,92 atau naik 73,34%. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor | 11.037.913.085,76 | 9.343.987.993,79 | 1.693.925.091,97 |
| 2 | Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 11.587.353.314,58 | 8.763.532.130,43 | 2.823.821.184,15 |
| 3 | Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 107.359.545.434,70 | 53.573.482.098,70 | 53.786.063.336,00 |
| 4 | Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan | 423.073.725,98 | 115.690.751,18 | 307.382.974,80 |
| 5 | Bagi Hasil dari Pajak Rokok | 11.565.455.216,00 | 10.106.893.156,00 | 1.458.562.060,00 |
| | Jumlah | 141.973.340.777,02 | 81.903.586.130,10 | 60.069.754.646,92 |

Penjelasan atas selisih antara Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|--|--------------------|-------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor | 11.037.913.085,76 | 12.931.196.456,00 | (1.893.283.370,24) |
| 2 | Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 11.587.353.314,58 | 13.183.653.170,00 | (1.596.299.855,42) |
| 3 | Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 107.359.545.434,70 | 95.203.932.548,00 | 12.155.612.886,70 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 4 | Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan | 423.073.725,98 | 288.510.399,00 | 134.563.326,98 |
| 5 | Bagi Hasil dari Pajak Rokok | 11.565.455.216,00 | 12.999.931.162,00 | (1.434.475.946,00) |
| | Jumlah | 141.973.340.777,02 | 134.607.223.735,00 | 7.366.117.042,02 |

Selisih Kurang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dengan LRA tahun 2022 sebesar Rp7.366.117.042,02 terdiri dari:

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA | | | 134.607.223.735,00 |
| 1. Penambahan Piutang Tahun 2022 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2021 Pada Pajak Kendaraan Bermotor | 3.259.167.017,76 | (5.152.450.388,00) | (1.893.283.370,24) |
| 2. Penambahan Piutang Tahun 2022 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2021 Pada Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 3.312.760.391,58 | (4.909.060.247,00) | (1.596.299.855,42) |
| 3. Penambahan Piutang Tahun 2022 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2021 Pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 37.532.554.517,70 | (25.376.941.631,00) | 12.155.612.886,70 |
| 4. Penambahan Piutang Tahun 2022 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2021 Pada Pajak Air Permukaan | 162.046.018,98 | (27.482.692,00) | 134.563.326,98 |
| 5. Penambahan Piutang Tahun 2022 dan Pengurangan atas pelunasan piutang s/d tahun 2021 Pada Pajak Rokok | 2.416.883.790,00 | (3.851.359.736,00) | (1.434.475.946,00) |
| Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO | 46.683.411.736,02 | (39.317.294.694,00) | 141.973.340.777,02 |

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 43.271.202.819,20 | 31.258.117.798,00 |

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp 43.271.202.819,20 dan Tahun 2021 sebesar Rp31.258.117.798,00. Terdapat kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp12.013.085.021,20 atau naik sebesar 38,43%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah | 18.385.811.084,20 | 9.901.375.798,00 | 8.484.435.286,20 |
| 2 | Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 24.885.391.735,00 | 21.356.742.000,00 | 3.528.649.735,00 |
| | Jumlah | 43.271.202.819,20 | 31.258.117.798,00 | 12.013.085.021,20 |

Penjelasan masing-masing jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp18.385.811.084,20 dan Rp9.901.375.798,00. Terdapat kenaikan Pendapatan Hibah Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp8.484.435.286,20 atau naik sebesar 85.69%. Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 14.396.478.154,20 | 9.901.375.798,00 | 4.495.102.356,20 |
| | Hibah Persediaan dari BKKBN Tahun 2022 (DPPKB) | 377.503.930,20 | 303.865.827,00 | 73.638.103,20 |
| | Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian Perhubungan (Dinas Perhubungan) | 3.734.796.100,00 | 487.922.850,00 | 3.246.873.250,00 |
| | Hibah IPDMIP | 9.882.398.701,00 | 9.109.587.121,00 | 772.811.580,00 |
| | Hibah Persediaan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 (BPBD) | 29.326.975,00 | 0,00 | 29.326.975,00 |
| | Hibah Persediaan dari Provinsi dan Pusat Tahun 2022 (Disdukcapil) | 204.358.700,00 | 0,00 | 204.358.700,00 |
| | Hibah Aset Tetap Lainnya dari Perpustakaan RI (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) | 168.093.748,00 | 0,00 | 168.093.748,00 |
| 2 | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri | 1.704.501.000,00 | 0,00 | 1.704.501.000,00 |
| | Hibah Aset Tetap Tanah (Kecamatan Lokpaikat) | 1.575.517.000,00 | 0,00 | 1.575.517.000,00 |
| | Hibah Aset Tetap Tanah (Dinsos) | 120.984.000,00 | 0,00 | 120.984.000,00 |
| | Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Dishub) | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 3 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri | 44.964.930,00 | 0,00 | 44.964.930,00 |
| | Hibah Persediaan dari Dinkes Tahun 2022 (RSUD Datu Sanggul) | 44.964.930,00 | 0,00 | 44.964.930,00 |
| 4 | Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri | 2.239.867.000,00 | 0,00 | 2.239.867.000,00 |
| | Hibah Aset Tetap Tanah (Disperkimtan) | 2.239.867.000,00 | 0,00 | 2.239.867.000,00 |
| | Jumlah | 18.385.811.084,20 | 9.901.375.798,00 | 8.484.435.286,20 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Hibah LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Pendapatan Hibah | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 14.396.478.154,20 | 9.882.398.701,00 | 4.514.079.453,20 |
| | Hibah Persediaan dari BKKBN Tahun 2022 (DPPKB) | 377.503.930,20 | 0,00 | 377.503.930,20 |
| | Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian Perhubungan (Dinas Perhubungan) | 3.734.796.100,00 | 0,00 | 3.734.796.100,00 |
| | Hibah IPDMIP | 9.882.398.701,00 | 9.882.398.701,00 | 0,00 |
| | Hibah Persediaan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 (BPBD) | 29.326.975,00 | 0,00 | 29.326.975,00 |
| | Hibah Persediaan dari Provinsi dan Pusat Tahun 2022 (Disdukcapil) | 204.358.700,00 | 0,00 | 204.358.700,00 |
| | Hibah Aset Tetap Lainnya dari Perpustakaan RI (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) | 168.093.748,00 | 0,00 | 168.093.748,00 |
| 2 | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri | 1.704.501.000,00 | 0,00 | 1.704.501.000,00 |
| | Hibah Aset Tetap Tanah (Kecamatan Lokpaikat) | 1.575.517.000,00 | 0,00 | 1.575.517.000,00 |
| | Hibah Aset Tetap Tanah (Dinsos) | 120.984.000,00 | 0,00 | 120.984.000,00 |
| | Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Dishub) | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 3 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri | 44.964.930,00 | 0,00 | 44.964.930,00 |
| | Hibah Persediaan dari Dinkes Tahun 2022 (RSUD Datu Sanggul) | 44.964.930,00 | 0,00 | 44.964.930,00 |
| 4 | Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri | 2.239.867.000,00 | 0,00 | 2.239.867.000,00 |
| | Hibah Aset Tetap Tanah (Disperkimtan) | 2.239.867.000,00 | 0,00 | 2.239.867.000,00 |
| | Jumlah | 18.385.811.084,20 | 9.882.398.701,00 | 8.503.412.383,20 |

Selisih Lebih Pendapatan Hibah LO dengan LRA tahun 2022 sebesar Rp8.503.412.383,20 terdiri dari:

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|------------------|-------------|-------------------------|
| Pendapatan Hibah LRA | | | 9.882.398.701,00 |
| 1. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Persediaan dari BKKBN (DPPKB) | 377.503.930,20 | 0,00 | 377.503.930,20 |
| 2. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian Perhubungan (Dinas Perhubungan) | 3.734.796.100,00 | 0,00 | 3.734.796.100,00 |
| 3. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Persediaan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan (BPBD) | 29.326.975,00 | 0,00 | 29.326.975,00 |
| 4. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Persediaan dari Provinsi dan Pusat Kependudukan (Disdukcapil) | 204.358.700,00 | 0,00 | 204.358.700,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|-------------------------|-------------|--------------------------|
| 5. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Aset Tetap Lainnya dari Perpusnas RI (Dinas Perpustakaan dan Kerasipan) | 168.093.748,00 | 0,00 | 168.093.748,00 |
| 6. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Aset Tetap Tanah dari Masyarakat (Kecamatan Lokpaikat) | 1.575.517.000,00 | 0,00 | 1.575.517.000,00 |
| 7. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Aset Tetap Tanah dari Masyarakat (Dinsos) | 120.984.000,00 | 0,00 | 120.984.000,00 |
| 8. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Masyarakat (Dishub) | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 9. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Aset Tetap Tanah dari Lembaga (Disperkimtan) | 2.239.867.000,00 | 0,00 | 2.239.867.000,00 |
| 10. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Persediaan dari Dinkes (RSUD Datu Sanggul) | 44.964.930,00 | 0,00 | 44.964.930,00 |
| Pendapatan Hibah LO | 8.503.412.383,20 | 0,00 | 18.385.811.084,20 |

b. Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp24.885.391.735,00 dan Rp21.356.742.000,00. Terdapat kenaikan Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp3.528.649.735,00. Rincian Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah (Dana BOS) | 18.851.610.265,00 | 21.356.742.000,00 | (2.505.131.735,00) |
| 2 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 6.033.781.470,00 | 0,00 | 6.033.781.470,00 |
| | Jumlah | 24.885.391.735,00 | 21.356.742.000,00 | 3.528.649.735,00 |

Adapun rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2022 masing-masing puskesmas adalah sebagai berikut:

| No | Nama Puskesmas | Tahun 2022 (Rp) |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1 | Puskesmas Tapin Utara | 954.884.250,00 |
| 2 | Puskesmas Binuang | 917.326.000,00 |
| 3 | Puskesmas Hatungun | 264.324.500,00 |
| 4 | Puskesmas Tambarangan | 608.202.150,00 |
| 5 | Puskesmas Salam Babaris | 246.187.680,00 |
| 6 | Puskesmas Banua Padang | 366.194.319,00 |
| 7 | Puskesmas Bakarangan | 523.208.289,00 |
| 8 | Puskesmas Pandahan | 273.143.500,00 |
| 9 | Puskesmas Tambaruntung | 503.567.100,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Nama Puskesmas | Tahun 2022 (Rp) |
|----|---------------------|-------------------------|
| 10 | Puskesmas Baringin | 572.846.556,00 |
| 11 | Puskesmas Margasari | 228.986.110,00 |
| 12 | Puskesmas Lokpaikat | 353.695.343,00 |
| 13 | Puskesmas Piani | 221.215.673,00 |
| | Jumlah | 6.033.781.470,00 |

Pada Tahun 2021 Pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan di Lain-lain PAD yang Sah-LO. Sedangkan untuk Tahun 2022 dianggarkan di Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022. Penjelasan selisih antara Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Pendapatan Hibah (Dana BOS) | 18.851.610.265,00 | 18.851.610.265,00 | 0,00 |
| 2 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 6.033.781.470,00 | 6.033.781.470,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 24.885.391.735,00 | 24.885.391.735,00 | 0,00 |

5.4.2. Beban

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.266.582.617.354,93 | 1.162.176.118.358,15 |

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.266.582.617.354,93 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.162.176.118.358,15. Terdapat kenaikan Beban Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp104.406.498.996,78 atau naik 8,98%. Rincian realisasi Beban Tahun 2022 dan Tahun 2021 terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Beban Pegawai | 448.903.233.637,00 | 422.134.252.450,00 | 26.768.981.187,00 |
| 2 | Beban Barang dan Jasa | 423.503.613.083,17 | 355.873.225.756,08 | 67.630.387.327,09 |
| 3 | Beban Bunga | 7.578.695.680,00 | 0,00 | 7.578.695.680,00 |
| 4 | Beban Hibah | 56.698.494.864,00 | 62.763.906.164,00 | (6.065.411.300,00) |
| 5 | Beban Bantuan Sosial | 9.232.620.700,00 | 4.662.150.000,00 | 4.570.470.700,00 |
| 6 | Beban Penyisihan Piutang | 1.205.276.346,31 | 1.867.533.011,91 | (662.256.665,60) |
| 7 | Beban Lain-lain | 0,00 | 9.062.405.897,24 | (9.062.405.897,24) |
| 8 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 37.766.960.994,87 | 32.571.319.732,99 | 5.195.641.261,88 |
| 9 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 63.583.710.321,08 | 62.972.919.091,00 | 610.791.230,08 |
| 10 | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 145.386.993.199,00 | 136.125.952.399,93 | 9.261.040.799,07 |
| 11 | Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 12 | Beban Penyusutan Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 660.304.393,00 | 738.346.739,00 | (78.042.346,00) |
| 14 | Beban Bagi Hasil | 2.519.839.550,50 | 2.039.312.404,00 | 480.527.146,50 |
| 15 | Beban Bantuan Keuangan | 69.542.874.586,00 | 71.364.794.712 | (1.821.920.126,00) |
| | Jumlah | 1.266.582.617.354,93 | 1.162.176.118.358,15 | 104.406.498.996,78 |

5.4.2.1 Beban Pegawai

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 448.903.233.637,00 | 422.134.252.450,00 |

Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp448.903.233.637,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp422.134.252.450,00. Terdapat kenaikan Beban Pegawai Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp26.768.981.187,00 atau naik 6.34%. Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | Beban Gaji Pokok PNS | 185.156.764.383,00 | 185.277.847.805,00 | (121.083.422,00) |
| 2 | Beban Tunjangan Keluarga | 15.325.847.953,00 | 15.366.334.256,00 | (40.486.303,00) |
| 3 | Beban Tunjangan Jabatan | 7.077.402.777,00 | 7.161.135.000,00 | (83.732.223,00) |
| 4 | Beban Tunjangan Fungsional | 13.380.920.100,00 | 13.210.898.370,00 | 170.021.730,00 |
| 5 | Beban Tunjangan Fungsional Umum | 1.751.926.604,00 | 1.812.230.000,00 | (60.303.396,00) |
| 6 | Beban Tunjangan Beras | 9.696.281.540,00 | 9.817.617.300,00 | (121.335.760,00) |
| 7 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 638.618.200,00 | 655.651.716,00 | (17.033.516,00) |
| 8 | Beban Pembulatan Gaji | 2.664.804,00 | 2.662.547,00 | 2.257,00 |
| 9 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan | 16.755.593.412,00 | 12.771.047.349,00 | 3.984.546.063,00 |
| 10 | Beban Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM) | 1.511.652.243,00 | 1.512.199.772,00 | (547.529,00) |
| 11 | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 128.963.488.640,00 | 101.926.090.145,00 | 27.037.398.495,00 |
| 12 | Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 653.971.055,00 | 671.809.798,00 | (17.838.743,00) |
| 13 | Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 102.683.070,00 | 53.921.732,00 | 48.761.338,00 |
| 14 | Beban Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNSD | 48.954.381.400,00 | 54.438.428.760,00 | (5.484.047.360,00) |
| 15 | Beban Tunjangan Khusus Guru | 574.531.800,00 | 604.690.800,00 | (30.159.000,00) |
| 16 | Beban Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS | 1.303.750.000,00 | 1.137.250.000,00 | 166.500.000,00 |
| 17 | Beban Honorarium | 2.329.595.000,00 | 1.751.632.000,00 | 577.963.000,00 |
| 18 | Beban Uang Representasi DPRD | 563.115.000,00 | 556.395.000,00 | 6.720.000,00 |
| 19 | Beban Tunjangan Keluarga DPRD | 54.734.400,00 | 53.283.300,00 | 1.451.100,00 |
| 20 | Beban Tunjangan Beras DPRD | 64.598.640,00 | 62.729.100,00 | 1.869.540,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 21 | Beban Tunjangan Jabatan DPRD | 814.233.000,00 | 806.772.750,00 | 7.460.250,00 |
| 22 | Beban Uang Paket DPRD | 47.029.500,00 | 46.998.000,00 | 31.500,00 |
| 23 | Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 68.466.825,00 | 63.366.450,00 | 5.100.375,00 |
| 24 | Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 20.964.825,00 | 23.050.650,00 | (2.085.825,00) |
| 25 | Beban Tunjangan Reses DPRD | 787.500.000,00 | 787.500.000,00 | 0,00 |
| 26 | Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 270.396,00 | 270.396,00 | 0,00 |
| 27 | Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 4.392.175.000,00 | 3.835.070.000,00 | 557.105.000,00 |
| 28 | Beban Tunjangan Transportasi DPRD | 3.312.500.000,00 | 3.312.500.000,00 | 0,00 |
| 29 | Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD | 0,00 | 2.100.000,00 | (2.100.000,00) |
| 30 | Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD | 3.353.750.000,00 | 3.310.400.000,00 | 43.350.000,00 |
| 31 | Beban Gaji Pokok KDH/WKDH | 54.600.000,00 | 54.600.000,00 | 0,00 |
| 32 | Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 5.460.000,00 | 5.640.000,00 | (180.000,00) |
| 33 | Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 98.280.000,00 | 98.280.000,00 | 0,00 |
| 34 | Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH | 3.476.160,00 | 4.417.620,00 | (941.460,00) |
| 35 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 1.714.000,00 | 1.633.484,00 | 80.516,00 |
| 36 | Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 1.440,00 | 1.740,00 | (300,00) |
| 37 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | 276.671.875,00 | 271.793.750,00 | 4.878.125,00 |
| 39 | Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah | 34.559.595,00 | 18.112.860,00 | 16.446.735,00 |
| 40 | Beban Dana Operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 398.530.000,00 | 399.870.000,00 | (1.340.000,00) |
| 41 | Beban Pegawai BLUD | 370.530.000,00 | 248.020.000,00 | 122.510.000,00 |
| | Jumlah | 448.903.233.637,00 | 422.134.252.450,00 | 26.768.981.187,00 |

Perbandingan Beban Pegawai LO dengan belanja LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Beban/belanja Pegawai | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Beban Gaji Pokok PNS | 185.156.764.383,00 | 185.156.764.383,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Tunjangan Keluarga | 15.325.847.953,00 | 15.325.847.953,00 | 0,00 |
| 3 | Beban Tunjangan Jabatan | 7.077.402.777,00 | 7.077.402.777,00 | 0,00 |
| 4 | Beban Tunjangan Fungsional | 13.380.920.100,00 | 13.380.920.100,00 | 0,00 |
| 5 | Beban Tunjangan Fungsional Umum | 1.751.926.604,00 | 1.751.926.604,00 | 0,00 |
| 6 | Beban Tunjangan Beras | 9.696.281.540,00 | 9.696.281.540,00 | 0,00 |
| 7 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 638.618.200,00 | 638.618.200,00 | 0,00 |
| 8 | Beban Pembulatan Gaji | 2.664.804,00 | 2.664.804,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Beban/belanja Pegawai | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|---|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 9 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan | 16.755.593.412,00 | 16.755.593.412,00 | 0,00 |
| 10 | Beban Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM) | 1.511.652.243,00 | 1.511.652.243,00 | 0,00 |
| 11 | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 128.963.488.640,00 | 128.963.488.640,00 | 0,00 |
| 12 | Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 653.971.055,00 | 653.971.055,00 | 0,00 |
| 13 | Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 102.683.070,00 | 102.683.070,00 | 0,00 |
| 14 | Beban Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNSD | 48.954.381.400,00 | 48.954.381.400,00 | 0,00 |
| 15 | Beban Tunjangan Khusus Guru | 574.531.800,00 | 574.531.800,00 | 0,00 |
| 16 | Beban Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS | 1.303.750.000,00 | 1.303.750.000,00 | 0,00 |
| 17 | Beban Honorarium | 2.329.595.000,00 | 2.396.090.000,00 | (66.495.000,00) |
| 18 | Beban Uang Representasi DPRD | 563.115.000,00 | 563.115.000,00 | 0,00 |
| 19 | Beban Tunjangan Keluarga DPRD | 54.734.400,00 | 54.734.400,00 | 0,00 |
| 20 | Beban Tunjangan Beras DPRD | 64.598.640,00 | 64.598.640,00 | 0,00 |
| 21 | Beban Tunjangan Jabatan DPRD | 814.233.000,00 | 814.233.000,00 | 0,00 |
| 22 | Beban Uang Paket DPRD | 47.029.500,00 | 47.029.500,00 | 0,00 |
| 23 | Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 68.466.825,00 | 68.466.825,00 | 0,00 |
| 24 | Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 20.964.825,00 | 20.964.825,00 | 0,00 |
| 25 | Beban Tunjangan Reses DPRD | 787.500.000,00 | 787.500.000,00 | 0,00 |
| 26 | Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 270.396,00 | 270.396,00 | 0,00 |
| 27 | Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 4.392.175.000,00 | 4.392.175.000,00 | 0,00 |
| 28 | Beban Tunjangan Transportasi DPRD | 3.312.500.000,00 | 3.312.500.000,00 | 0,00 |
| 29 | Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 3.353.750.000,00 | 3.353.750.000,00 | 0,00 |
| 31 | Beban Gaji Pokok KDH/WKDH | 54.600.000,00 | 54.600.000,00 | 0,00 |
| 32 | Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 5.460.000,00 | 5.460.000,00 | 0,00 |
| 33 | Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 98.280.000,00 | 98.280.000,00 | 0,00 |
| 34 | Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH | 3.476.160,00 | 3.476.160,00 | 0,00 |
| 35 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 1.714.000,00 | 1.714.000,00 | 0,00 |
| 36 | Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 37 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | 276.671.875,00 | 276.671.875,00 | 0,00 |
| 39 | Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah | 34.559.595,00 | 34.559.595,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Beban/belanja Pegawai | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 40 | Beban Dana Operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 398.530.000,00 | 398.530.000,00 | 0,00 |
| 41 | Beban Pegawai BLUD | 370.530.000,00 | 370.530.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 448.903.233.637,00 | 448.969.728.637,00 | (66.495.000,00) |

Penjelasan atas selisih Beban Pegawai LO dengan Belanja LRA tahun 2022 sebesar Rp66.495.000,00 terdiri dari:

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Belanja Pegawai LRA | | | 448.969.728.637,00 |
| 1. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0,00 | (15.842.500,00) | (15.842.500,00) |
| 2. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | (885.000,00) | (885.000,00) |
| 3. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada Satpol PP | 0,00 | (1.670.000,00) | (1.670.000,00) |
| 4. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika | 0,00 | (1.530.000,00) | (1.530.000,00) |
| 5. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada DPPKB | 0,00 | (2.920.000,00) | (2.920.000,00) |
| 6. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada Dinas Perdagangan | 0,00 | (23.190.000,00) | (23.190.000,00) |
| 7. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada Dinas Pemuda dan Olahraga | 0,00 | (20.457.500,00) | (20.457.500,00) |
| Beban Pegawai LO | 0,00 | (66.495.000,00) | 448.903.233.637,00 |

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 423.503.613.083,17 | 355.873.225.756,08 |

Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp423.503.613.083,17 dan Tahun 2021 sebesar Rp355.873.225.756,08. Terdapat kenaikan Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp67.630.387.327,09 atau naik 19,00%. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Beban Barang | 89.243.309.533,17 | 86.384.557.450,56 | 2.858.752.082,61 |
| 2 | Beban Jasa | 147.689.414.748,00 | 135.123.660.113,00 | 12.565.754.635,00 |
| 3 | Beban Pemeliharaan | 46.572.313.480,00 | 12.735.819.795,00 | 33.836.493.685,00 |
| 4 | Beban Perjalanan Dinas | 60.476.937.582,00 | 41.075.076.436,00 | 19.401.861.146,00 |
| 5 | Beban Uang/Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat | 17.537.246.558,00 | 18.174.029.665,00 | (636.783.107,00) |
| 6 | Beban Barang dan Jasa Bos | 15.140.082.563,00 | 15.189.655.188,00 | (49.572.625,00) |
| 7 | Beban Barang dan Jasa BLUD | 46.844.308.619,00 | 47.190.427.108,52 | (346.118.489,52) |
| | Jumlah | 423.503.613.083,17 | 355.873.225.756,08 | 67.630.387.327,09 |

Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dengan Belanja LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Beban Barang

| No. | Beban/belanja Barang | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|-----|--|------------------|-------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 4.038.876.268,00 | 4.350.240.850,00 | (311.364.582,00) |
| 2 | Beban Bahan-Bahan Kimia | 342.162.982,00 | 393.544.964,00 | (51.381.982,00) |
| 3 | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 8.937.709.721,00 | 15.074.655.319,00 | (6.136.945.598,00) |
| 4 | Beban Bahan-Bahan Baku | 2.094.006.700,00 | 2.094.006.700,00 | 0,00 |
| 5 | Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 2.340.371.232,00 | 2.289.030.532,00 | 51.340.700,00 |
| 6 | Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 7 | Beban Bahan-Isi Tabung Gas | 4.155.000,00 | 8.955.000,00 | (4.800.000,00) |
| 8 | Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | (98.433.305,00) | 182.260.000,00 | (280.693.305,00) |
| 9 | Beban Bahan-Bahan Lainnya | 2.550.816.297,00 | 2.550.816.297,00 | 0,00 |
| 10 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 989.927.425,00 | 960.256.625,00 | 29.670.800,00 |
| 11 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 12 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 24.437.000,00 | 24.437.000,00 | 0,00 |
| 13 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 607.136.595,00 | 607.136.595,00 | 0,00 |
| 14 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.206.221.729,00 | 4.265.882.447,00 | (59.660.718,00) |
| 15 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 1.967.456.479,00 | 1.958.332.179,00 | 9.124.300,00 |
| 16 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 6.883.832.889,00 | 6.384.619.845,00 | 499.213.044,00 |
| 17 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 520.253.800,00 | 520.003.800,00 | 250.000,00 |
| 18 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 32.156.800,00 | 32.156.800,00 | 0,00 |
| 19 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1.644.487.053,00 | 1.621.639.653,00 | 22.847.400,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Beban/belanja Barang | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 20 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 |
| 21 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 304.445.978,00 | 327.164.278,00 | (22.718.300,00) |
| 22 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1.466.205.496,00 | 1.387.716.096,00 | 78.489.400,00 |
| 23 | Beban Obat-Obatan-Obat | 4.289.237.711,97 | 3.657.997.149,00 | 631.240.562,97 |
| 24 | Beban Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya | 1.777.671.700,00 | 614.330.236,00 | 1.163.341.464,00 |
| 25 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 5.839.158.779,20 | 5.539.388.132,00 | 299.770.647,20 |
| 26 | Beban Natura dan Pakan-Pakan | 118.115.000,00 | 118.115.000,00 | 0,00 |
| 27 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 10.074.206.253,00 | 10.074.206.253,00 | 0,00 |
| 28 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 4.773.397.617,00 | 4.773.397.617,00 | 0,00 |
| 29 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 102.947.967,00 | 102.947.967,00 | 0,00 |
| 30 | Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 482.467.000,00 | 482.467.000,00 | 0,00 |
| 31 | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 14.581.918.650,00 | 12.567.798.650,00 | 2.014.120.000,00 |
| 32 | Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 1.075.505.000,00 | 1.075.505.000,00 | 0,00 |
| 33 | Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) | 116.550.000,00 | 116.550.000,00 | 0,00 |
| 34 | Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 316.722.750,00 | 316.722.750,00 | 0,00 |
| 35 | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) | 1.868.870.500,00 | 1.868.870.500,00 | 0,00 |
| 36 | Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 1.132.465.742,00 | 1.106.365.742,00 | 26.100.000,00 |
| 37 | Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 59.662.500,00 | 59.662.500,00 | 0,00 |
| 38 | Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | 0,00 |
| 39 | Beban Pakaian Pelatihan Kerja | 493.445.200,00 | 493.445.200,00 | 0,00 |
| 40 | Beban Pakaian KORPRI | 23.630.000,00 | 23.630.000,00 | 0,00 |
| 41 | Beban Pakaian Adat Daerah | 67.650.000,00 | 67.650.000,00 | 0,00 |
| 42 | Beban Pakaian Batik Tradisional | 1.152.139.652,00 | 1.152.139.652,00 | 0,00 |
| 43 | Beban Pakaian Olahraga | 1.773.746.160,00 | 1.773.746.160,00 | 0,00 |
| 44 | Beban Pakaian Paskibraka | 242.770.212,00 | 242.770.212,00 | 0,00 |
| 45 | Beban Komponen-Komponen Peralatan | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 89.243.309.533,17 | 91.285.365.700,00 | (2.042.056.166,83) |

b. Beban Jasa

| No. | Beban/belanja Jasa | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|-----|--|------------------|------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 4.320.431.621,00 | 4.320.431.621,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5.864.535.550,00 | 5.864.535.550,00 | 0,00 |
| 3 | Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 46.770.000,00 | 46.770.000,00 | 0,00 |
| 4 | Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 2.065.590.000,00 | 2.065.590.000,00 | 0,00 |
| 5 | Beban Honorarium Rohaniwan | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Beban/belanja Jasa | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 6 | Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 |
| 7 | Beban Honorarium Penyelenggaraan Ujian | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 8 | Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 |
| 9 | Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 92.400.000,00 | 92.400.000,00 | 0,00 |
| 10 | Beban Jasa Tenaga Pendidikan | 1.981.687.000,00 | 1.981.687.000,00 | 0,00 |
| 11 | Beban Jasa Tenaga Kesehatan | 9.826.720.444,00 | 9.187.570.444,00 | 639.150.000,00 |
| 12 | Beban Jasa Tenaga Laboratorium | 229.824.164,00 | 229.824.164,00 | 0,00 |
| 13 | Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 5.252.051.268,00 | 18.059.036.579,00 | (12.806.985.311,00) |
| 14 | Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2.574.643.000,00 | 2.574.643.000,00 | 0,00 |
| 15 | Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 206.625.000,00 | 206.625.000,00 | 0,00 |
| 16 | Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana | 404.300.000,00 | 404.300.000,00 | 0,00 |
| 17 | Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 602.695.000,00 | 602.695.000,00 | 0,00 |
| 18 | Beban Jasa Tenaga Perhubungan | 872.395.600,00 | 872.395.600,00 | 0,00 |
| 19 | Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan | 2.498.700.000,00 | 2.498.700.000,00 | 0,00 |
| 20 | Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 256.050.000,00 | 256.050.000,00 | 0,00 |
| 21 | Beban Jasa Tenaga Administrasi | 10.879.514.676,00 | 10.879.514.676,00 | 0,00 |
| 22 | Beban Jasa Tenaga Operator Komputer | 2.143.991.000,00 | 2.143.991.000,00 | 0,00 |
| 23 | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 5.328.990.511,00 | 5.328.990.511,00 | 0,00 |
| 24 | Beban Jasa Tenaga Ahli | 2.628.443.809,00 | 2.917.797.809,00 | (289.354.000,00) |
| 25 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan | 9.860.694.400,00 | 9.860.694.400,00 | 0,00 |
| 26 | Beban Jasa Tenaga Keamanan | 11.913.731.900,00 | 3.354.771.900,00 | 8.558.960.000,00 |
| 27 | Beban Jasa Tenaga Caraka | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 |
| 28 | Beban Jasa Tenaga Supir | 675.528.000,00 | 675.528.000,00 | 0,00 |
| 29 | Belanja Jasa Tenaga Juru Masak | 259.200.000,00 | 259.200.000,00 | 0,00 |
| 30 | Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 351.886.793,00 | 351.886.793,00 | 0,00 |
| 31 | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 145.500.000,00 | 145.500.000,00 | 0,00 |
| 32 | Beban Jasa Tata Rias | 359.450.000,00 | 359.450.000,00 | 0,00 |
| 33 | Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 1.156.820.263,00 | 1.195.970.263,00 | (39.150.000,00) |
| 34 | Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 166.538.000,00 | 166.538.000,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Beban/belanja Jasa | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|-----|---|--------------------|-------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 35 | Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 360.549.950,00 | 427.892.292,00 | (67.342.342,00) |
| 36 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | 1.558.850.000,00 | 1.558.850.000,00 | 0,00 |
| 37 | Beban Jasa Kontribusi Asosiasi | 1.383.425.000,00 | 1.383.425.000,00 | 0,00 |
| 38 | Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 58.451.000,00 | 58.451.000,00 | 0,00 |
| 39 | Beban Jasa Kalibrasi | 21.352.500,00 | 21.352.500,00 | 0,00 |
| 40 | Beban Jasa Pengolahan Sampah | 38.850.000,00 | 38.850.000,00 | 0,00 |
| 41 | Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 166.855.000,00 | 166.855.000,00 | 0,00 |
| 42 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 3.919.120.921,00 | 3.911.870.921,00 | 7.250.000,00 |
| 43 | Beban Tagihan Telepon | 546.784.002,00 | 547.919.106,00 | (1.135.104,00) |
| 44 | Beban Tagihan Air | 770.547.244,00 | 741.043.396,00 | 29.503.848,00 |
| 45 | Beban Tagihan Listrik | 7.688.151.487,00 | 7.436.370.868,00 | 251.780.619,00 |
| 46 | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 308.944.000,00 | 308.944.000,00 | 0,00 |
| 47 | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 1.472.202.997,00 | 1.513.217.595,00 | (41.014.598,00) |
| 48 | Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 346.892.574,00 | 346.892.574,00 | 0,00 |
| 49 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.561.966.176,00 | 1.561.966.176,00 | 0,00 |
| 50 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 15.247.899.500,00 | 15.247.899.500,00 | 0,00 |
| 51 | Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 1.498.131.600,00 | 1.498.131.600,00 | 0,00 |
| 52 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 12.904.748,00 | 12.904.748,00 | 0,00 |
| 53 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN | 103.824.720,00 | 103.824.720,00 | 0,00 |
| 54 | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 110.073.600,00 | 110.073.600,00 | 0,00 |
| 55 | Beban Sewa Lapangan Lainnya | 211.050.000,00 | 211.050.000,00 | 0,00 |
| 56 | Beban Sewa Grader | 249.840.489,00 | 2.444.891.191,00 | (2.195.050.702,00) |
| 57 | Belanja Sewa Excavator | 6.305.840.490,00 | 9.803.988.716,00 | (3.498.148.226,00) |
| 58 | Beban Sewa Asphalt Equipment | (2.531.521.388,00) | 564.115.000,00 | (3.095.636.388,00) |
| 59 | Beban Sewa Compacting Equipment | 1.107.651.330,00 | 5.370.389.219,00 | (4.262.737.889,00) |
| 60 | Beban Sewa Loader | 0,00 | 253.170.000,00 | (253.170.000,00) |
| 61 | Beban Sewa Electric Generating Set | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 |
| 62 | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 88.610.000,00 | 88.610.000,00 | 0,00 |
| 63 | Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 38.887.000,00 | 38.887.000,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Beban/belanja Jasa | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|-----|---|------------------|------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 64 | Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 65 | Beban Sewa Alat Kantor Lainnya | 1.397.836.080,00 | 1.397.836.080,00 | 0,00 |
| 66 | Beban Sewa Alat Pendingin | 37.650.000,00 | 37.650.000,00 | 0,00 |
| 67 | Beban Sewa Peralatan Studio Audio | 642.577.189,00 | 642.577.189,00 | 0,00 |
| 68 | Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 125.136.600,00 | 125.136.600,00 | 0,00 |
| 69 | Beban Sewa Peralatan Umum | 86.850.000,00 | 86.850.000,00 | 0,00 |
| 70 | Beban Sewa Komputer Jaringan | 75.583.244,00 | 75.583.244,00 | 0,00 |
| 71 | Beban Sewa Peralatan Jaringan | 192.000.000,00 | 192.000.000,00 | 0,00 |
| 72 | Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor | 113.125.000,00 | 113.125.000,00 | 0,00 |
| 73 | Beban Sewa Bangunan Gudang | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 |
| 74 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 393.062.200,00 | 393.062.200,00 | 0,00 |
| 75 | Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 |
| 76 | Beban Sewa Bangunan Terbuka | 580.811.500,00 | 580.811.500,00 | 0,00 |
| 77 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 82.488.700,00 | 82.488.700,00 | 0,00 |
| 78 | Beban Sewa Hotel | 198.692.800,00 | 198.692.800,00 | 0,00 |
| 79 | Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 |
| 80 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 79.250.000,00 | 79.250.000,00 | 0,00 |
| 81 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 106.242.595,00 | 464.065.785,00 | (357.823.190,00) |
| 82 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior | 10.810.811,00 | 10.810.811,00 | 0,00 |
| 83 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 1.295.139.960,00 | 1.572.353.060,00 | (277.213.100,00) |
| 84 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 2.051.646.608,00 | 2.629.348.259,00 | (577.701.651,00) |
| 85 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 2.338.213.606,00 | 3.402.940.106,00 | (1.064.726.500,00) |
| 86 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 962.493.050,00 | 2.917.694.250,00 | (1.955.201.200,00) |
| 87 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Kontruksi | 0,00 | 40.344.144,00 | (40.344.144,00) |
| 88 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya | 965.446.556,00 | 1.223.088.046,00 | (257.641.490,00) |
| 89 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah | 691.113.000,00 | 691.113.000,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Beban/belanja Jasa | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|-----|---|------------------|------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 90 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang | 99.178.000,00 | 99.178.000,00 | 0,00 |
| 91 | Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 371.828.900,00 | 863.142.066,00 | (491.313.166,00) |
| 92 | Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 845.236.589,00 | 2.508.451.067,00 | (1.663.214.478,00) |
| 93 | Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | 298.262.500,00 | 2.854.765.100,00 | (2.556.502.600,00) |
| 94 | Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 2.556.408.900,00 | 3.255.860.690,00 | (699.451.790,00) |
| 95 | Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri | 552.430.990,00 | 701.814.090,00 | (149.383.100,00) |
| 96 | Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang | 69.541.500,00 | 69.541.500,00 | 0,00 |
| 97 | Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan | 1.736.842.200,00 | 1.736.842.200,00 | 0,00 |
| 98 | Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan | 97.008.000,00 | 97.008.000,00 | 0,00 |
| 99 | Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan | 0,00 | 1.347.723.000,00 | (1.347.723.000,00) |
| 100 | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika | 49.145.000,00 | 49.145.000,00 | 0,00 |
| 101 | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei | 109.310.000,00 | 109.310.000,00 | 0,00 |
| 102 | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 340.552.800,00 | 340.552.800,00 | 0,00 |
| 103 | Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 104 | Beban Kursus Singkat/Pelatihan | 621.354.844,00 | 621.354.844,00 | 0,00 |
| 105 | Beban Sosialisasi | 22.050.000,00 | 22.050.000,00 | 0,00 |
| 106 | Beban Bimbingan Teknis | 1.146.370.087,00 | 1.146.370.087,00 | 0,00 |
| 107 | Beban Diklat Kepemimpinan | 322.232.000,00 | 322.232.000,00 | 0,00 |
| 108 | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 745.399,00 | 745.399,00 | 0,00 |
| 109 | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 21.158.618,00 | 21.158.618,00 | 0,00 |
| 110 | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan | 148.838,00 | 148.838,00 | 0,00 |
| 111 | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 3.780.300,00 | 3.780.300,00 | 0,00 |
| 112 | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 76.843.898,00 | 76.843.898,00 | 0,00 |
| 113 | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 302.426,00 | 302.426,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Beban/belanja Jasa | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 114 | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 103.682,00 | 103.682,00 | 0,00 |
| 115 | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet | 91.338,00 | 91.338,00 | 0,00 |
| 116 | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 24.799.666,00 | 24.799.666,00 | 0,00 |
| 117 | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 12.614.239,00 | 12.614.239,00 | 0,00 |
| 118 | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 27.865.885,00 | 27.865.885,00 | 0,00 |
| 119 | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 995.711,00 | 995.711,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 147.689.414.748,00 | 176.190.734.250,00 | (28.501.319.502,00) |

c. Beban Pemeliharaan

| No. | Beban/belanja Pemeliharaan | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|-----|--|-----------------|----------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya | 2.147.000,00 | 2.147.000,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya | 0,00 | 185.700.000,00 | (185.700.000,00) |
| 4 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 786.908.612,00 | 786.908.612,00 | 0,00 |
| 5 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 39.360.656,00 | 39.360.656,00 | 0,00 |
| 6 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 0,00 |
| 7 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 8 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | (4.350.000,00) | 0,00 | (4.350.000,00) |
| 9 | Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak | 8.657.000,00 | 8.657.000,00 | 0,00 |
| 10 | Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 |
| 11 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 447.770,00 | 447.770,00 | 0,00 |
| 12 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 562.400.188,00 | 562.400.188,00 | 0,00 |
| 13 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 69.552.000,00 | 69.552.000,00 | 0,00 |
| 14 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Beban/belanja Pemeliharaan | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 15 | Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film | 32.109.000,00 | 32.109.000,00 | 0,00 |
| 16 | Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 0,00 |
| 17 | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum | 11.988.000,00 | 11.988.000,00 | 0,00 |
| 18 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 200.970.100,00 | 200.970.100,00 | 0,00 |
| 19 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 96.579.896,00 | 96.579.896,00 | 0,00 |
| 20 | Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 65.028.900,00 | 65.028.900,00 | 0,00 |
| 21 | Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 |
| 22 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 4.464.608.438,00 | 8.233.652.310,00 | (3.769.043.872,00) |
| 23 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 0,00 | 63.906.000,00 | (63.906.000,00) |
| 24 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam | 1.081.531.754,00 | 1.081.531.754,00 | 0,00 |
| 25 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 35.985.000,00 | 35.985.000,00 | 0,00 |
| 26 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III | 29.787.650,00 | 492.485.650,00 | (462.698.000,00) |
| 27 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 207.280.000,00 | 207.280.000,00 | 0,00 |
| 28 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya | 1.246.462.400,00 | 1.246.462.400,00 | 0,00 |
| 29 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 153.957.800,00 | 153.957.800,00 | 0,00 |
| 30 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai | 37.419.291.316,00 | 37.419.291.316,00 | 0,00 |
| 31 | Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik | 8.720.000,00 | 8.720.000,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 46.572.313.480,00 | 51.058.011.352,00 | (4.485.697.872,00) |

d. Beban Perjalanan Dinas

| No. | Beban/belanja Perjalanan Dinas | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 54.273.121.172,00 | 54.273.121.172,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.203.816.410,00 | 6.203.816.410,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 60.476.937.582,00 | 60.476.937.582,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

e. Beban Uang/Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat

| No. | Beban/belanja uang/jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 609.222.828,00 | 609.222.828,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 0,00 |
| 3 | Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan | 994.800.000,00 | 994.800.000,00 | 0,00 |
| 4 | Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) | 1.225.000.000,00 | 1.225.000.000,00 | 0,00 |
| 5 | Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 109.850.000,00 | 109.850.000,00 | 0,00 |
| 6 | Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 14.529.373.730,00 | 14.529.373.730,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 17.537.246.558,00 | 17.537.246.558,00 | 0,00 |

f. Beban Barang dan Jasa BOS

| No. | Beban/belanja Barang dan Jasa Bos | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Beban Barang dan Jasa BOS | 15.140.082.563,00 | 15.140.082.563,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 15.140.082.563,00 | 15.140.082.563,00 | 0,00 |

g. Beban Barang dan Jasa BLUD

| No. | Beban/belanja Barang dan Jasa BLUD | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|---------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Beban Barang dan Jasa BLUD | 46.844.308.619,00 | 48.961.732.993,00 | (2.117.424.374,00) |
| JUMLAH | | 46.844.308.619,00 | 48.961.732.993,00 | (2.117.424.374,00) |

Penjelasan selisih Beban Barang dan Jasa LO dengan Belanja LRA tahun 2022 terdiri dari:

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|---------------|--------------------|---------------------------|
| Belanja Barang dan Jasa LRA | | | 460.650.110.998,00 |
| Beban Barang | | | |
| 1. Pengurangan Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada DPUPR, Setda, Kecamatan Candi Laras Utara, dan Kecamatan Binuang | 0,00 | (311.364.582,00) | (311.364.582,00) |
| 2. Penambahan Beban Bahan-Bahan Kimia Tahun 2022 dan pengurangan beban Bahan-Bahan Kimia Tahun 2021 Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian | 36.180.086,00 | (87.562.068,00) | (51.381.982,00) |
| 3. Penambahan Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 dan pengurangan | 66.607.085,00 | (6.203.552.683,00) | (6.136.945.598,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Tahun 2021 | | | |
| 4. Penambahan Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Tahun 2022 dan pengurangan Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Tahun 2021 Pada Dinas Pertanian | 53.944.500,00 | (2.603.800,00) | 51.340.700,00 |
| 5. Penambahan Beban Bahan-Isi Tabung Gas Tahun 2022 dan pengurangan Beban Bahan-Isi Tabung Gas Tahun 2021 Pada RSUD Datu Sanggul | 1.800.000,00 | (6.600.000,00) | (4.800.000,00) |
| 6. Penambahan Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Tahun 2022 dan pengurangan Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Tahun 2021 Pada Dinas Perikanan | 10.580.000,00 | (291.273.305,00) | (280.693.305,00) |
| 7. Penambahan Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Tahun 2022 Pada Dinas Pertanian | 29.670.800,00 | (0,00) | 29.670.800,00 |
| 8. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Tahun 2021 | 339.912.982,00 | (399.573.700,00) | (59.660.718,00) |
| 9. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Tahun 2022 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Tahun 2021 | 27.473.300,00 | (18.349.000,00) | 9.124.300,00 |
| 10. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Tahun 2021 | 557.229.742,00 | (58.016.698,00) | 499.213.044,00 |
| 11. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Tahun 2021 | 600.000,00 | (350.000,00) | 250.000,00 |
| 12. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Tahun 2022 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Tahun | 32.218.000,00 | (9.370.600,00) | 22.847.400,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2021 Pada Dinas Pertanian, BKAD, dan RSUD Datu Sanggul | | | |
| 13. Pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Tahun 2021 | 0,00 | (22.718.300,00) | (22.718.300,00) |
| 14. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Tahun 2022 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Tahun 2021 | 90.735.200,00 | (12.245.800,00) | 78.489.400,00 |
| 15. Penambahan Beban Obat-Obatan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 dan pengurangan Beban Obat-Obatan Tahun 2021 | 13.843.947.501,49 | (13.212.706.938,52) | 631.240.562,97 |
| 16. Penambahan Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 dan pengurangan Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Tahun 2021 | 1.871.555.022,00 | (708.213.558,00) | 1.163.341.464,00 |
| 17. Penambahan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan pengurangan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 | 424.455.847,20 | (124.685.200,00) | 299.770.647,20 |
| 18. Penambahan Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 2.014.120.000,00 | (0,00) | 2.014.120.000,00 |
| 19. Penambahan Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 26.100.000,00 | (0,00) | 26.100.000,00 |
| Beban Jasa | | | |
| 1. Penambahan Beban Jasa Tenaga Kesehatan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 639.150.000,00 | (0,00) | 639.150.000,00 |
| 2. Pengurangan Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 dan Penambahan Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 266.025.000,00 | (13.073.010.311,00) | (12.806.985.311,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 3. Pengurangan Beban Jasa Tenaga Ahli karena Kapitalisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 Pada Sekretariat DPRD, Disperkim, dan Disbudpar | 0,00 | (289.354.000,00) | (289.354.000,00) |
| 4. Penambahan Beban Jasa Tenaga Keamanan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | 8.558.960.000,00 | 8.558.960.000,00 |
| 5. Pengurangan Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi karena Kapitalisasi Aset Lainnya Tahun 2022 Pada Diskominfo | 0,00 | (39.150.000,00) | (39.150.000,00) |
| 6. Pengurangan Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi karena Kapitalisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022 Pada Disbudpar dan Disdukcapil | 0,00 | (67.342.342,00) | (67.342.342,00) |
| 7. Penambahan Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 |
| 8. Penambahan Utang Beban Tagihan Telepon Tahun 2022 dan Pengurangan Atas Pelunasan Utang Beban Tagihan Telepon Tahun 2021 | 14.932.141,00 | (16.067.245,00) | (1.135.104,00) |
| 9. Penambahan Utang Beban Tagihan Air Tahun 2022 dan Pengurangan Atas Pelunasan Utang Beban Tagihan Air Tahun 2021 | 63.344.500,00 | (33.840.652,00) | 29.503.848,00 |
| 10. Penambahan Utang Beban Tagihan Listrik Tahun 2022 dan Pengurangan Atas Pelunasan Utang Beban Tagihan Listrik Tahun 2021 | 393.201.018,00 | (141.420.399,00) | 251.780.619,00 |
| 11. Penambahan Utang Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Tahun 2022 dan Pengurangan Atas Pelunasan Utang Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Tahun 2021 | 35.004.015,00 | (76.018.613,00) | (41.014.598,00) |
| 12. Pengurangan Beban Sewa Grader karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada DPUPR | 0,00 | (2.195.050.702,00) | (2.195.050.702,00) |
| 13. Pengurangan Beban Sewa Excavator karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada DPUPR | 0,00 | (3.498.148.226,00) | (3.498.148.226,00) |
| 14. Pengurangan Beban Sewa Asphalt Equipment karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada DPUPR | 0,00 | (3.095.636.388,00) | (3.095.636.388,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|---------------|--------------------|--------------------|
| 15. Pengurangan Beban Sewa Compacting Equipment karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada DPUPR | 0,00 | (4.262.737.889,00) | (4.262.737.889,00) |
| 16. Pengurangan Beban Sewa Loader karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada DPUPR | 0,00 | (253.170.000,00) | (253.170.000,00) |
| 17. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 dan Penambahan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 15.000.000,00 | (372.823.190,00) | (357.823.190,00) |
| 18. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | 0,00 | (277.213.100,00) | (277.213.100,00) |
| 19. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | 0,00 | (577.701.651,00) | (577.701.651,00) |
| 20. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | 0,00 | (1.064.726.500,00) | (1.064.726.500,00) |
| 21. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | 0,00 | (1.955.201.200,00) | (1.955.201.200,00) |
| 22. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | 0,00 | (40.344.144,00) | (40.344.144,00) |
| 23. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | 0,00 | (257.641.490,00) | (257.641.490,00) |
| 24. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 dan Penambahan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur dalam Rangka | 12.000.000,00 | (503.313.166,00) | (491.313.166,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|----------------|--------------------|--------------------|
| Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | | | |
| 25. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | 0,00 | (1.663.214.478,00) | (1.663.214.478,00) |
| 26. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | 0,00 | (2.556.502.600,00) | (2.556.502.600,00) |
| 27. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | 0,00 | (699.451.790,00) | (699.451.790,00) |
| 28. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | 0,00 | (149.383.100,00) | (149.383.100,00) |
| 29. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | 0,00 | (1.347.723.000,00) | (1.347.723.000,00) |
| Beban Pemeliharaan | | | |
| 1. Pengurangan Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada Kecamatan Bungur | 0,00 | (185.700.000,00) | (185.700.000,00) |
| 2. Pengurangan Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 Pada Dinas Kesehatan | 0,00 | (4.350.000,00) | (4.350.000,00) |
| 3. Pengurangan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | 150.000.000,00 | (3.919.043.872,00) | (3.769.043.872,00) |
| 4. Pengurangan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | 0,00 | (63.906.000,00) | (63.906.000,00) |
| 5. Pengurangan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung | 0,00 | (462.698.000,00) | (462.698.000,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 | | | |
| Beban Barang dan Jasa BLUD | | | |
| 1. Penambahan Beban Barang Dan Jasa dikarenakan adanya penyesuaian utang BLUD Tahun 2022 dan Pengurangan atas Pelunasan utang BLUD Tahun 2021 | 5.583.140.086,00 | (7.700.564.460,00) | (2.117.424.374,00) |
| Beban Barang dan Jasa LO | 26.598.926.825,69 | (63.745.424.740,52) | 423.503.613.083,17 |

5.4.2.3 Beban Bunga

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-------------------------|--------------------|
| 7.578.695.680,00 | 0,00 |

Beban Bunga Tahun 2022 sebesar Rp7.578.695.680,00 adalah beban bunga dalam rangka pembayaran biaya fasilitas pinjaman pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank atau BUMN yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka pembangunan RSUD baru di Kabupaten Tapin. Beban Bunga Tahun 2022 sebesar Rp7.578.695.680,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Terdapat kenaikan Beban Bunga Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp7.578.695.680,00 atau naik 100,00%. Rincian Beban Bunga Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) |
|----|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. | Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 7.578.695.680,00 | 0,00 | 7.578.695.680,00 |
| | Jumlah | 7.578.695.680,00 | 0,00 | 7.578.695.680,00 |

Perbandingan Beban Bunga LO dengan Belanja LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Beban/belanja Bunga | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1. | Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 7.578.695.680,00 | 7.578.695.680,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 7.578.695.680,00 | 7.578.695.680,00 | 0,00 |

5.4.2.4 Beban Hibah

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 56.698.494.864,00 | 62.763.906.164,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan, negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Tahun 2022 sebesar Rp56.698.494.864,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp62.763.906.164,00. Terdapat penurunan Beban Hibah Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp6.065.411.300,00 atau turun sebesar 9,66%. Rincian Beban Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat | 2.437.048.100,00 | 0,00 | 2.437.048.100,00 |
| 2 | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 1.092.770.000,00 | 1.092.770.000,00 | 0,00 |
| 3 | Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 53.168.676.764,00 | 61.671.136.164,00 | (8.502.459.400,00) |
| | Jumlah | 56.698.494.864,00 | 62.763.906.164,00 | (6.065.411.300,00) |

Perbandingan Beban Hibah LO dengan Belanja LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Beban/belanja Hibah | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat | 2.437.048.100,00 | 2.437.048.100,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 1.092.770.000,00 | 1.092.770.000,00 | 0,00 |
| 3 | Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 53.168.676.764,00 | 53.168.676.764,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 56.698.494.864,00 | 56.698.494.864,00 | 0,00 |

Penjelasan masing-masing jenis Beban Hibah adalah sebagai berikut:

a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 sebesar Rp2.437.048.100,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | Pembangunan Rumah Dinas BPN Kabupaten Tapin | 753.423.000,00 | 0,00 | 753.423.000,00 |
| 2 | Pembangunan Kantor KORAMIL Candi Laras Utara | 89.315.100,00 | 0,00 | 89.315.100,00 |
| 3 | Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapin | 1.096.938.000,00 | 0,00 | 1.096.938.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 3 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Polsek Candi Laras Utara | 497.372.000,00 | 0,00 | 497.372.000,00 |
| | Jumlah | 2.437.048.100,00 | 0,00 | 2.437.048.100,00 |

b. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2022 sebesar Rp1.092.770.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.092.770.000,00. Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Partai PDI Perjuangan | 97.990.000,00 | 97.990.000,00 | 0,00 |
| 2 | Partai Golkar | 375.630.000,00 | 375.630.000,00 | 0,00 |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 87.880.000,00 | 87.880.000,00 | 0,00 |
| 4 | Partai Persatuan Pembangunan (P3) | 57.920.000,00 | 57.920.000,00 | 0,00 |
| 5 | Partai DEMOKRAT | 97.540.000,00 | 97.540.000,00 | 0,00 |
| 6 | Partai BERKARYA | 39.780.000,00 | 39.780.000,00 | 0,00 |
| 7 | Partai NASDEM | 87.660.000,00 | 87.660.000,00 | 0,00 |
| 8 | Partai GERINDRA | 89.080.000,00 | 89.080.000,00 | 0,00 |
| 9 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 61.310.000,00 | 61.310.000,00 | 0,00 |
| 10 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 97.980.000,00 | 97.980.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 1.092.770.000,00 | 1.092.770.000,00 | 0,00 |

c. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 sebesar Rp53.168.676.764,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp61.671.136.164,00. Terdapat penurunan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp8.502.459.400,00. Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 15.134.761.900,00 | 22.715.588.500,00 | (7.580.826.600,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 2 | Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 36.432.859.864,00 | 36.776.294.164,00 | (343.434.300,00) |
| 3 | Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 1.601.055.000,00 | 2.179.253.500,00 | (578.198.500,00) |
| | Jumlah | 53.168.676.764,00 | 61.671.136.164,00 | (8.502.459.400,00) |

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 9.232.620.700,00 | 4.662.150.000,00 |

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp9.232.620.700,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp4.662.150.000,00. Terdapat kenaikan Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp4.570.470.700,00 atau naik sebesar 98,03%. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 4.279.598.100,00 | 2.048.750.000,00 | 2.230.848.100,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 2.240.700.000,00 | 0,00 | 2.240.700.000,00 |
| 3 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 55.122.600,00 | 0,00 | 55.122.600,00 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan | 2.657.200.000,00 | 2.613.400.000,00 | 43.800.000,00 |
| | Jumlah | 9.232.620.700,00 | 4.662.150.000,00 | 4.570.470.700,00 |

Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dengan Belanja LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Beban/belanja Bantuan Sosial | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|---|------------------|------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 4.279.598.100,00 | 4.279.598.100,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 2.240.700.000,00 | 2.240.700.000,00 | 0,00 |
| 3 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 55.122.600,00 | 55.122.600,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Beban/belanja Bantuan Sosial | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan | 2.657.200.000,00 | 2.657.200.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 9.232.620.700,00 | 9.232.620.700,00 | 0,00 |

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 1.205.276.346,31 | 1.867.533.011,91 |

Penyisihan Piutang merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan sesuai nilai yang diharapkan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Perhitungan Penyisihan Piutang dilakukan berdasarkan metode umur piutang (*aging schedule*). Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp1.205.276.346,31 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.867.533.011,91. Terdapat penurunan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp662.256.665,60 atau turun sebesar 35,46%. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Beban Penyisihan Piutang Pajak | 720.396.088,97 | 1.153.260.438,70 | (432.864.349,73) |
| 2 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pajak | 476.761.346,37 | 673.587.494,40 | (196.826.148,03) |
| 3 | Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Beban Penyisihan LUEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 0,00 | 56.817.057,00 | (56.817.057,00) |
| 6 | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD | 8.118.910,97 | (16.131.978,19) | 24.250.889,16 |
| | Jumlah | 1.205.276.346,31 | 1.867.533.011,91 | (662.256.665,60) |

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrual pada Tahun 2016 diakui penyisihan piutang.

5.4.2.7 Beban Lain-lain

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------|-------------------------|
| 0,00 | 9.062.405.897,24 |

Beban Lain-Lain Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp9.062.405.897,24. Terdapat penurunan Beban Lain-lain selama Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp9.062.405.897,24 atau turun sebesar 100,00%. Rincian Beban Lain-Lain Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Beban Penurunan Nilai Investasi | 0,00 | 9.104.395.897,24 | (9.104.395.897,24) |
| | BPR Tapin Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PDAM | 0,00 | 9.104.395.897,24 | (9.104.395.897,24) |
| 2 | Beban Pengakuan Aset Tetap Tanah | 0,00 | (41.990.000,00) | 41.990.000,00 |
| | Pengakuan Aset Tetap Tanah Pada SKPD Dinas Perindustrian | 0,00 | (41.990.000,00) | 41.990.000,00 |
| | Jumlah | 0,00 | 9.062.405.897,24 | (9.062.405.897,24) |

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 247.397.968.907,95 | 232.408.537.962,92 |

Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu Aset Tetap dan Aset Tetap Tidak Berwujud selama masa manfaat aset bersangkutan. Hal ini sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 sebesar Rp247.397.968.907,95 dan Tahun 2021 sebesar Rp232.408.537.962,92. Terdapat kenaikan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp14.989.430.945,03 atau naik 6,45%. Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Peralatan Dan Mesin | 37.766.960.994,87 | 32.571.319.732,99 | 5.195.641.261,88 |
| 2 | Gedung Dan Bangunan | 63.583.710.321,08 | 62.972.919.091,00 | 610.791.230,08 |
| 3 | Jalan Jaringan Dan Irigasi | 145.386.993.199,00 | 136.125.952.399,93 | 9.261.040.799,07 |
| 4 | Aset Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aset Tak Berwujud | 660.304.393,00 | 738.346.739,00 | (78.042.346,00) |
| | Jumlah | 247.397.968.907,95 | 232.408.537.962,92 | 14.989.430.945,03 |

Perhitungan Beban Penyusutan diberlakukan mulai Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Metode penyusutan yang diterapkan adalah metode garis lurus selain Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Lainnya (hewan ternak, buku, dan tanaman);
- Nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu; dan
- Nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan bulanan.

Penjelasan masing-masing jenis Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.4.2.8.1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 37.766.960.994,87 | 32.571.319.732,99 |

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp37.766.960.994,87 dan Tahun 2021 sebesar Rp32.571.319.732,99. Terdapat kenaikan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp5.195.641.261,88 atau naik 15,95%. Adapun rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Beban Penyusutan Alat Besar | 1.913.428.834,00 | 1.714.643.051,00 | 198.785.783,00 |
| 2 | Beban Penyusutan Alat Angkutan | 35.167.732.020,87 | 8.261.429.852,00 | 26.906.302.168,87 |
| 3 | Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur | 0,00 | 295.313.546,00 | (295.313.546,00) |
| 4 | Beban Penyusutan Alat Pertanian | 0,00 | 837.383.697,00 | (837.383.697,00) |
| 5 | Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga | 139.035.373,00 | 5.235.870.668,98 | (5.096.835.295,98) |
| 6 | Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 0,00 | 995.370.042,00 | (995.370.042,00) |
| 7 | Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan | 0,00 | 5.118.352.028,01 | (5.118.352.028,01) |
| 8 | Beban Penyusutan Alat Laboratorium | 0,00 | 3.260.224.211,00 | (3.260.224.211,00) |
| 9 | Beban Penyusutan Komputer | 546.764.767,00 | 6.535.996.500,00 | (5.989.231.733,00) |
| 10 | Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja | 0,00 | 98.460.000,00 | (98.460.000,00) |
| 11 | Beban Penyusutan Rambu-Rambu | 0,00 | 160.608.403,00 | (160.608.403,00) |
| 12 | Beban Penyusutan Peralatan Olahraga | 0,00 | 57.667.734,00 | (57.667.734,00) |
| | Jumlah | 37.766.960.994,87 | 32.571.319.732,99 | 5.195.641.261,88 |

5.4.2.8.2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 63.583.710.321,08 | 62.972.919.091,00 |

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp63.583.710.321,08 dan Tahun 2021 sebesar Rp62.972.919.091,00. Terdapat kenaikan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp610.791.230,08 atau naik 0,97%. Adapun rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung | 63.583.710.321,08 | 62.268.771.561,00 | 1.314.938.760,08 |
| 2 | Beban Penyusutan Monumen | 0,00 | 701.877.530,00 | (701.877.530,00) |
| 3 | Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti | 0,00 | 2.270.000,00 | (2.270.000,00) |
| | Jumlah | 63.583.710.321,08 | 62.972.919.091,00 | 610.791.230,08 |



5.4.2.8.3. Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 145.386.993.199,00 | 136.125.952.399,93 |

Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 sebesar Rp145.386.993.199,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp136.125.952.399,93. Terdapat kenaikan Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp9.261.040.799,07 atau naik 6,80%. Adapun rincian Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan | 144.289.986.137,00 | 93.007.812.227,93 | 51.282.173.909,07 |
| 2 | Beban Penyusutan Bangunan Air | 443.868.656,00 | 34.526.836.904,00 | (34.082.968.248,00) |
| 3 | Beban Penyusutan Instalasi | 7.897.896,00 | 1.627.558.105,00 | (1.619.660.209,00) |
| 4 | Beban Penyusutan Jaringan | 645.240.510,00 | 6.963.745.163,00 | (6.318.504.653,00) |
| | Jumlah | 145.386.993.199,00 | 136.125.952.399,93 | 9.261.040.799,07 |

5.4.2.8.4. Beban Penyusutan Aset Lain-lain

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------|--------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Beban Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat penurunan/kenaikan Beban Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022 dibanding Tahun 2021.

5.4.2.8.6. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-----------------------|-----------------------|
| 660.304.393,00 | 738.346.739,00 |

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022 sebesar Rp660.304.393,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp738.346.739,00. Terdapat penurunan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp78.042.346,00 atau turun 10,57%. Adapun rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | 660.304.393,00 | 738.346.739,00 | (78.042.346,00) |
| | Jumlah | 660.304.393,00 | 738.346.739,00 | (78.042.346,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.4.2.9 Beban Transfer

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 72.062.714.136,50 | 73.404.107.116,00 |

Beban Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Beban Transfer terdiri atas beban sebagai berikut:

| No | Beban | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Beban Bagi Hasil | 2.519.839.550,50 | 2.039.312.404,00 | 480.527.146,50 |
| 2 | Beban Bantuan Keuangan | 69.542.874.586,00 | 71.364.794.712,00 | (1.821.920.126,00) |
| | Jumlah | 72.062.714.136,50 | 73.404.107.116,00 | (1.341.392.979,50) |

Perbandingan Beban Transfer LO dengan Belanja Transfer LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Beban/Belanja Transfer | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Beban Bagi Hasil | 2.519.839.550,50 | 2.519.839.550,50 | 0,00 |
| 2 | Beban Bantuan Keuangan | 69.542.874.586,00 | 162.618.511.346,00 | (93.075.636.760,00) |
| | Jumlah | 72.062.714.136,50 | 165.138.350.896,50 | (93.075.636.760,00) |

Penjelasan selisih Beban Transfer LO dengan Belanja Transfer LRA tahun 2022 sebesar Rp93.075.636.760,00 terdiri dari:

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| Belanja Transfer LRA | | | 165.138.350.896,50 |
| 1. Pengurangan Beban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari APBN Karena Pelaksanaan kegiatannya di Pemerintahan Desa dan Pendapatannya pun langsung di transfer dari RKUD ke RKD | 0,00 | (93.075.636.760,00) | (93.075.636.760,00) |
| Beban Transfer LO | 0,00 | (93.075.636.760,00) | 72.062.714.136,50 |

Penjelasan masing-masing jenis Beban Transfer adalah sebagai berikut:

5.4.2.9.1 Beban Transfer Bagi Hasil

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 2.519.839.550,50 | 2.039.312.404,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Beban Transfer Bagi Hasil terdiri atas beban sebagai berikut:

| No | Beban | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 2.267.224.672,50 | 1.805.616.074,00 | 461.608.598,50 |
| 2 | Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 252.614.878,00 | 233.696.330,00 | 18.918.548,00 |
| | Jumlah | 2.519.839.550,50 | 2.039.312.404,00 | 480.527.146,50 |

Penjelasan masing-masing jenis Beban Transfer Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

a. Bagi Hasil Pajak Daerah

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 2.267.224.672,50 | 1.805.616.074,00 |

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2022 sebesar Rp2.267.224.672,50 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.805.616.074,00. Terdapat kenaikan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp461.608.598,50. Beban transfer bagi hasil pajak daerah merupakan beban transfer yang dianggarkan minimal 10% dari pendapatan pajak daerah. Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Kecamatan | Banyaknya Desa | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan (Penurunan) Rp |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Binuang | 8 | 154.955.524,50 | 132.775.248,00 | 22.180.276,50 |
| 2. | Tapin Selatan | 10 | 167.114.151,00 | 87.572.470,00 | 79.541.681,00 |
| 3. | Tapin Tengah | 17 | 370.044.558,50 | 153.769.794,00 | 216.274.764,50 |
| 4. | Tapin Utara | 12 | 139.260.364,50 | 139.511.117,00 | (250.752,50) |
| 5. | Candi Laras Selatan | 12 | 194.443.897,50 | 177.027.372,00 | 17.416.525,50 |
| 6. | Candi Laras Utara | 13 | 255.063.089,00 | 242.752.423,00 | 12.310.666,00 |
| 7. | Bakarangan | 12 | 211.435.315,00 | 150.923.372,00 | 60.511.943,00 |
| 8. | Piani | 8 | 130.777.064,50 | 132.488.999,00 | (1.711.934,50) |
| 9. | Bungur | 12 | 179.339.306,50 | 168.102.447,00 | 11.236.859,50 |
| 10. | Lokpaikat | 8 | 134.824.270,00 | 112.184.398,00 | 22.639.872,00 |
| 11. | Salam Babaris | 6 | 153.009.061,50 | 139.625.116,00 | 13.383.945,50 |
| 12. | Hatungun | 8 | 176.958.070,00 | 168.883.318,00 | 8.074.752,00 |
| | Jumlah | | 2.267.224.672,50 | 1.805.616.074,00 | 461.608.598,50 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

b. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-----------------------|-----------------------|
| 252.614.878,00 | 233.696.330,00 |

Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2022 sebesar Rp252.614.878,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp233.696.330,00. Terdapat kenaikan Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp18.918.548,00. Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya daerah merupakan beban transfer bagi hasil retribusi yang dianggarkan minimal 10% dari pendapatan retribusi daerah. Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

| No | Kecamatan | Banyaknya Desa | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan (Penurunan) Rp |
|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. | Binuang | 8 | 17.189.898,00 | 15.661.287,00 | 1.528.611,00 |
| 2. | Tapin Selatan | 10 | 21.626.198,00 | 17.914.359,00 | 3.711.839,00 |
| 3. | Tapin Tengah | 17 | 26.971.791,00 | 32.213.996,00 | (5.242.205,00) |
| 4. | Tapin Utara | 12 | 15.977.133,00 | 20.819.520,00 | (4.842.387,00) |
| 5. | Candi Laras Selatan | 12 | 22.336.951,50 | 20.898.603,00 | 1.438.348,50 |
| 6. | Candi Laras Utara | 13 | 31.159.721,50 | 25.417.083,00 | 5.742.638,50 |
| 7. | Bakarangan | 12 | 17.631.233,00 | 22.166.758,00 | (4.535.525,00) |
| 8. | Piani | 8 | 14.875.978,00 | 16.894.849,00 | (2.018.871,00) |
| 9. | Bungur | 12 | 23.048.097,00 | 21.611.727,00 | 1.436.370,00 |
| 10. | Lokpaikat | 8 | 18.174.251,00 | 12.902.608,00 | 5.271.643,00 |
| 11. | Salam Babaris | 6 | 19.806.676,00 | 15.421.230,00 | 4.385.446,00 |
| 12. | Hatungun | 8 | 23.816.950,00 | 11.774.310,00 | 12.042.640,00 |
| Jumlah | | | 252.614.878,00 | 233.696.330,00 | 18.918.548,00 |

5.4.2.9.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 69.542.874.586,00 | 71.364.794.712,00 |

Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2022 sebesar Rp69.542.874.586,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp71.364.794.712,00. Terdapat penurunan Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp1.821.920.126,00 atau turun 2,55%. Beban Transfer Bantuan Keuangan adalah beban transfer yang dianggarkan minimal 10% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus. Beban Transfer Bantuan Keuangan terdiri atas beban sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Beban | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa | 69.542.874.586,00 | 71.364.794.712,00 | (1.821.920.126,00) |
| | Jumlah | 69.542.874.586,00 | 71.364.794.712,00 | (1.821.920.126,00) |

Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut:

a. Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

| No | Kecamatan | Banyaknya Desa | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan (Penurunan) Rp |
|-----|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. | Binuang | 8 | 4.409.029.013,00 | 4.568.234.132,00 | (159.205.119,00) |
| 2. | Tapin Selatan | 10 | 5.493.240.636,00 | 5.638.727.994,00 | (145.487.358,00) |
| 3. | Tapin Tengah | 17 | 9.419.155.014,00 | 9.515.320.835,00 | (96.165.821,00) |
| 4. | Tapin Utara | 12 | 6.431.348.644,00 | 6.402.033.079,00 | 29.315.565,00 |
| 5. | Candi Laras Selatan | 12 | 6.521.947.245,00 | 6.583.894.544,00 | (61.947.299,00) |
| 6. | Candi Laras Utara | 13 | 7.450.560.861,00 | 7.595.125.467,00 | (144.564.606,00) |
| 7. | Bakarangan | 12 | 6.489.825.723,00 | 6.789.487.857,00 | (299.662.134,00) |
| 8. | Piani | 8 | 4.463.474.113,00 | 4.614.067.826,00 | (150.593.713,00) |
| 9. | Bungur | 12 | 6.552.273.522,00 | 6.700.354.500,00 | (148.080.978,00) |
| 10. | Lokpaikat | 8 | 4.355.192.838,00 | 4.398.960.734,00 | (43.767.896,00) |
| 11. | Salam Babaris | 6 | 3.253.197.026,00 | 3.430.833.309,00 | (177.636.283,00) |
| 12. | Hatungun | 8 | 4.313.482.401,00 | 4.715.649.652,00 | (402.167.251,00) |
| 13. | Iuran BPJS (Kepala Desa dan Perangkat Desa) | | 390.147.550,00 | 412.104.783,00 | (21.957.233,00) |
| | Jumlah | | 69.542.874.586,00 | 71.364.794.712,00 | (1.821.920.126,00) |

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi dan Transfer

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------|----------------------------|
| <u>272.371.748.657,35</u> | <u>(54.266.136.861,45)</u> |

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp 272.371.748.657,35 dan Tahun 2021 sebesar (Rp54.266.136.861,45) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|----|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Pendapatan | 1.538.954.366.012,28 | 1.107.909.981.496,70 |
| 2 | Beban | (1.266.582.617.354,93) | (1.162.176.118.358,15) |
| | Jumlah | 272.371.748.657,35 | (54.266.136.861,45) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.4.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| (3.119.054.099,00) | (2.892.206.644,00) |

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 sebesar (Rp 3.119.054.099,00) dan Tahun 2021 sebesar (Rp2.892.206.644,00) sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|----|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Jumlah Surplus Non Operasional | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Jumlah Defisit Non Operasional | (3.119.054.099,00) | (2.892.206.644,00) |
| | Jumlah | (3.119.054.099,00) | (2.892.206.644,00) |

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Defisit Atas Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non lancar | 3.119.054.099,00 | 0,00 | 3.119.054.099,00 |
| 2 | Defisit atas Koreksi Bukan Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Defisit atas Ekstrakomptabel | 0,00 | 2.759.460.577,00 | (2.759.460.577,00) |
| 4 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 132.746.067,00 | (132.746.067,00) |
| | Jumlah | 3.119.054.099,00 | 2.892.206.644,00 | 226.847.455,00 |

5.4.5 Pos Luar Biasa

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 2.159.404.542,00 | 1.195.427.274,00 |

Pos Luar Biasa merupakan beban tak terduga Tahun 2022 sebesar Rp2.159.404.542,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.195.427.274,00. Terdapat kenaikan Beban Luar Biasa Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp963.977.268,00 atau naik 80,64%. Beban Luar Biasa Tahun 2022 merupakan Beban Tak Terduga dalam rangka penanganan Pandemi Covid 19.

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|----|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Beban Tak Terduga | 2.159.404.542,00 | 1.195.427.274,00 | 963.977.268,00 |
| | Jumlah | 2.159.404.542,00 | 1.195.427.274,00 | 963.977.268,00 |

Perbandingan Beban Tak Terduga LO dengan Belanja Transfer LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Beban/Belanja Tak Terduga | Tahun 2022 (Rp) | | Selisih LRA dengan LO (Rp) |
|----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | LO | LRA | |
| 1 | Beban Tak Terduga | 2.159.404.542,00 | 14.038.372.812,00 | (11.878.968.270,00) |
| | Jumlah | 2.159.404.542,00 | 14.038.372.812,00 | (11.878.968.270,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Penjelasan selisih Beban Tak Terduga LO dengan Belanja LRA tahun 2022 sebesar Rp11.878.968.270,00 terdiri dari:

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--|-------------|--------------------|--------------------------|
| Belanja Tak Terduga LRA | | | 14.038.372.812,00 |
| 1. Pengurangan Beban Tak Terduga atas Atribusi Pengadaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah | 0,00 | (13.450.000,00) | (13.450.000,00) |
| 2. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (19.114.700,00) | (19.114.700,00) |
| 3. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (61.258.900,00) | (61.258.900,00) |
| 4. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (24.988.100,00) | (24.988.100,00) |
| 5. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (600.000,00) | (600.000,00) |
| 6. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (50.870.000,00) | (50.870.000,00) |
| 7. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (2.014.120.000,00) | (2.014.120.000,00) |
| 8. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (478.370,00) | (478.370,00) |
| 9. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (14.203.000,00) | (14.203.000,00) |
| 10. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (26.100.000,00) | (26.100.000,00) |
| 11. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (12.000.000,00) | (12.000.000,00) |
| 12. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (15.000.000,00) | (15.000.000,00) |
| 13. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Keamanan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (8.558.960.000,00) | (8.558.960.000,00) |
| 14. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (266.025.000,00) | (266.025.000,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 15. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Kesehatan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (639.150.000,00) | (639.150.000,00) |
| 16. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (2.192.200,00) | (2.192.200,00) |
| 17. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Tagihan Air dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (191.500,00) | (191.500,00) |
| 18. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Tagihan Listrik dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (3.016.500,00) | (3.016.500,00) |
| 19. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (7.250.000,00) | (7.250.000,00) |
| 20. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022 | 0,00 | (150.000.000,00) | (150.000.000,00) |
| Beban Tak Terduga LO | 0,00 | (11.878.968.270,00) | 2.159.404.542,00 |

5.4.6 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| <u>(2.159.404.542,00)</u> | <u>(1.195.427.274,00)</u> |

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2022 sebesar (Rp2.159.404.542,00) dan Tahun 2021 sebesar (Rp1.195.427.274,00)

5.4.7 Surplus/Defisit-LO

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------|----------------------------|
| <u>267.093.290.016,35</u> | <u>(58.353.770.779,45)</u> |

Surplus/Defisit-LO Tahun 2022 sebesar Rp267.093.290.016,35 dan Tahun 2021 sebesar (Rp58.353.770.779,45) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|----|---|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Surplus /Defisit dari Kegiatan Operasional | 272.371.748.657,35 | (54.266.136.861,45) |
| 2 | Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | (3.119.054.099,00) | (2.892.206.644,00) |
| 3 | Surplus/Defisit dari Kegiatan Pos Luar Biasa | (2.159.404.542,00) | (1.195.427.274,00) |
| | Surplus/Defisit- LO | 267.093.290.016,35 | (58.353.770.779,45) |



5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Komponen-Komponen Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun dengan metode langsung. Laporan Arus Kas Tahun 2022 menunjukkan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar Rp282.066.233.815,36. Hal ini diperoleh dari saldo awal kas Pemerintah Kabupaten ditambah/dikurangi dengan arus masuk kas dan arus keluar dari Arus Kas Aktivitas Operasi, Arus Kas Aktivitas Investasi Non Keuangan, Arus Kas Aktivitas Pembiayaan, dan Arus Kas Aktivitas Non Anggaran yaitu sebagai berikut:

| Jenis Aktivitas | Arus Masuk (Rp) | Arus Keluar (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Arus Kas Tahun 2022: | | | |
| - Operasi | 1.717.393.779.070,93 | 1.162.306.374.587,50 | 555.087.404.483,43 |
| - Investasi Non Keuangan | 537.821.000,00 | 483.199.477.506,00 | (482.661.656.506,00) |
| - Pendanaan | 35.325.301.785,00 | 12.855.756.394,00 | 22.469.545.391,00 |
| - Non Anggaran | 89.625.108.207,00 | 89.625.108.207,00 | 0,00 |
| Kenaikan/(Penurunan) Kas di BUD, BLUD, JKN, Bendahara Penerimaan dan BOS | | | 94.895.293.368,43 |
| Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan JKN | | | 132.792.517.161,10 |
| Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, JKN, Bendahara Penerimaan dan BOS | | | 227.687.810.529,53 |
| Saldo Akhir terdiri dari: | | | |
| - Kas di BUD (Kasda) | | | 208.402.861.001,83 |
| - Kas di Bendahara Pengeluaran | | | 0,00 |
| - Kas di BLUD | | | 18.779.154.443,70 |
| - Kas di Bendahara FKTP | | | 319.824.928,00 |
| - Kas di Bendahara BOS | | | 185.970.156,00 |
| - Kas Lainnya | | | 0,00 |
| - Setara Kas | | | 0,00 |

Penjelasan masing-masing komponen arus kas tersebut adalah sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| <u>555.087.404.483,43</u> | <u>138.241.465.843,83</u> |

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 menunjukkan saldo lebih sebesar Rp555.087.404.483,43 merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Penerimaan Pajak Daerah | Rp. | 27.427.262.028,47 |
| Penerimaan Retribusi Daerah | Rp. | 4.003.044.421,23 |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Rp. | 5.179.875.915,00 |
| Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah | Rp. | 55.738.374.042,23 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| Dana Perimbangan | Rp. | 1.357.000.364.733,00 |
| Penerimaan Dana Insentif Daerah | Rp. | 5.594.207.000,00 |
| Penerimaan Dana Desa | Rp. | 93.075.636.760,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil | Rp. | 134.607.223.735,00 |
| Penerimaan Hibah | Rp. | 9.882.398.701,00 |
| Penerimaan Lainnya | Rp. | 24.885.391.735,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | Rp. | 1.717.393.779.070,93 |

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi:

| | | |
|---|------------|-----------------------------|
| Pembayaran Pegawai | Rp. | 448.969.728.637,00 |
| Pembayaran Barang dan Jasa | Rp. | 460.650.110.998,00 |
| Pembayaran Bunga | Rp. | 7.578.695.680,00 |
| Pembayaran Hibah | Rp. | 56.698.494.864,00 |
| Pembayaran Bantuan Sosial | Rp. | 9.232.620.700,00 |
| Pembayaran Tak Terduga | Rp. | 14.038.372.812,00 |
| Pembayaran Bagi Hasil | Rp. | 2.519.839.550,50 |
| Pembayaran Bantuan Keuangan | Rp. | 162.618.511.346,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | Rp. | 1.162.306.374.587,50 |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi | Rp. | 555.087.404.483,43 |

Perbandingan Aktivitas Operasi-Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar pada Laporan Arus Kas dengan Pendapatan dan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

| Uraian | LAK (Rp) | LRA (Rp) | Selisih Lebih / (Kurang) (Rp) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <u>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:</u> | | | |
| 1. Penerimaan Pajak Daerah | 27.427.262.028,47 | 27.427.262.028,47 | 0,00 |
| 2. Penerimaan Retribusi Daerah | 4.003.044.421,23 | 4.003.044.421,23 | 0,00 |
| 3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 5.179.875.915,00 | 5.179.875.915,00 | 0,00 |
| 4. Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah | 55.738.374.042,23 | 56.276.195.042,23 | 537.821.000,00 |
| 5. Penerimaan Dana Perimbangan | 1.357.000.364.733,00 | 1.357.000.364.733,00 | 0,00 |
| 6. Penerimaan Dana Insentif Daerah | 5.594.207.000,00 | 5.594.207.000,00 | 0,00 |
| 7. Penerimaan Dana Desa | 93.075.636.760,00 | 93.075.636.760,00 | 0,00 |
| 8. Penerimaan Dana Bagi Hasil | 134.607.223.735,00 | 134.607.223.735,00 | 0,00 |
| 9. Penerimaan Hibah | 9.882.398.701,00 | 9.882.398.701,00 | 0,00 |
| 10. Penerimaan Lainnya | 24.885.391.735,00 | 24.885.391.735,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 1.717.393.779.070,93 | 1.717.931.600.070,93 | 0,00 |
| <u>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi:</u> | | | |
| 1. Pembayaran Pegawai | 448.969.728.637,00 | 448.969.728.637,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | LAK (Rp) | LRA (Rp) | Selisih Lebih / (Kurang) (Rp) |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2. Pembayaran Barang dan Jasa | 460.650.110.998,00 | 460.650.110.998,00 | 0,00 |
| 3. Pembayaran Bunga | 7.578.695.680,00 | 7.578.695.680,00 | 0,00 |
| 4. Pembayaran Hibah | 56.698.494.864,00 | 56.698.494.864,00 | 0,00 |
| 5. Pembayaran Bantuan Sosial | 9.232.620.700,00 | 9.232.620.700,00 | 0,00 |
| 6. Pembayaran Tak Terduga | 14.038.372.812,00 | 14.038.372.812,00 | 0,00 |
| 7. Pembayaran Bagi Hasil | 2.519.839.550,50 | 2.519.839.550,50 | 0,00 |
| 8. Pembayaran Bantuan Keuangan | 162.618.511.346,00 | 162.618.511.346,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 1.162.306.374.587,50 | 1.162.306.374.587,50 | 0,00 |

Terdapat selisih antara LAK dengan LRA pada Aktivitas Operasi sebesar Rp537.821.000,00 yang disebabkan oleh perbedaan pengelompokan atas Pos Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan. Pada LAK dikelompokkan ke Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sedangkan pada LRA dikelompokkan ke Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang merupakan Hasil Penjualan Peralatan Mesin dan Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LRA sebesar Rp537.821.000,00.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (482.661.656.506,00) | (442.226.713.608,00) |

Arus kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 menunjukkan saldo kurang sebesar Rp482.661.656.506,00 merupakan selisih arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan:

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| Hasil Penjualan Peralatan Mesin | Rp. | 534.498.000,00 |
| Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | Rp. | 3.323.000,00 |
| Hasil Penjualan Aset Lainnya | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | Rp. | 537.821.000,00 |

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan:

| | | |
|--|------------|-----------------------------|
| Perolehan Tanah | Rp. | 3.450.800.000,00 |
| Perolehan Peralatan Dan Mesin | Rp. | 70.914.035.623,00 |
| Perolehan Gedung Dan Bangunan | Rp. | 154.432.756.722,00 |
| Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | Rp. | 252.793.986.263,00 |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | Rp. | 1.607.898.898,00 |
| Perolehan Aset Lainnya | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | Rp. | 483.199.477.506,00 |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Non Keuangan | Rp. | (482.661.656.506,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Perbandingan Aktivitas Investasi Non Keuangan - Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar pada Laporan Arus Kas dengan Pendapatan dan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

| Uraian | LAK (Rp) | LRA (Rp) | Selisih Lebih / (Kurang) (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan : | | | |
| 1. Hasil Penjualan Peralatan Mesin | 534.498.000,00 | 0,00 | 534.498.000,00 |
| 2. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | 3.323.000,00 | 0,00 | 3.323.000,00 |
| 3. Hasil Penjualan Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 537.821.000,00 | 0,00 | 537.821.000,00 |
| Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan : | | | |
| 1. Perolehan Tanah | 3.450.800.000,00 | 3.450.800.000,00 | 0,00 |
| 2. Perolehan Peralatan Dan Mesin | 70.914.035.623,00 | 70.914.035.623,00 | 0,00 |
| 3. Perolehan Gedung Dan Bangunan | 154.432.756.722,00 | 154.432.756.722,00 | 0,00 |
| 4. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 252.793.986.263,00 | 252.793.986.263,00 | 0,00 |
| 5. Perolehan Aset Tetap Lainnya | 1.607.898.898,00 | 1.607.898.898,00 | 0,00 |
| 6. Perolehan Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 483.199.477.506,00 | 483.199.477.506,00 | 0,00 |

Terdapat selisih antara LAK dengan LRA pada Aktivitas Investasi sebesar Rp537.821.000,00 yang disebabkan oleh perbedaan pengelompokan atas Pos Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan. Pada LAK dikelompokkan ke Arus Kas dari Aktivitas Investasi sedangkan pada LRA dikelompokkan ke Lain-Lain PAD yang Sah yaitu Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp534.498.000,00 dan Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LRA sebesar Rp3.323.000,00.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|
| 22.469.545.391,00 | 109.941.455.693,00 |

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Tahun 2022 menunjukkan saldo sebesar Rp22.469.545.391,00 yang merupakan selisih jumlah arus kas masuk dengan jumlah arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|--|------------|--------------------------|-------------------|
| Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan: | | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp. | | 35.304.861.744,00 |
| Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | Rp. | | 20.440.041,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | Rp. | 35.325.301.785,00 | |
| Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan: | | | |
| Pemberian Pokok Utang | Rp. | | 12.855.756.394,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | Rp. | 12.855.756.394,00 | |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | Rp. | 22.469.545.391,00 | |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Perbandingan Aktivitas Pendanaan - Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar pada Laporan Arus Kas dengan Pendanaan Penerimaan dan Pengeluaran pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

| Uraian | LAK (Rp) | LRA (Rp) | Selisih Lebih / (Kurang) (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan: | | | |
| 1. Penerimaan Pinjaman Daerah | 35.304.861.744,00 | 35.304.861.744,00 | 0,00 |
| 2. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | 20.440.041,00 | 20.440.041,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 35.325.301.785,00 | 35.325.301.785,00 | 0,00 |
| Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan: | | | |
| 1. Pemberian Pokok Utang | 12.855.756.394,00 | 12.855.756.394,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 12.855.756.394,00 | 12.855.756.394,00 | 0,00 |

Tidak terdapat selisih antara LAK dengan LRA pada aktivitas pembiayaan baik pada arus kas masuk maupun arus kas keluarnya.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------|--------------------|
| 0,00 | 0,00 |

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2022 menunjukkan saldo Rp0,00 merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus keluar dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|------------|--------------------------|--|
| Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran: | | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Rp. | 89.625.108.207,00 | |
| Penerimaan Transfer | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Arus Kas Masuk | Rp. | 89.625.108.207,00 | |
| Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran: | | | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Rp. | 89.625.108.207,00 | |
| Pengeluaran Transfer | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Arus Kas Keluar | Rp. | 89.625.108.207,00 | |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran | Rp. | 0,00 | |

Penerimaan PFK dan Pengeluaran PFK sebesar Rp89.625.108.207,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1 | IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai | 4.121.257.718,00 |
| 2 | IWP(8%) Iuran Wajib Pegawai | 11.262.225.068,00 |
| 3 | BPJS Kesehatan PNS | 1.712.651.427,00 |
| 4 | PPh Pasal 21 | 13.325.888.303,00 |
| 5 | PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon | 961.504.700,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------------------------|
| 6 | Pajak Penghasilan Pasal 22 | 1.096.198.975,00 |
| 7 | Pajak Penghasilan Pasal 23 | 189.584.582,00 |
| 8 | Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan | 9.650.000,00 |
| 9 | PPH Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi | 8.909.368.056,00 |
| 10 | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 47.719.388.908,00 |
| 11 | Taperum | 317.350.970,00 |
| 12 | Pajak UMKM | 39.500,00 |
| | Jumlah | 89.625.108.207,00 |

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------|-----------------------------|
| 94.895.293.368,43 | (194.043.792.071,17) |

Kenaikan/penurunan kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tapin sampai dengan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 94.895.293.368,43 dan (Rp194.043.792.071,17). Rincian kenaikan/penurunan kas Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---|--------------------------|-----------------------------|
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 555.087.404.483,43 | 138.241.465.843,83 |
| Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi | (482.661.656.506,00) | (442.226.713.608,00) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | 22.469.545.391,00 | 109.941.455.693,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran | 0,00 | 0,00 |
| Kenaikan / (Penurunan) Kas | 94.895.293.368,43 | (194.043.792.071,17) |

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BLUD, Bendahara FKTP dan Bendahara BOS

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 132.792.517.161,10 | 326.836.309.232,27 |

Saldo awal kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BLUD, Bendahara FKTP dan Bendahara BOS per 1 Januari 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp132.792.517.161,10 dan Rp326.836.309.232,27 sehingga terjadi penurunan saldo awal kas sebesar Rp194.043.792.071,17 atau turun sebesar 59,37% dari jumlah saldo awal kas Tahun 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.5.7 Saldo Akhir Kas

| | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 227.687.810.529,53 | 132.792.517.161,10 |

Saldo akhir kas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp227.687.810.529,53 dan Rp132.792.517.161,10 sehingga terjadi kenaikan saldo akhir kas sebesar Rp94.895.293.368,43 atau naik sebesar 58,32% dari jumlah saldo akhir kas Tahun 2021. Rincian saldo akhir kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp227.687.810.529,53 terdiri dari:

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Kas di BUD (Kas Daerah) | 208.402.861.001,83 | 97.948.848.794,42 | 110.454.012.207,41 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 143.148.682,00 | (143.148.682,00) |
| Kas di BLUD | 18.779.154.443,70 | 32.694.317.624,24 | (13.915.163.180,54) |
| Kas di Bendahara FKTP | 319.824.928,00 | 550.316.951,00 | (230.492.023,00) |
| Kas di Bendahara BOS | 185.970.156,00 | 1.455.885.109,44 | (1.269.914.953,44) |
| Kas Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Setara Kas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Akhir Kas | 227.687.810.529,53 | 132.792.517.161,10 | 94.895.293.368,43 |



5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan ekuitas akhir Pemerintah Daerah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun operasional. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>2.249.460.756.434,27</u> | <u>2.367.075.347.167,32</u> |

Rincian nilai Ekuitas Awal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| | | |
|--------------|----|-----------------------------|
| 1. Aset | Rp | 2.418.832.591.790,80 |
| 2. Kewajiban | Rp | <u>169.371.835.356,53</u> |
| 3. Ekuitas | Rp | <u>2.249.460.756.434,27</u> |

5.6.2. Surplus/Defisit-LO

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------|----------------------------|
| <u>267.093.290.016,35</u> | <u>(58.353.770.779,45)</u> |

Surplus/Defisit-LO Tahun 2022 yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp 248.330.127.557,80 berasal dari:

| | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|
| Pendapatan | Rp. | 1.538.954.366.012,28 | |
| Beban | Rp. | <u>1.266.582.617.354,93</u> | - |
| Surplus/Defisit dari Operasi | Rp. | 272.371.748.657,35 | |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | Rp. | (3.119.054.099,00) | |
| Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa | Rp. | <u>(2.159.404.542,00)</u> | + |
| Surplus/Defisit-LO | Rp. | <u>267.093.290.016,35</u> | |

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------|----------------------------|
| <u>219.425.023.696,13</u> | <u>(59.260.819.953,60)</u> |

Merupakan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Koreksi ekuitas Tahun 2022 dan 2021 merupakan koreksi ekuitas berupa penambahan dan pengurangan masing-masing sebesar Rp219.425.023.696,13 dan (Rp59.260.819.953,60) terdiri atas:

| No | Uraian | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|----|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Koreksi Ekuitas - Piutang | 197.058.336.053,00 | (70.077.140.228,47) |
| 2. | Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang | 0,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|-----|---|---------------------------|----------------------------|
| 3. | Koreksi Ekuitas - Persediaan | (250.504.620,00) | (26.985.179,00) |
| 4. | Koreksi Ekuitas – Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Koreksi Ekuitas – Investasi Permanen | 21.552.089.250,73 | 424.898.984,37 |
| 6. | Koreksi Ekuitas – Aset Tetap | (5.515.722.892,00) | 3.689.965.858,50 |
| 7. | Koreksi Ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi | (15.889.000,00) | (16.125.935,00) |
| 8. | Koreksi Ekuitas - Kewajiban | 10.122.776.678,00 | (394.676.554,00) |
| 9. | Koreksi Ekuitas - Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Koreksi Ekuitas – Bukan Aset Tetap | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Koreksi Ekuitas – Atas Penghapusan | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Koreksi Ekuitas – Atas Saldo Awal | (3.526.061.773,60) | 7.139.243.100,00 |
| | Total | 219.425.023.696,13 | (59.260.819.953,60) |

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut:

5.6.3.1. Koreksi Ekuitas – Piutang

Koreksi Ekuitas – Piutang selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 197.058.336.053,00 dan (Rp70.077.140.228,47). Koreksi Ekuitas – Piutang pada Tahun 2022 merupakan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan PMK No.127/PMK.07/2022 dan pemotongan Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat berdasarkan KMK No 37/KM.7/2022 dan Penghapusan Penyisihan Piutang LUEP tahun 2022.

5.6.3.2. Koreksi Ekuitas - Persediaan

Koreksi Ekuitas - Persediaan selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp250.504.620,00) dan (Rp26.985.179,00) dengan rincian tahun 2022 sebagai berikut :

| No | Nama SKPD | Uraian | 2022 (Rp) |
|---------------|---------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Dinas Perhubungan | Koreksi nilai untuk penerimaan dan pemakaian persediaan (Karcis). | 310.250,00 |
| 2 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Koreksi nilai untuk penerimaan dan pemakaian persediaan (Karcis). | 736.780,00 |
| 3 | Dinas Ketahanan Pangan | Koreksi atas kurang catat persediaan (Gabah) tahun 2021 | 60.000.000,00 |
| 4 | Dinas Pertanian | Koreksi atas kurang catat Persediaan (Bebek/Ayam) tahun 2021 | 15.200.000,00 |
| 5 | Dinas Perdagangan | Koreksi nilai untuk penerimaan dan pemakaian persediaan (Karcis). | 4.506.350,00 |
| 6 | Badan Pendapatan Daerah | Penghapusan Persediaan (Karcis) Tahun 2019-2021 berdasarkan SK Keputusan Pengelola Barang Nomor 900/027/BKAD/SK/2022 Tanggal 17 November 2022 | (331.258.000,00) |
| Jumlah | | | (250.504.620,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.6.3.3. Koreksi Ekuitas – Investasi Permanen

Koreksi Ekuitas – Investasi Permanen selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp21.552.089.250,73 dan Rp424.898.984,37. Koreksi Ekuitas – Investasi Pemanen pada tahun 2022 merupakan pengakuan penurunan dan kenaikan nilai investasi sesuai laba berdasarkan laporan keuangan Audited BPR Tapin Selatan dan PDAM Tapin. Serta, koreksi atas lebih catat dan kurang catat pengakuan Beban Laba pada Audited BPR Tapin Selatan dan PDAM Tapin.

5.6.3.4. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp (5.515.722.892,00) dan Rp3.689.965.858,50 yang terdiri dari:

| No | Nama SKPD | 2022 (Rp) |
|---------------|---|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | (2.494.839.729,00) |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | (2.048.136.752,00) |
| 3 | Dinas Perhubungan | (557.519.000,00) |
| 4 | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata | (21.503.382,00) |
| 5 | Dinas Pertanian | (40.174.029,00) |
| 6 | Sekretariat Daerah | (102.978.000,00) |
| 7 | Kecamatan Piani | 27.594.000,00 |
| 8 | Kecamatan Tapin Selatan | (5.100.000,00) |
| 9 | Kecamatan Binuang | (267.034.000,00) |
| 10 | Kecamatan Candi Laras Selatan | (5.532.000,00) |
| 11 | Kecamatan Candi Laras Utara | (500.000,00) |
| Jumlah | | (5.515.722.892,00) |

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap mencerminkan koreksi atas nilai Aset Tetap karena kesalahan pencatatan nilai Aset Tetap yang terjadi pada periode sebelumnya. Penyebab terjadinya koreksi nilai Aset Tetap pada TA 2022 yaitu:

| No | Nama SKPD | Uraian | Jumlah (Rp) |
|--|-------------------|---|-------------------------|
| Koreksi Tambah | | | 27.594.000,00 |
| Koreksi atas Aset Kurang Catat | | | |
| 1 | Kecamatan Piani | Koreksi tambah atas kurang catat Aset Tetap Tanah | 27.594.000,00 |
| Koreksi Kurang | | | 5.543.316.892,00 |
| Koreksi atas Aset Tetap yang dihibahkan | | | 561.890.000,00 |
| 1 | Dinas Pendidikan | Hibah Aset Tetap Tanah ke Provinsi berdasarkan SK nomor 900/039/BKAD/SK/2022 | 294.856.000,00 |
| 2 | Kecamatan Binuang | Hibah Tanah Kec. Binuang kepada Yayasan Attaqwa Binuang berdasarkan SK nomor 900/035/BKAD/2022 tahun 2022 | 267.034.000,00 |
| Koreksi atas Aset yang dihapuskan | | | 4.978.994.892,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Nama SKPD | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|--|-------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | Penghapusan Aset Tetap Lainnya berdasarkan SK nomor 900/046/PEM/BKAD/2022 | 2.199.983.729,00 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Penghapusan Aset Tetap Lainnya (Kajian) dengan SK nomor 900/043/BKAD/SK/2022 dan Aset Rusak Berat Berdasarkan SK No.900/013/BKAD/SK/2022 dan No.900/042/BKAD/SK/2022 | 2.048.136.752,00 |
| 3 | Dinas Perhubungan | Penghapusan Aset Rusak Berat berdasarkan Surat Keputusan No. 900/007/BKAD/SK/2022 | 557.519.000,00 |
| 4 | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata | Jurnal Penyesuaian atas Penghapusan Aset Rusak Berat berdasarkan SK no. 900/033/BKAD/SK/2022 tahun 2022 | 21.503.382,00 |
| 5 | Dinas Pertanian | Penghapusan Aset Rusak Berat berdasarkan SK No. 900/006/BKAD/SK/2022, 900/009/BKAD/SK/2022, 900/029/BKAD/SK/2022 | 40.174.029,00 |
| 6 | Sekretariat Daerah | Penghapusan Aset Rusak Berat berdasarkan SK No. 900/032/BKAD/SK/2022 | 102.978.000,00 |
| 7 | Kecamatan Tapin Selatan | Penghapusan Aset Rusak Berat berdasarkan SK 900/021/BKAD/SK/2022 dan 900/042/BKAD/SK/2022 | 5.100.000,00 |
| 8 | Kecamatan Candi Laras Selatan | Penghapusan Aset Rusak Berat berdasarkan SK nomor 900/016/BKAD/SK/2022 Tahun 2022 | 3.100.000,00 |
| 9 | Kecamatan Candi Laras Utara | Penghapusan Aset Rusak Berat berdasarkan SK No. 900/040/BKAD/SK/2022 | 500.000,00 |
| Koreksi atas Aset tetap Tercatat Ganda | | | 2.432.000,00 |
| 1 | Kecamatan Candi Laras | Kelebihan Pembayaran Pada SP2D nomor 8450/SP2D/2022 | 2.432.000,00 |
| Jumlah | | | 5.515.722.892,00 |

5.6.3.5. Koreksi Ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi

Koreksi Ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp15.889.000,00) dan (Rp16.125.935,00) yang terdiri dari:

| No | Nama SKPD | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|----|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | (139.750.000,00) | 1.825.082.345,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 0,00 | 301.765.209,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Nama SKPD | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|---------------|--|------------------------|------------------------|
| 3 | RSUD Datu Sanggul | (1.070.820.000,00) | 0,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 12.650.614.252,00 | 14.551.467.224,00 |
| 5 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 0,00 | 3.745.738.836,00 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran | (154.878.320,00) | 20.494.659,00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 67.491.438,00 | (11.434.500,00) |
| 8 | Dinas Sosial | (340.684.570,00) | 0,00 |
| 9 | Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0,00 | (126.042,00) |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00 | (3.947.379.630,00) |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | (428.801.573,00) |
| 13 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | (466.468.320,00) | |
| 14 | Dinas Perhubungan | 0,00 | (475.310.608,00) |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | (126.333.331,00) | 0,00 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | (1.062.803.958,00) | 0,00 |
| 17 | Dinas Pemuda dan Olahraga | | (1.158.899.189,00) |
| 18 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 80.035.738,00 |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 533.838.711,00 | 5.079.402,00 |
| 20 | Dinas Perikanan | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Dinas Pertanian | (67.491.438,00) | (2.269.951.675,00) |
| 22 | Dinas Perdagangan | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Dinas Perindustrian | (18.500.000,00) | 0,00 |
| 24 | Sekretariat Daerah | (9.582.735.643,00) | (11.063.436.477,00) |
| 32 | Inspektorat | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 923.284.675,00 | (4.006.655,00) |
| 35 | Badan Pendapatan Daerah | 0,00 | (22.800.000,00) |
| 25 | Kecamatan Piani | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Kecamatan Lokpaikat | 0,00 | (114.619.973,00) |
| 27 | Kecamatan Tapin Selatan | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Kecamatan Binuang | (903.301.671,00) | 0,00 |
| 29 | Kecamatan Bungur | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Kecamatan Candi Laras Utara | (13.395.000,00) | (1.049.023.026,00) |
| 31 | Kecamatan Hatungun | (243.955.825,00) | |
| Jumlah | | (15.889.000,00) | (16.125.935,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

5.6.3.6. Koreksi Ekuitas - Kewajiban

Koreksi Ekuitas – Kewajiban selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp10.122.776.678,00 dan (Rp394.676.554,00) yaitu koreksi atas lebih salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat berdasarkan PMK No.127/PMK.07/2022 sebesar Rp518.414.476,00 dan lebih catat Utang Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan LB tahun 2021 dengan PMK No.127/PMK.07/2022.

5.6.3.7. Koreksi Ekuitas – Atas Saldo Awal

Koreksi Ekuitas – Atas Saldo Awal selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp3.526.061.773,60) dan Rp7.139.243.100,00. Koreksi Ekuitas atas Saldo Awal Tahun 2022 sebesar Rp 0,00 terdiri atas :

| No | SKPD | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|-----------------------|--|-------------------------|---|
| Koreksi Tambah | | 2.916.216.045,40 | |
| 1 | Dinas Pendidikan | 880.358.000,00 | Koreksi atas Kurang Catat Aset Tetap Tanah |
| 2 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 44.834.749,40 | Koreksi atas Kurang Catat Aset Tidak Berwujud (Software) |
| 3 | Badan Pendapatan Daerah | 1.702.123.296,00 | Koreksi atas Kurang Catat Piutang Pajak Rokok tahun 2021 berdasarkan Pergub Nomor 035 Tahun 2022 Tanggal 05 Juli 2022 |
| 4 | Kecamatan Tapin Selatan | 288.900.000,00 | Koreksi atas Kurang Catat Aset Tetap Tanah |
| Koreksi Kurang | | 6.442.277.819,00 | |
| 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul | 166.946.612,00 | Koreksi atas Kurang Catat utang BLUD Tahun 2021 |
| 2 | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata | 426.839,00 | Koreksi atas Kurang catat pemakaian karcis Tahun 2021 |
| 3 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 6.274.904.368,00 | Koreksi atas Utang Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan PMK No. 127/PMK.07/2022 |
| Jumlah | | 3.526.061.773,60 | |

5.6.4. Ekuitas Akhir

| Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (Rp) | (Rp) |
| <u>2.735.979.070.146,75</u> | <u>2.249.460.756.434,27</u> |

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.735.979.070.146,75 dan Rp2.249.460.756.434,27. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.



BAB VI PENUTUP

Sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015 maka telah dilaksanakan berbagai perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi keuangan dan pembaharuan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

LKPD Pemerintah Kabupaten Tapin ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah per tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang serta pengambilan keputusan lainnya.

Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

